

**Penilaian Hakim Tentang Alat Bukti Elektronik Dalam Proses
Pembuktian Perkara Perdata Di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar**



TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Master dalam Bidang Syari'ah Hukum Islam
pada Pascasarjana UIN Alauddin
Makassar

PROMOTOR

Prof. Dr. H. Lomba Sultan, M.A

KOPROMOTOR

Dr. H. Abd. Halim Talli, M.Ag,

Oleh :

Andi Arwin

NIM: 80101214001

PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

2016

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andi Arwin
Nim : 80101214001
Tempat/tgl lahir : Watampone, 23 November 1989
Jur/Prodi Konsentrasi : Syariah/ Hukum Islam
Alamat : Komp. Taman Asri Indah Antang
Judul : **Penilaian Hakim tentang Alat bukti elektronik dalam proses pembuktian perkara perdata di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar**

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa tesis ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka tesis dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI Makassar: 4 Agustus 2016

ALAUDDIN
M A K A S S A R

Penyusun

Andi Arwin
NIM: 80101214001

PERSETUJUAN PROMOTOR

Tesis yang berjudul “*Penilaian Hakim tentang Alat bukti elektronik dalam proses pembuktian perkara perdata di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar*” yang disusun oleh **Andi Arwin**, NIM: 80101214001, mahasiswa konsentrasi **Syariah/Hukum Islam** pada Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, memandang bahwa tesis tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk menempuh **Ujian Kualifikasi Hasil Penelitian Tesis**.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk proses selanjutnya.

PROMOTOR:

Prof. Dr. H. Lomba Sultan, M.A. (.....)

KOPROMOTOR:

Dr. H. Abd. Halim Talli, M.Ag. (.....)

Makassar, 9 Mai 2016

An. Direktur

Kuasa Direktur

Wakil Direktur Bidang Akademik
Pascasarjana UIN Alauddin Makassar

Prof. Dr. H. Achmad Abu Bakar, M.Ag.
NIP. 1970071 199403 1 001

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذي ارسل رسوله رحمة للعالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء
 والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين، اما بعد

Alhamdulillah, penulis mengucapkan puji-syukur ke hadirat Allah swt., atas rahmat dan hidayahNya jualah sehingga penulisan tesis yang berjudul Penilaian Hakim tentang Alat bukti elektronik dalam proses pembuktian perkara perdata di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar dapat diselesaikan. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah saw, dan para sahabatnya.

Dalam penulisan tesis ini, tidak sedikit hambatan dan kendala yang dialami, tetapi Alhamdulillah berkat upaya dan optimisme yang didorong oleh kerja keras yang tidak kenal lelah, serta bantuan dari berbagai pihak, sehingga penulis dapat menyelesaikannya. Namun, secara jujur penulis menyadari tesis ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis berharap kritikan dan saran yang sifatnya membangun dari semua pihak terhadap tesis ini.

Dengan tersusunnya tesis ini, penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada berbagai pihak, terutama kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Prof. Dr. H. Musafir Pababbari, M.Si. kepada Wakil Rektor 1. Wakil Rektor II, Wakil Rektor III dan Wakil rektor IV UIN Alauddin Makassar.
2. Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Prof. Dr. H. Sabri Samin, M.A., kepada Asdir I, Asdir II dan Asdir III yang telah memberikan kesempatan dengan segala fasilitas dan kemudahan kepada penulis untuk mengikuti studi pada Pascasarjana UIN Alauddin Makassar.

3. Dr. H. Kasjim Salenda, M.Thi, selaku ketua konsentrasi Syariah/Hukum Islam Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, yang telah memberikan arahan serta bimbingan dalam menyelesaikan studi.
4. Prof. Dr. H. Lomba Sultan, M.Ag., sebagai Promotor dan Dr. H. Abd. Halim Talli, M.Ag., sebagai Kopromotor, yang telah memberikan petunjuk, bimbingan, dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan tesis ini, serta kepada Dr. Hamzah Hassan, M. Hi. penguji I, Dr. Hj. Patimah, M. Hi. penguji II.
5. Segenap dosen yang telah membina penulis dan seluruh staf administrasi yang telah banyak membantu kelancaran proses perkuliahan.
6. Ketua Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar dan para Hakim Pembimbing Drs. Muh. Ikbal MH, Drs. Chairuddin, SH. MH, yang telah memberikan izin serta bimbingan kepada penulis sampai kepada penyelesaian tesis ini.
7. Pimpinan dan karyawan perpustakaan UIN Alauddin Makassar, yang telah menyediakan fasilitas dan pelayanan atas keperluan studi kepustakaan.
8. Sembah sujud penulis haturkan kepada kedua orang tua tercinta yaitu A. Muh. Rusdin dan A. Rosmiati yang telah memberikan dorongan, semangat kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
9. Secara khusus penulis sampaikan kepada saudara-saudara penulis di KEPMI Bone Kom. Latenriruwa, PA 09, yang terus memberikan motivasi, doa, dan sumbangan pemikiran selama penulis menempuh pendidikan pada Program Pascasarjana UIN Alauddin Makassar.
10. Secara khusus penulis sampaikan kepada rekan-rekan mahasiswa Pascasarjana yang terus memberikan motivasi, doa, dan sumbangan pemikiran selama penulis menempuh pendidikan pada Program Pascasarjana UIN Alauddin Makassar.

11. Teman-teman dan Kakanda-kakanda yang telah memberikan sumbangsi pemikiran hingga penyelesaian tesis ini, serta teman-teman seperjuangan.

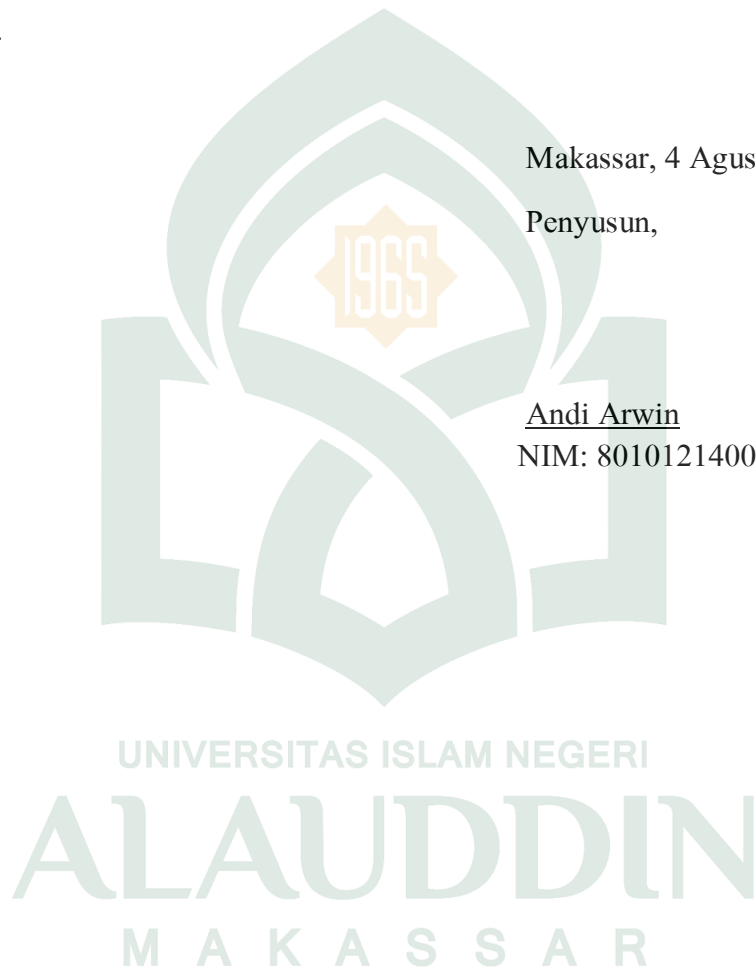
Akhirnya penulis berharap agar hasil penelitian ini dapat bermanfaat, dan segala partisipasi semua pihak semoga memperoleh imbalan yang berlipat ganda dari Allah swt.

Makassar, 4 Agustus 2016

Penyusun,

Andi Arwin

NIM: 80101214001

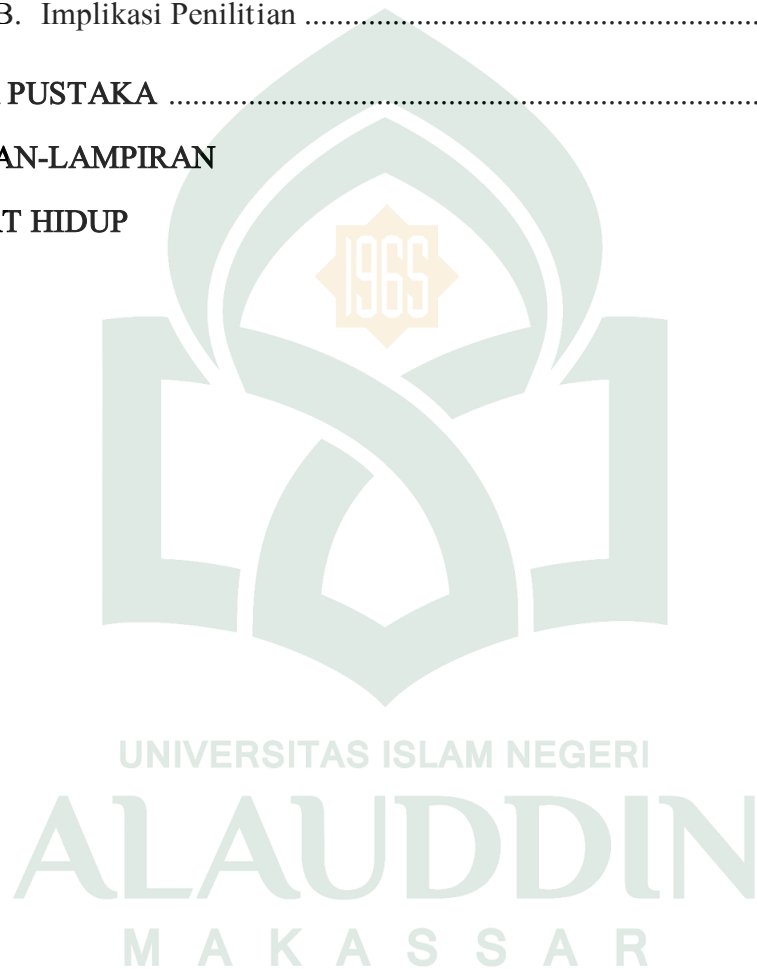


DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	ii
PENGESAHAN TESIS	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN	x
ABSTRAK	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1-21
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus Penelitian	12
C. Rumusan Masalah	16
D. Kajian Pustaka	16
E. Tujuan dan Kegunaan Peneliitian	21
BAB II TINJAUAN TEORETIS	23-100
A. Pengertian Hakim	23
1. Pengertian Hakim	23
2. Syarat Menjadi Seorang Hakim	27
3. Tugas dan Peran Seorang Hakim dalam Menangani Perkara	52
B. Tentang Pembuktian.....	56
1. Pengertian Pembuktian	56
2. Dasar Hukum Pembuktian	64
3. Jenis Alat Bukti	73
4. Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Elektronik	96

5. Hal-hal yang perlu di Buktikan	98
C. Kerangka Konseptual	100
BAB III METODE PENELITIAN.....	102-110
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	102
B. Pendekatan Penelitian	104
C. Sumber Data	104
D. Metode Pengumpulan Data	105
E. Instrumen Penelitian	106
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	107
G. Pengujian Keabsahan Data	109
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	111-154
A. Hasil Penelitian	111
1. Gambaran Umum Perkara di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar	111
2. Problematika Alat Bukti Elektronik	124
3. Analisis Yuridis Kedudukan dan Kekuatan Alat Bukti Elektronik, Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)	137
B. Penilaian Hakim	147
1. Contoh Kasus di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar Mengenai Penggunaan Alat Bukti Elektronik	147
2. Analisis Putusan Hakim dalam Memutuskan Perkara yang menggunakan Alat Bukti Elektronik di Pengadilan Agama	

Kelas 1A Makassar	151
BAB V PENUTUP	155-157
A. Kesimpulan	155
B. Implikasi Penelitian	156
DAFTAR PUSTAKA	158-162
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
1	2	3	4
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ža	ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik

غ	gain	g	ge
ف	fa	f	Ef
ق	qaf	q	Qi
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	wau	w	We
ه	ha	h	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya	y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَّ	<i>faṭah dan ya'</i>	ai	a dan i
اَوْ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauila*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا... آ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	a	a dan garis di atas
ي	<i>kasrah</i> dan <i>ya'</i>	i	i dan garis di atas
و	<i>dammah</i> dan <i>wau</i>	u	u dan garis di atas

قِيلَ : *qila*

يَمُوتُ : *yamutu*

4. *Ta' marbutah*

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua, yaitu: *ta' marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta' marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-afal*

الْمَدِينَةُ الْفَادِلَةُ : *al-madinah al-fadilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbana*

نَجِّينَا : *najjaina*

الْحَقُّ : *al-haqq*

نُعِمْ : *nu‘ima*

عُدُّو : *‘aduwwun*

Jika huruf ى ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ى), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi i.

Contoh:

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

6. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال(*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

الْفَلَسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-biladu*

7. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'muruna*

النَّوعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

8. *Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia*

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'an*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fi Zilal al-Qur'an

Al-Sunnah qabl al-tadwin

9. *Lafz al-Jalalah* (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dinullah* بِاللَّهِ *billah*

Adapun *ta' marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْفِيْرَحْمَةِ اللَّهِ *hum fi rahmatillah*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa maMuhammadunillarasul

Innaawwalabaitinwudi'alinnasi lallazi bi Bakkatamubarakan

SyahrurRamadan al-laziunzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusi

Abu Nasr al-Farabi

Al-Gazali

Al-Munqiz min al-Dalal

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu

(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abu al-Walid Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu)

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr Hamid Abu)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	: <i>subhanahu wa ta'ala</i>
saw.	: <i>sallallahu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	: <i>'alaihi al-salam</i>
H	: Hijrah
M	: Maschi
SM	: Sebelum Maschi
l.	: Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	: Wafat tahun
QS .../...: 4	: QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali 'Imran 3: 4
HR	: Hadis Riwayat.
NKRI	: Negara Kesatuan Republik Indonesia
RI	: Republik Indonesia
SULSEL	: Sulawesi Selatan
TIK	: Teknologi Informasi dan Komunikasi
APS	: Alternatif Penyelesaian Sengketa

IPTEK	: Ilmu Pengetahuan & Teknologi
ATM	: Anjungan Tunai Mandiri
KUHAP	: Kitab Undang-undang Hukum Pidana
HIR	: Herziene Indlandsch Reglement
RBg	: Rechreglement Buitengewesten
WvK	: Wetboek van Koophandel
Rv	: Reglement op de rechtvordering
KUH Perdata	: Kitab Undang-undang Hukum Perdata
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
MARI	: Mahkamah Agung Republik Indonesia
KUHP	: Kitab Undag-undang Hukum Pidana
E-commerce	: Electronic Commerce
ITE	: Informasi dan Transaksi Elektronik
KDE	: Kontrak dagang Elektronik
OECD	: Organization for Economic Cooperation and Development
WWW	: World Wide Web
B to B	: Business to Business
B to C	: Business to Customer
CD ROM	: Compact Disc Read Only Memory
WORM	: Write On Read Many
UNCITRAL	: United Nation Commission on International Trade
SEMA	: Surat Edaran Mahkamah Agung

ABSTRAK

Nama : Andi Arwin
NIM : 80101214001
Judul : **Penilaian Hakim Tentang Alat Bukti Elektronik Dalam Proses
Pembuktian Perkara Perdata Di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar**

Perkembangan penggunaan media elektronik dengan menggunakan internet telah mempengaruhi aspek kebutuhan dan perilaku manusia. Kehadiran internet yang tidak mengenal batas dan tanpa sekat (*border less*) telah meluluhlantakkan batas-batas wilayah secara geografis, baik dalam skala nasional dan internasional. Aspek pergaulan manusia secara global memungkinkan terjadinya beragam transaksi yang terjadi setiap hari, agar permasalahan yang dibahas lebih fokus, maka dirumuskan submasalah sebagai berikut yaitu 1.) Bagaimana ruang lingkup alat bukti elektronik dalam proses pembuktian perkara perdata menurut hakim pengadilan Agama kelas 1A Makassar?, 2.) Bagaimana kedudukan (eksistensi) alat bukti elektronik dalam sistem pembuktian perkara perdata di Pengadilan?, 3.) Bagaimana nilai kekuatan alat bukti elektronik dalam sistem pembuktian perkara perdata di Pengadilan?

Tujuan penelitian ini adalah untuk: 1.) mengetahui ruang lingkup alat bukti elektronik dalam proses pembuktian perkara perdata di pengadilan. 2.) mengetahui kedudukan alat bukti elektronik dalam proses pembuktian perkara. 3.) mengetahui kekuatan pembuktian suatu alat bukti elektronik dalam proses pembuktian perkara perdata di pengadilan.

Dalam menjawab permasalahan tersebut, pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan teologis normatif, yuridis yang melihat objek kajian dari sudut pandang aturan perundang-undangan. Penelitian ini adalah penelitian deksriptif analitis lapangan (*field reseach*), yang mana penulis melakukan observasi, dekumentasi, wawancara, penelitian deskriptif ini bertujuan untuk memberikan gambaran sistematis, cermat, dan akurat mengenai fakta-fakta, keadaan yang ada hubungannya dengan variabel-variabel yang diteliti.

Setelah diadakan penelitian di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar terhadap beberapa ulasan permasalahan, maka penulis menyimpulkan; kedudukan alat bukti elektronik secara sah dan tegas diakui sebagai alat bukti yang sah dipergunakan dalam praktik persidangan di pengadilan, sebagai perluasan alat bukti dalam hukum acara yang berlaku di Indonesia, kekuatan pembuktian alat bukti elektronik dipersamakan dengan dokumen yang di buat di atas kertas.

ABSTRACT

Name : Andi Arwin
Student's Reg. No. : 80100214001
Title : The Judge's Assessment of the Electronic Evidence in the Civil Case Verification Process at Class 1A Religious Court Makassar

The development of the use of electronic media by using the internet had influenced the aspects of needs and human behavior. The presence of the internet with no boundaries and no border (border less) had destroyed the boundaries of geographic regions, both nationally and internationally. Aspects of the global human interaction allowed for a variety of transactions taking place every day. In order to better focus to the issues discussed, the subproblems were formulated as follows: 1) How was the scope of electronic evidence in the process of proving the civil case by the trial judge at Class 1A Religious Court Makassar?, 2) How was the existence of electronic evidence in the civil case proving system at the court?, 3) How would you rate the strength of electronic evidence in the civil case proving system at the court?

The study aimed to: 1) determine the scope of electronic evidence in the process of proving the civil case at the court, 2) reveal the position of electronic evidence in the process of proving the case, 3) identify the strength of evidence of an electronic evidence in the process of proving the civil case at the court.

In answering these problems, the study employed the normative theological approach, juridical view the study object was from the standpoint of the rules of law. The research was a descriptive field research, where the researcher did observation, documentation, and interview. It was aimed at providing a systematic, thorough, and accurate overview concerning with the facts and circumstances related to the examined variables.

The study revealed that the electronic evidence was legally and expressly recognized as valid evidence used in the practice of the court preceding, as the expansion of evidence in the procedural law applicable in Indonesia, the strength of electronic evidence was equated with the paper documents.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan tata kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia dewasa ini mengalami dinamika yang mengagumkan. Semangat perubahan ini terjadi sebagai bentuk kesadaran anak bangsa untuk mencapai sebuah negara, bangsa yang bermatahat dalam penyelenggaraan dan pengelolaan kehidupan bernegara yang demokratis dan berkeadilan yang sesuai dengan aturan atau norma-norma hukum yang berlaku di Indonesia. Hukum merupakan suatu pencerminan dari kesadaran masyarakat, sehingga hukum itu tidak dapat dilepaskan dari sifat bangsa. Hukum tumbuh dan timbul dari kesadaran hukum masyarakat (*von savigny*). Hukum juga berguna untuk menyalurkan kehendak masyarakat menuju realisasi cita-cita masyarakat. Oleh sebab itu hukum berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat dan sebaliknya masyarakat pula berpengaruh terhadap hukum, hukum merupakan lembaga sosial untuk memuaskan kebutuhan-kebutuhan masyarakat, yakni tuntutan-tuntutan, permintaan-permintaan dan pengharapan-pengharapan yang terlihat dalam kehidupan masyarakat yang beradab.

Kehadiran hukum di tengah masyarakat merupakan sebuah kebutuhan mutlak, karena dalam mengatur perilaku antara manusia dengan manusia lainnya, diperlukan aturan yang bersifat mengikat bagi masyarakat. Keadaan ini tidak dapat dilepaskan bahwa sebuah tatanan masyarakat, yang terdiri dari kumpulan individu,

etnis, dan golongan, tidak lepas dari berbagai kepentingan individu yang akan bersinggungan dengan kepentingan individu yang lain. Peranan dari sebuah pranata (hukum) di tengah masyarakat, secara mutlak harus mengakomodasi beragam kepentingan yang terjadi. Pranata (hukum) tidak boleh mengabaikan kepentingan umum atas nama kepentingan pribadi, begitu pula sebaliknya, hukum tidak boleh mencaplok hak-hak perorangan atas nama kepentingan umum. Kehadiran hukum di tengah masyarakat harus tampil sebagai pengayom masyarakat secara keseluruhan.

Kedudukan sebuah pranata (aturan) di tengah masyarakat, menyebabkan adanya kewajiban bagi manusia, baik sebagai individu maupun sebagai anggota kelompok, untuk menaati sebuah pranata (aturan) yang berlaku. Keberlakuan hukum di tengah masyarakat tidak boleh berlaku bagi segelintir individu, kelompok, dan atau golongan tertentu. Kondisi seperti ini, akan menimbulkan suasana penistaan terhadap hukum, dimana hukum hanya berada dalam tataran teks (*law in books*) tetapi, tidak dapat menjangkau ranah pengaplikasian (*law in action*). Sengketa yang terjadi di tengah masyarakat, memerlukan seperangkat kaidah aturan untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Proses penyelesaian sengketa yang ditempuh untuk meredam konflik dan menyelesaikan perselisihan, secara garis besar dapat dibagi dalam dua kategori, yakni proses litigasi dan non litigasi. Penyelesaian

sengketa secara litigasi mengatur tata cara dan perangkat tertentu untuk menyelesaikan sengketa.¹

Penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan wadah dari institusi negara, untuk menyelesaikan perselisihan sengketa yang terjadi melalui lembaga pengadilan. Eksistensi proses penyelesaian sengketa melalui lembaga pengadilan, tidak dapat dilepaskan dari ketentuan pokok hukum acara. Kehadiran hukum acara dalam proses penyelesaian sengketa secara litigasi di pengadilan, merupakan kumpulan aturan yang mengatur tata cara menegakkan hukum materil. Dengan demikian, proses penegakan hukum melalui lembaga pengadilan harus sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Kekuatan mengikat dari ketentuan pokok hukum acara, berlaku terhadap lembaga dan aparat penegak hukum, yang dalam bertindak dan mengadili, serta memutus suatu perkara, tidak boleh menyalahi dari ketentuan pokok hukum acara. Pengabaian terhadap eksistensi atau kedudukan hukum acara, terutama adanya pelanggaran terhadap asas hukum acara dapat mengakibatkan putusan yang dibuat serta, dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum, menjadi “batal demi hukum”.

Penyelesaian perselisihan sengketa melalui tahapan non-litigasi, adalah tahapan penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Dalam tahapan ini, penyelesaian sengketa lebih diarahkan kepada perdamaian di antara para pihak. Adapun latar belakang munculnya penyelesaian sengketa non-litigasi adalah ketika negara melalui

¹Rahmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan* (Cet. II; PT. Citra Aditya Bakti), 2013, h. 5.

institusinya (pengadilan) dianggap tidak mampu untuk menyelesaikan sengketa. Lahirnya putusan pengadilan yang menyatakan pihak yang kalah dan menang, kemudian ditindaklanjuti dengan pelaksanaan putusan pengadilan (eksekusi) justru, telah memicu timbulnya konflik baru. Pelaksanaan putusan pengadilan (eksekusi) sering diwarnai kericuhan bahkan pertumpahan darah oleh pihak-pihak yang tidak puas dengan putusan tersebut.

Keadaan seperti ini, mengakibatkan putusan pengadilan dianggap tidak responsif (*unresponsive*), lambat, dan tidak menyelesaikan masalah. Kehadiran Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) telah memberikan legitimasi terhadap kedudukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan, meskipun penyelesaian sengketa secara arbitrase berlaku ketentuan yang sifatnya formalistik, dan sebagian besar memiliki kemiripan dengan proses litigasi melalui pengadilan.

Proses penyelesaian sengketa yang paling krusial dalam tahapan penyelesaian sengketa secara litigasi adalah masalah pembuktian. Oleh karena itu, esensi dari pembuktian sangat penting, karena hal ini akan bermuara kepada benar tidaknya dalil-dalil yang disangkakan, dan terungkapnya fakta hukum di persidangan, yang akan dikukuhkan dengan putusan pengadilan yang menyatakan pihak yang kalah dan pihak yang menang dalam suatu perkara. Banyak riwayat, cerita, ataupun sejarah hukum yang menunjukkan kepada kita betapa karena salah dalam menilai

pembuktian², maka pihak yang sebenarnya tidak bersalah harus meringkuk di dalam penjara akibat ulah karena saksi berbohong. Begitu pula sebaliknya, pihak yang telah nyata-nyata melakukan kejahatan diputus bebas oleh pengadilan karena salah menilai, dalam hal alat bukti tidak cukup.

Hukum pembuktian (*law of evidance*) dalam perkara merupakan bagian yang sangat kompleks dalam proses litigasi. Keadaan kompleksitasnya makin rumit, karena pembuktian berkaitan dengan kemampuan merekonstruksi kejadian atau peristiwa masa lalu (*past event*) sebagai suatu kebenaran (*truth*). Meskipun kebenaran yang dicari dan diwujudkan dalam proses pradilan perdata, bukan kebenaran yang bersifat absolut (*ultimate truth*), tetapi bersifat kebenaran relatif atau bahkan cukup bersifat kemungkinan (*probable*) namun untuk mencari kebenaran yang demikian pun, tetap menghadapi kesulitan.³

Ajaran Islam memberikan suatu isyarat penting mengenai kedudukan pembuktian yang sangat urgen dalam mengatur lalu lintas hubungan keperdataan di antara manusia. Hal ini dapat dilihat dalam Al-qurān QS. al-Baqarah/ 2: 282.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ

²Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian: Pidana dan Perdata* (Cet. I; Bandung: PT. Citra Aditya Bakti), 2012. h. 1.

³Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (Cet. VI; Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 496.

وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٤٦﴾

Terjemahnya;

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, Dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (diantaramu). Jika tidak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil, dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu

kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah mengajarmu, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.⁴

Laju perkembangan masyarakat yang semakin dinamis serta, pengaruh globalisasi yang disokong oleh kemajuan Ilmu Pengetahuan & Teknologi disatu sisi, telah mempengaruhi dan mengubah pola pikir dan cara pandang hidup manusia. Sistem transaksi komersial telah berubah dari sistem yang sifatnya masih sederhana (konvensional), berubah menjadi sistem transaksi elektronik dan digital. Keadaan tersebut harus diakomodasi dalam aturan perundang-undangan sebab, hukum harus menyesuaikan dan berjalan beriringan dengan laju dan perkembangan masyarakat.

Terkait dengan pandangan perubahan terhadap hukum, para ahli hukum sepakat bahwa hukum harus dinamis, tidak boleh statis dan harus tetap mengayomi masyarakat.⁵ Ada dua pandangan yang sangat dominan terkait dengan perubahan hukum dalam kehidupan masyarakat, yakni pandangan tradisional dan modern.⁶ Pandangan tradisional menyatakan bahwa masyarakat perlu berubah terlebih dahulu, kemudian hukum datang untuk mengaturnya. Menurut pandangan ini, hukum hanyalah sebagai pembeda atas perubahan yang terjadi di dalam masyarakat.⁷ Sementara itu, pandangan modern menyatakan bahwa hukum diusahakan agar dapat

⁴Departemen Agama RI, *Al-qurān dan Terjemahnya* (Jakarta: Sygma, 2007), h. 37.

⁵Manan, *Aspek-aspek Pengubah Hukum*. (Cet. III; Jakarta: Kencana, 2009), h. 6.

⁶Manan, *Aspek-aspek Pengubah Hukum*, h. 7.

⁷Abdul Manan, *Aspek-aspek Pengubah Hukum*, h. 7.

menampung segala perkembangan yang baru, oleh karena itu, hukum harus selalu bersamaan muncul dengan adanya perubahan dan peristiwa yang terjadi.⁸

Abad ke-21 ditandai dengan adanya keterbukaan dan kebebasan dalam berbagai bidang kehidupan. Dalam tahapan ini, manusia berinteraksi dengan manusia lain seolah-olah tanpa adanya sekat pemisah. Hal ini disebabkan karena, kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) yang berdampak pada budaya lokal dan pasar global. Transaksi penjualan dan pembelian saat ini tidak jarang dilakukan secara *on line*⁹, sehingga bukti-bukti transaksi akan berbentuk data digital dan dapat dicetak dalam bentuk transkrip tertentu. Transkrip elektronik dapat dijadikan pegangan oleh para pihak, jika dikemudian hari terjadi sengketa di antara mereka. Terkait dengan transkrip data elektronik tersebut, apakah dapat dijadikan sebagai alat bukti di persidangan sementara instrumen pengaturannya belum cukup.

Fenomena seperti yang telah disebutkan di atas, dalam ranah hukum perdata berlaku sebuah ketentuan bahwa kebenaran yang ingin dicapai dalam ranah hukum perdata adalah kebenaran formil, sementara dalam ranah hukum pidana kebenaran yang ingin dicapai adalah kebenaran materil. Ketentuan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kebenaran hukum perdata adalah kebenaran berdasar undang-undang. Dengan demikian, ketentuan dalam hukum acara yang mengatur mengenai pembuktian harus sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh undang-undang. Namun,

⁸Abdul Manan, *Aspek-aspek Pengubah Hukum*, h. 8.

⁹M. Natsir Asnawi, *Hukum Pembuktian Perkara Perdata di Pengadilan: Kajian Kontekstual mengenai Sistem, Asas, Prinsip, Pembebanan, dan Standar Pembuktian*. (Cet. I; Yogyakarta : UII Press, 2013), h. 6.

bagaimana halnya, jika undang-undang belum mengakomodasi bentuk alat bukti elektronik padahal dalam penerapannya, hubungan keperdataan seperti transaksi jual beli telah dilakukan dengan transkrip elektronik, apakah terhadap ketentuan kebenaran formil yang ingin dicari dalam ranah hukum perdata melalui *closed logical system* tidak dapat diperlentur dalam penerapannya. Kemudian, apakah dengan adanya peraturan dan perluasan terhadap hukum acara telah mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Hakim merupakan pilar utama dan tempat terakhir bagi pencari keadilan dalam proses peradilan. Sebagai salah satu element kekuasaan kehakiman yang menerima, memeriksa dan memutus perkara, hakim dituntut untuk memberikan keadilan kepada para pencari keadilan.¹⁰

Tugas hakim adalah menerima, memeriksa, mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dan hakim berkewajiban membantu pencari keadilan serta berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana cepat dan biaya ringan oleh karena itu diperlukan keaktifan hakim untuk mewujudkan hal-hal tersebut.

Hakim sebagai subsistem peradilan merupakan pelaku inti yang secara fungsional melaksanakan kekuasaan kehakiman, karena hakikatnya kekuasaan

¹⁰Wildan Suyuthi Mustafa, *Kode Etik Hakim*, (Cet. I; Jakarta: Kencana Pramedia Group, 2013), h.55. di kutip dalam buku Mujahid A. Latief, *Kebijakan Reformasi Hukum: suatu rekomendasi* (jilid III), Jakarta; Komisi Hukum Nasional RI, 2007. H. 283.

kehakiman memiliki pilar yang terdiri dari badan peradilan yang ditegakkan berdasarkan undang-undang, aparat yang terdiri dari hakim, panitera, jurusita, dan tenaga non hakim lainnya serta sarana hukum baik hukum materil maupun hukum formil (acara). Dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman itu, hakim harus memahami ruang lingkup tugas dan kewajibannya, selanjutnya hakim harus berupaya secara proporsional dalam menjalankan dan menyelesaikan pekerjaannya.¹¹

Hakim adalah salah satu element dasar dalam sistem peradilan selain jaksa dan penyidik (kejaksaan dan kepolisian), sebagai subjek yang melakukan tindakan putusan atas suatu perkara di dalam pengadilan. Hakim yang merupakan personifikasi atas hukum harus menjamin rasa keadilan bagi setiap orang yang mencari keadilan melalui proses hukum legal dan menjamin rasa keadilan itu maka seorang hakim dibatasi oleh rambu-rambu seperti: Akuntabilitas, integritas, moral dan etika, transparansi dan pengawasan. Dalam hubungan dengan tugas sebagai hakim, maka independensi hakim masih harus dilengkapi lagi dengan sikap imparsialitas dan profesionalisme dalam bidang hukum. Seorang hakim di dalam mengembangkan tugasnya harus mendapatkan sebagai penegak hukum untuk bebas dari pengaruh-pengaruh dan directiva yang berasal dari:

- a. Lembaga-lembaga di luar badan peradilan baik eksekutif maupun legislatif dan lain-lain.

¹¹Wildan Suyuthi Mustafa, *Kode Etik Hakim*, (Cet. I; Jakarta: Kencana Pramedia Group, 2013), h. 67.

- b. Lembaga-lembaga internal di dalam jajaran kekuasaan kehakiman sendiri.
- c. Pengaruh-pengaruh pihak yang berperkara.
- d. Pengaruh tekanan-tekanan masyarakat, baik nasional maupun internasional.
- e. Pengaruh-pengaruh yang bersifat “*trial by the press*”.¹²

Lazimnya perlindungan tersebut dikaitkan dengan larangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang bersifat “*contempt of court*” atau pelecehan, penghinaan terhadap peradilan.

Dalam hal ini adalah menjadi tanggung jawab oleh hakim untuk memberi keputusan yang berkualitas kepada pencari keadilan. Pasal 53 UU No. 48 Tahun 2009, dan kemudian dalam pasal 5 Ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009, berikut penjelasannya dinyatakan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Berdasarkan ketentuan ketentuan tersebut maka secara yuridis hakim wajib memberi putusan yang berkualitas (ideal) dan dapat dipertanggung jawabkan.

Putusan Hakim akan terasa begitu dihargai dan mempunyai nilai kewibawaan jika putusan tersebut dapat merefleksikan rasa keadilan hukum masyarakat, dan juga merupakan sarana bagi masyarakat pencari keadilan untuk mendapatkan kebenaran

¹²Ahmad kamil, *Fisafat kebebasan hakim*. (Cet.I; Jakarta: Kencana, 2012) h. 167.

dan keadilan. Sebelum seorang hakim memutus suatu perkara maka ia menyatakan kepada hati nuraninya sendiri apakah putusan ini nantinya akan adil dan bermfaat (kemaslahatan) bagi manusia atau sebaliknya, akan banyak membawa kemudratan, sehingga untuk itulah diharapkan seorang hakim mempunyai otak yang cerdas dan disertai dengan hati nurani yang bersih.¹³

B. Fokus Penelitian & Deskripsi Fokus

1. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada permasalahan tentang Penilaian Hakim Tentang Alat Bukti Elektronik Dalam Proses Pembuktian Perkara Perdata Di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar. Adapun ruang lingkup penelitian ini mencakup hal-hal sebagai berikut:

No.	Fokus Penelitian	Deskripsi Fokus
1	Hakim	<ul style="list-style-type: none"> - Pengertian Hakim - Pengertian Syarat, Tugas, dan wewenang Hakim
2	Alat Bukti Elektronik	<ul style="list-style-type: none"> - Pengertian Alat Bukti Elektronik - Contoh Alat Bukti Elektronik

¹³Wildan Suyuthi Mustafa, *Kode Etik Hakim*, (Cet. I; Jakarta: Kencana Pramedia Group, 2013), h. 75.

2. Deskripsi Fokus

Penelitian ini berjudul “Penilaian Hakim Tentang Alat Bukti Elektronik Dalam Proses Pembuktian Perkara Perdata Di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar”. Untuk memperjelas arah penelitian ini, maka perlu dikemukakan beberapa istilah yang terdapat dalam judul di atas, agar tidak terjadi kekeliruan dalam memahami maksud dari penelitian ini. Adapun istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut:

a. Penilaian

Proses, cara, perbuatan menilai pemberian nilai.¹⁴

b. Hakim

Hakim memiliki dua arti. *Pertama*, orang yang mengadili perkara di pengadilan atau mahkamah dan keputusannya tidak dapat diganggu gugat. *Kedua*, hakim adalah orang pandai, budiman, bijak dalam perilaku dan dalam melakukan sesuatu.¹⁵

c. Alat Bukti

Berasal dari dua kata yakni, alat dan bukti. Alat berarti benda yang dipakai untuk mengerjakan sesuatu, perkakas.¹⁶ Sedangkan bukti berarti sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa, keterangan nyata, tanda.¹⁷ Jadi, alat bukti

¹⁴Pusat bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 963.

¹⁵Pusat bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 383.

¹⁶Pusat bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 26.

¹⁷Pusat Bahasa Departemen pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h.172.

berarti benda atau perkakas yang dipakai untuk menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Sementara itu, alat bukti dalam Bahasa Belanda disebut *bewijs* yang berarti tanda bukti.¹⁸

d. Elektronik

Alat yang dibuat berdasarkan prinsip elektronika, hal atau benda yang menggunakan alat-alat yang dibentuk atau bekerja atas elektronika.¹⁹ Adapun pengertian dari elektronik adalah cabang fisika yang mempelajari pemancaran, perilaku, dan dampak elektron serta alat-alat yang menggunakannya.²⁰

e. Proses

Runtutan perubahan (peristiwa) dalam perkembangan sesuatu, rangkaian tindakan, pembuatan, atau pengolahan yang menghasilkan produk, perkara dalam pengadilan.²¹

f. Pembuktian

Proses, cara, perbuatan membuktikan.²²

¹⁸Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum*. (Cet. I; Semarang : Aneka Ilmu, 2008), h. 107.

¹⁹Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 294.

²⁰Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 294.

²¹Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 898.

²²Pusat bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 172.

g. Perkara

Masalah, persoalan, urusan yang perlu diselesaikan atau dibereskan.²³

Sementara perkara dalam Bahasa Belanda disebut *zaak* yang berarti urusan, perkara, masalah, barang (benda).²⁴

h. Perdata

Hukum sipil sebagai lawan kriminal atau pidana.²⁵

i. Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar

Pengadilan mengandung beberapa pengertian yaitu: 1. Dewan atau majelis yang mengadili perkara atau mahkamah; 2. Proses mengadili; 3. Keputusan hakim; 4. Sidang hakim ketika mengadili perkara; 5. Rumah (bangunan) tempat mengadili perkara²⁶. Pengadilan Agama adalah badan peradilan khusus untuk orang yang beragama Islam yang memeriksa dan memutus perkara perdata antara orang-orang yang beragama Islam, dan dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam.

Pasal 49: Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. sadaqah; dan i. ekonomi syari'ah²⁷.

²³Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 861.

²⁴Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum*, h. 615.

²⁵Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 856.

²⁶Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Indonesia*, ed. 3 (Cet. III; Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 8. Lihat pula, Cik Hasan Basri, *Peradilan Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia* (Cet. I; Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1997), h. 35.

²⁷Republik Indonesia, "Undang-Undang RI No. 3 Tahun 2006".

C. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari uraian latar belakang di atas, peneliti memformulasikan rumusan masalah berdasarkan kepada masalah pokok, yakni: *“Bagaimana Penilaian Hakim tentang Alat bukti elektronik dalam proses pembuktian perkara perdata di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar”*. Agar permasalahan yang dibahas lebih fokus, maka dirumuskan submasalah sebagai berikut yaitu:

1. Bagaimana ruang lingkup alat bukti elektronik dalam proses pembuktian perkara perdata menurut hakim pengadilan Agama kelas 1A Makassar ?
2. Bagaimana kedudukan (eksistensi) alat bukti elektronik dalam sistem pembuktian perkara perdata di Pengadilan ?
3. Bagaimana nilai kekuatan alat bukti elektronik dalam sistem pembuktian perkara perdata di Pengadilan ?

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh penulis, baik terhadap hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis sebelumnya maupun terhadap buku-buku yang telah diterbitkan, ditemukan berbagai buku-buku dan hasil penelitian berupa tesis, skripsi dan artikel hukum yang relevan dengan penilaian Hakim tentang alat bukti elektronik dalam proses pembuktian perkara perdata di pengadilan Agama kelas 1A Makassar. Beberapa hasil penelitian yang relevan dengan tesis ini adalah:

1. M. Natsir Asnawi *“Hukum Pembuktian Perkara Perdata di Indonesia: Kajian kontekstual mengenai Sistem, Asas, Prinsip, Pembebanan, dan Standar*

Pembuktian” menyatakan bahwa kehidupan masyarakat yang demikian dinamis menyebabkan terjadinya pergeseran paradigma dan gaya hidup dalam berinteraksi satu sama lain. Digitalisasi data-data transaksi mau tidak mau memaksa kita untuk melakukan perubahan dalam pola pikir serta dalam melakukan transaksi dengan pihak lain. Transaksi penjualan dan pembelian saat ini tidak jarang dilakukan secara online, sehingga bukti-bukti transaksi pun akan berbentuk data digital yang dapat dicetak dalam bentuk transkrip tertentu. Jika terjadi permasalahan dikemudian hari maka, data tersebut menjadi pegangan para pihak untuk menemukan solusi diantara mereka. Tetapi, dalam ranah hukum apakah data-data elektronik tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti.²⁸

2. Yahya Harahap “*Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Putusan Pengadilan*” dalam salah satu bab membahas tentang pembuktian, hukum pembuktian (*law of evidance*) dalam berperkara merupakan bagian yang sangat kompleks dalam proses litigasi. Keadaan kompleksitasnya makin rumit, karena pembuktian berkaitan dengan kemampuan merekonstruksi kejadian atau peristiwa masa lalu (*past event*) sebagai satu kebenaran (*truth*), tetapi bersifat relatif atau bahkan cukup

²⁸M. Natsir Asnawi, *Hukum Pembuktian Perkara Perdata di Pengadilan: Kajian Kontekstual mengenai Sistem, Asas, Prinsip, Pembebanan., dan Standar Pembuktian*. h .8.

bersikap kemungkinan (*probable*), namun untuk mencari kebenaran yang demikian pun, tetap menghadapi kesulitan.²⁹

3. Hj. Efa Laela Fakhriah “*Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Perdata*”

menyebutkan bahwa derasnya penggunaan teknologi informasi dalam kegiatan yang berbasis transaksi elektronik, seperti misalnya layanan ATM (Anjungan Tunai Mandiri), transaksi bisnis melalui *handphone*, *mobile banking*, *internet banking*, *e-commerce*, dan lain-lain ternyata belum diikuti dengan perkembangan hukum yang dapat menyelesaikan permasalahan/sengketa yang terjadi didunia maya, karena hukum positif yang ada belum cukup dapat menjangkaunya.³⁰

4. Munir Fuady “*Teori Hukum Pembuktian: Pidana dan Perdata*” menyebutkan

seiring dengan perkembangan masyarakat dan teknologi, semakin lama manusia semakin banyak menggunakan alat teknologi digital, termasuk dalam berinteraksi antar sesamanya. Oleh karena itu, semakin lama semakin kuat desakan terhadap hukum, termasuk hukum pembuktian untuk menghadapi kenyataan perkembangan masyarakat seperti itu. Sebagai contoh, untuk mengatur sejauh mana kekuatan pembuktian dari suatu tanda

²⁹Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (Cet. VI; Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 496

³⁰Hj. Efa Laela Fakhriah, *Bukti elektronik dalam Sistem Pembuktian Perdata*. (Cet. II; Bandung: Alumni), 2011, h. 5.

tangan digital/elektronik, yang dewasa ini sudah banyak dipergunakan dalam praktik sehari-hari.³¹

5. Djamanat Samosir "*Hukum Acara Perdata: Tahap-tahap Penyelesaian Perkara Perdata*" menyebutkan permasalahan hukum yang seringkali dihadapi adalah ketika terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi, dan atau transaksi secara elektronik, khususnya dalam hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik.³²
6. Abdul Kadir "*Filsafat Kebebasan Hakim*" menyebutkan hakim sebagai unsur inti dalam sistem lembaga kekuasaan kehakiman, dalam menjalankan tugas dan fungsinya wajib menjaga kemandirian peradilan. Karena pada diri hakim melekat hak kebebasan hakim yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar.³³
7. Sudikno Mertokusumo "*Hukum Acara Perdata Indonesia edisi revisi*" menyebutkan dalam era globalisasi dan perkembangan teknologi modern serta munculnya *cyber law* sekarang ini tidak mustahil muncul alat bukti baru yang belum ada pengaturannya.³⁴

³¹Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian: Pidana dan Perdata*. h. 151.

³²Djamanat Samosir, *Hukum Acara Perdata: Tahap-tahap Penyelesaian Perkara Perdata*. (Cet. I; Bandung: Nuansa Aulia, 2011), h. 264.

³³Ahmad kamil, *Fisafat kebebasan hakim*. (Cet.I; Jakarta: Kencana, 2012) h. 5.

³⁴Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indoensia edisi revisi*. (Cet. V. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2013), h. 208.

8. H.P. Panggabean “*Hukum Pembuktian: Teori-Praktik dan Yurisprudensi Indonesia*” menyebutkan seiring perkembangannya timbul pula bermacam alat bukti dalam hubungan keperdataan di luar yang telah diatur dalam peraturan acara perdata (HIR/RBg) yaitu: foto dan hasil rekaman, hasil *print out* dari mesin faximili, microfilm, e-mail/surat elektronik, video teleconference, tanda tangan elektronik.³⁵
9. Wildan Suyuthi Mustofa “*Kode Etik Hakim*” menyatakan bahwa Hakim merupakan pilar utama dan tempat terakhir bagi pencari keadilan dalam proses peradilan. Sebagai salah satu element kekuasaan kehakiman yang menerima, memeriksa dan memutus perkara, hakim dituntut untuk memberikan keadilan kepada para pencari keadilan.³⁶
10. Achmad Ali dan Wiwi Heryani “*Asas-asas Hukum Pembuktian Perdata oleh Achmad Ali dan Wiwie Heryani*” menyebutkan sudah seyogyanya dipikirkan mengenai alat bukti baru yang kini muncul dalam lalu lintas keperdataan modern, sejauh mana daya pembuktiannya dalam hukum perdata modern dewasa ini. Alat-alat bukti yang baru mucul tersebut seperti, pembicaraan

³⁵H.P. Panggabean, *Hukum Pembuktian: Teori-Praktik dan Yurisprudensi Indonesia*.(Cet.II; Bandung: Alumni), 2014, h. 164-165.

³⁶Wildan Suyuthi Mustafa, *Kode Etik Hakim*, (Cet. I; Jakarta: Kencana Pramedia Group, 2013), h. 55.

telepon, testing darah, hasil komputer, fotocopy, rekaman kaset, hasil fotografi, dan sebagainya.³⁷

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dari latar belakang dan rumusan masalah yang telah penulis uraian, maka secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penilaian Hakim tentang alat bukti elektronik dalam proses pembuktian perkara perdata di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar. Secara khusus, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mendeskripsikan penilaian Hakim tentang alat bukti elektronik dalam proses pembuktian perkara perdata di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar.
- b. Untuk mengetahui kedudukan (eksistensi) alat bukti elektronik dalam sistem pembuktian perkara perdata di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar.
- c. Untuk mengetahui kekuatan alat bukti elektronik dalam sistem pembuktian perkara perdata di Pengadilan.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi beberapa pihak, antaranya:

- a. Diharapkan dapat memberi kontribusi pemikiran dalam nuansa yang bersifat ilmiah terhadap perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam masalah

³⁷ Achmad Ali dan Wiwic Heryani, *Asas-asas Hukum Pembuktian Perdata* (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2013), h. 78.

kedudukan dan kekuatan alat bukti elektronik di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan pemikiran bagi para peneliti yang ingin meneliti lebih lanjut pokok permasalahan yang diteliti.
- c. Tesis ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan.



BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. PENGERTIAN HAKIM

1. Defenisi Hakim

Proses interaksi di antara manusia telah berlangsung cukup lama hingga saat ini, sejak manusia telah mengenal kehidupan secara berkelompok. Perkataan Aristoteles, seorang ahli filsafat Yunani yang menyatakan manusia sebagai *zoon politicon* yang artinya manusia itu selalu hidup bersama, sejak lahir hingga saat meninggal dunia, dan manusia senantiasa berada dalam pergaulan dengan yang lainnya³⁸. Konsekuensi dari pernyataan Aristoteles tersebut mengandung arti bahwa dalam hidupnya manusia senantiasa membutuhkan bantuan dari manusia yang lain, dalam rangka pertumbuhan, perkembangan, dan kemajuan hidupnya serta, dalam hal pemenuhan hasrat biologisnya.

Telah menjadi suatu adagium bahwa manusia di dalam hidupnya memiliki sifat (perangai) masing-masing antar individu yang senantiasa terwujud dalam perilaku yang berbeda, dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidupnya sehingga, kehendak untuk hidup sebebas-bebasnya tanpa dikendalikan oleh pranata tertentu akan dijumpai situasi yang tidak terkendali (*chaos*). Hal ini sesuai dengan ungkapan *Homo homini lupus* yang dikemukakan oleh Thomas Hobbes, bahwa manusia dapat

³⁸Rien G. Kartasapoetra, *Pengantar Ilmu Hukum Lengkap* (Cet. I; Jakarta; Bina Aksara, 1986), h. 1.

menjadi serigala atas manusia lainnya. Munculnya pertikaian atau pertentangan (*conflict*) dalam lalu lintas pergaulan hidup manusia tidak dapat dilepaskan dari proses interaksi yang berlangsung di antara manusia itu sendiri. Hasrat dalam pemenuhan kebutuhan hidup manusia telah diatur sedemikian rupa oleh berbagai macam pranata yang muncul sebagai akibat dan proses dalam pergaulan manusia sejak manusia telah mengenal kehidupan secara berkelompok memegang peranan yang sangat penting dalam mengatur lalu lintas perbuatan dan pergaulan manusia³⁹.

Proses penyelesaian sengketa yang muncul dalam kehidupan masyarakat, pada hakikatnya dapat diselesaikan dalam wadah yang bersifat formal-prosedural (litigasi) yang berarti negara melalui institusi hukumnya secara aktif turut berperan dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi. Penanganan sengketa yang dilakukan oleh negara selanjutnya disebut sebagai kekuasaan yudikatif atau kekuasaan pelaksana kehakiman. Selain itu, terdapat proses penyelesaian sengketa secara tradisional (lebih bersifat kolegial) yang kini mulai dilirik dan dikembangkan oleh insitusi pengadilan guna meminimalisir segala bentuk kerugian yang terjadi. Hal ini dapat dilihat dengan diundangkannya Undang-undang RI Nomor 30 Tahun 1999 tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) dan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2008 (Perma) tentang Mediasi di Pengadilan. Terdapat perbedaan yang cukup mendasar mengenai kedua proses penyelesaian

³⁹Munculnya kaidah (norma) dalam masyarakat berasal dari proses interaksi manusia yang berlangsung secara turun temurun (tradisional) maupun diadakan oleh mereka yang mengatur masyarakat.

sengketa tersebut di atas, karakteristik utama yang melekat melalui proses penyelesaian sengketa secara litigasi adalah terdapat pihak yang kalah dan yang dinyatakan menang dalam suatu perkara, sementara proses penyelesaian sengketa secara non litigasi lebih mengupayakan ke arah terjadinya perdamaian di antara para pihak (*win win solution*).

Keadaan seperti ini, tidak boleh dimaknai bahwa keberadaan (eksistensi) lembaga peradilan bagi suatu negara dapat dikesampingkan. Kedudukan lembaga peradilan bagi suatu negara sangat penting adanya karena, lembaga inilah yang bertindak untuk menyelesaikan segala sengketa yang terjadi dalam kehidupan masyarakat dan menghukum orang-orang yang melanggar hukum sesuai dengan hukum yang telah ditentukan⁴⁰. Suatu negara yang tidak mementingkan lembaga peradilan berada, atau mengecilkan peranannya, maka negara tersebut akan mengalami kesulitan dalam menjalankan roda pemerintahannya. Pergaulan hidup masyarakat akan mengalami kekacauan dan tidak menentu, tidak ada keadilan dan kepastian hukum, ketertiban dan kedamaian tidak akan terwujud⁴¹.

Hakim merupakan unsur utama dalam pengadilan. Menurut Cik Hasan Bisri, hakim diidentikkan dengan pengadilan itu sendiri, hal ini dapat dimaknai demikian

⁴⁰ Abdul Manan, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan: Suatu Kajian dalam Sistem Peradilan Islam* (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2010), h. 1.

⁴¹ Abdul Manan, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan: Suatu Kajian dalam Sistem Peradilan Islam*, h. 1.

karena, keputusan pengadilan diidentikkan dengan keputusan hakim⁴². Oleh karena itu, lebih lanjut diterangkan Cik Hasan Bisri bahwa pencapaian penegakan hukum dan keadilan terletak pada kemampuan dan kearifan hakim dalam merumuskan keputusan yang mencerminkan keadilan⁴³. Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Muhammad Natsir Asnawi, yang menyatakan putusan merupakan produk peradilan yang pertama dan utama karena merupakan jawaban akhir dari suatu persengketaan yang diajukan oleh para pihak serta hasil dari proses yang telah dijalankan⁴⁴. Berdasarkan uraian pendapat yang telah dikemukakan di atas, penulis berpendapat bahwa “hakim” merupakan unsur yang sangat esensial dan bersifat sangat substansial di dalam pelaksanaan lembaga kekuasaan kehakiman.

Hakim berasal dari akar kata **حكم - يحكم - حاكم** dimana hal ini diartikan sama dengan **قاضي - يقضي - قاض** yang artinya memutus⁴⁵. Sedangkan menurut syarā’ hakim adalah orang yang diangkat oleh Kepala Negara untuk memutus dan menyelesaikan perselisihan-perselisihan di antara masyarakat karena, penguasa sendiri tidak dapat menyelesaikan tugas peradilan. Penulis sependapat mengenai definisi hakim menurut syarā’ karena hal ini dapat ditelusuri ketika agama Islam

⁴²Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia edisi revisi* (Cet. IV; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 193.

⁴³Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia edisi revisi*, h. 193-194.

⁴⁴Muhammad Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim: Pendekatan Multidisipliner dalam Memahami Putusan Peradilan Perdata* (Cet. I; Yogyakarta: UII Press, 2014), h. 4.

⁴⁵Muhammad Salam Madkur, *Peradilan Dalam islam*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu 1993). hlm. 29.

menyebar di semenanjung jazirāh Arab, Nabi Muhammad saw mengangkat beberapa *qadi* untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi di tengah masyarakat.

Hakim dalam bahasa Belanda disebut “*rechter*” yang berarti hakim dan dalam bahasa Inggris disebut “*judge*”

2. Syarat Pengangkatan Hakim

Peranan penting dari seorang hakim dalam menyelesaikan dan memutus sengketa yang terjadi di tengah masyarakat dan diajukan kepadanya, membawa konsekwensi logis bahwa tidak serta merta seorang hakim bisa dijabat oleh semua orang. Penekanan ini berimplikasi kepada suatu pemahaman adanya patokan (*standart*) tertentu dimana kemampuan seorang hakim harus memenuhi standar tersebut. Objek sengketa yang terjadi di tengah masyarakat memerlukan pendekatan yang cukup komprehensif dalam menyelesaikan segala permasalahan yang terjadi.

Ungkapan *la bouche de laloi* yang berarti bahwa hakim adalah terompet undang-undang, kini dirasa perlu dikoreksi bahkan sebagian kalangan yang bersifat progresif revolutioner menyatakan pandangan ini sudah seharusnya ditinggalkan. Penanganan dalam penyelesaian permasalahan sengketa yang terjadi, dimasa era positivistik dianggap tidak memenuhi dan tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. Hakim dewasa ini, tidak hanya dituntut untuk memahami dan merumuskan suatu permasalahan hanya dengan memperhatikan aspek normatif hukum saja, melainkan dituntut untuk lebih peka dan melihat secara empiris kenyataan yang terjadi.

Kondisi demikian, penulis mengutip contoh yang dikemukakan oleh Achmad

Ali dalam melihat hukum perspektif empiris;

Ketika seorang hakim harus mengadili tiga orang pencuri ayam, dengan tiga kasus yang berbeda, yaitu korbannya berbeda dan waktu serta lokasi yang pencuriannya pun berbeda, maka dikatakan secara normatif peraturan hukumnya persis sama, yaitu semuanya harus mengacu pada ketentuan pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur pidananya terdiri dari: "setiap orang yang mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk menguasai dan dengan cara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah".

Penerapan pasal 362 KUH Pidana tersebut secara sosiologis tidak mungkin sama. Misalnya fakta yang terungkap di persidangan pengadilan;

- a. Pencuri pertama, mencuri ayam dengan motif untuk menebus resep anaknya yang sedang sakit keras, yang jika resep itu tidak tertebus, anaknya kemungkinan besar akan meninggal dunia.
- b. Pencuri kedua, mencuri ayam dengan motif untuk memperoleh uang bermalam minggu dengan pacarnya.
- c. Pencuri ketiga, mencuri ayam dengan motif untuk membeli narkoba.

Jelas seorang hakim yang baik, tidak mungkin menjatuhkan vonis yang sama persis kepada ketiga pencuri ayam itu. Kemungkinan hakim akan menjatuhkan maksimal ancaman pidana untuk pencurian terhadap pencuri ketiga yang mencuri karena mau membeli narkoba, dengan pidana sedang untuk pencuri yang mencuri untuk memperoleh uang membawa pacarnya bermalam minggu; dan mungkin menjatuhkan pidana percobaan saja kepada pencuri pertama yang mencuri karena terpaksa demi menebus resep anaknya yang sakit keras⁴⁶.

Penulis sengaja mengutip sebuah contoh mengenai perlunya bagi seorang hakim untuk memutus suatu sengketa sesuai dengan rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat. Suatu adagium yang dikenal dalam literatur ilmu hukum adalah putusan hakim merupakan mahkota dari hakim itu sendiri. Hal ini dikarenakan

⁴⁶Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial prudence): Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legis prudence)* (Cet. III; Jakarta: Kencana, 2010), h. 1.

putusan mencerminkan aspek penalaran, pengetahuan, dan kompetensi hakim itu sendiri, sehingga dengan adanya putusan maka secara langsung martabat dan harga diri seorang hakim dipertaruhkan kepada masyarakat, para pihak yang bersengketa, ilmuwan hukum dan sosial, serta pengadilan yang lebih tinggi di atasnya, dan pertanggung jawaban kepada Tuhan Yang Maha Esa (YME), mengingat putusan hakim akan dirasakan dan berdampak langsung kepada masyarakat (terutama kepada para pihak), ilmuwan yang senantiasa mengkaji dan mengkritisi putusan hakim tersebut, dan pengadilan tinggi yang berada di atasnya, yang berhak membatalkan putusan pengadilan yang lebih rendah apabila dianggap terdapat kekeliruan.

2.1. Syarat Pengangkatan Hakim dalam Perspektif Agama Islam

Agama Islam (*addinūl Islam*) yang bersendi kepada syariat, yang selanjutnya disebut sebagai syariat Islam memandang persoalan kehakiman sebagai sesuatu yang sangat *urgen*. Pada waktu itu, telah disebutkan peranan Nabi Muhammad saw tidak semata hanya sebagai *nabiullāh* belaka. Posisi Nabi Muhammad, sebagai pembawa ajaran Syariat Islam, justru tampil sebagai pemutus dan menyelesaikan sengketa yang terjadi di tengah ummat Islam kala itu. Ketika Nabi Muhammad saw, memegang kendali pemerintahan sedikit sekali perkara yang diajukan kepadanya dan kebanyakan ummat Islam pada waktu itu hanya meminta fatwa terhadap suatu

persoalan yang dihadapinya, selanjutnya menyelesaikan sendiri perkara yang diberikan oleh Nabi Muammad saw tersebut⁴⁷.

Keadaan ini menarik untuk dicermati, penulis beranggapan bahwa tugas pemimpin (*khalifāh*) dalam Islam, tidak semata-mata hanya berdasar kepada urusan pemerintahan saja, melainkan disatu sisi berperan pula sebagai hakim (*qadī*) dan bertugas memutus dan menyelesaikan sengketa yang terjadi di tengah-tengah ummat Islam. Keadaan ini terus berlanjut sampai pada *khalifāh* Umar bin Khattab memerintah pada tahun 13-23H/634-644M, dimana wilayah kekuasaan Islam telah berkembang luas di luar wilayah Makkah. Secara otomatis, peranan dan tanggung jawab seorang pemimpin (*khalifāh*) semakin besar, dan tidak memungkinkan untuk memutus dan menyelesaikan segala sengketa yang diajukan kepadanya. Persoalan ini, membawa kepada suatu konsekuensi logis bahwa perlu diangkat hakim (*qadī*) di seluruh wilayah yang berada di bawah kekuasaan Islam.

Islam sendiri memandang bahwa profesi dan jabatan hakim (*qadī*) merupakan hal yang substansial dalam kehidupan masyarakat itu sendiri, sehingga perlu diterapkan tolak ukur yang kredibel di dalam memilih dan mengangkat seorang hakim (*qadī*). Seorang hakim (*qadī*) senantiasa dituntut untuk memutus sesuatu dengan benar (sesuai fakta), hal ini dapat dilihat sebagaimana Allah swt, berfirman di dalam Al-qurān Surat QS. Al-Nisā /4: 135:

⁴⁷ Abdul Manan, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Syariat Islam: Suatu Kajian dalam Sistem Peradilan Islam*, h. 3.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ
وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللّٰهُ أُولَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا ۚ وَإِنْ
تَلَوْنَهَا أَوْ تَعْرِضُوهَا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٠٥﴾

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabat. Jika ia kaya atau miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpan dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan⁴⁸.

Kutipan terjemahan ayat Al-qurān di atas, sudah seharusnya kita refleksikan sebagai pedoman di dalam melihat realitas penegakan hukum saat ini. Al-qurān sebagai sumber hukum tertinggi dalam Islam, yang diturunkan puluhan abad yang lalu telah menyinggung betapa pentingnya penegakan hukum yang adil. Al-qurān selanjutnya menyebut dalam Surat QS. Al-Nisā /4: 105:

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ ۚ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِبِينَ
خَصِيمًا ﴿١٠٦﴾

Terjemahnya:

Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang Allah

⁴⁸Departemen Agama RI, *Al-qurān dan Terjemahnya* (Jakarta: Sygma, 2007), h. 89.

wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang orang-orang yang tidak bersalah, karena membela orang-orang yang khianat⁴⁹.

Muara penegakan hukum yang adil dewasa ini, lebih dititikberatkan kepada bagaimana pembentukan sikap dan mental aparat penegak hukum yang lebih bermartabat. Hal ini senantiasa merupakan upaya yang terus-menerus dilakukan untuk menyulut sikap aparat penegak hukum (polisi, jaksa, advokat, hakim) sebagai bagian dari penyelenggara kekuasaan kehakiman yang lebih profesional dan konsekwen. Pembinaan dalam bidang sumber daya aparat penegak hukum, menurut penulis penting untuk dilakukan, sebagaimana pernyataan yang pernah diungkapkan oleh Taverne, *“berilah kepada saya aparat penegak hukum yang baik, niscaya peraturan hukum yang buruk sekalipun akan berubah menjadi baik”*. Hal ini dapat kita simpulkan bahwa, ujung tombak penegakan hukum, sangat tergantung kepada mentalitas aparat penegak hukum itu sendiri. Olehnya itu, perlu diterapkan persyaratan yang cukup kredibel di dalam memilih dan mengangkat seorang hakim (*qaḍī*) serta, perlunya pedoman perilaku bagi diri seorang hakim di dalam bertindak dan bertingkah laku (*adābul qaḍī*).

Mengenai syarat pengangkatan hakim dalam perspektif Islam, penulis akan mengemukakan beberapa kriteria pengangkatan hakim yang dirinci dari berbagai pendapat;

⁴⁹Departemen Agama RI, *Al-qurān dan Terjemahnya* (Jakarta: Sygma, 2007), h. 87.

1) Beragama Islam

Orang yang hendak diangkat sebagai hakim (*qaḍī*) hendaklah orang yang beragama Islam, sebab semua kasus yang diperiksa adalah melibatkan orang Islam. Tugas peradilan dalam Islam termasuk dalam wilayah yang orang kafir tidak boleh dilaksanakan selain orang Islam sendiri⁵⁰. Pendapat ini disandarkan pada sebuah ayat di dalam Al-qurān, QS. Al-Nisa/ 4: 141:

وَلَنْ تَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

Terjemahnya:

Allah sama sekali tidak memberikan jalan kepada orang kafir ke atas orang orang yang beriman⁵¹.

Imam Al-Mawardi menambahkan orang kafir tidak boleh diangkat menjadi hakim untuk kaum Muslimin, bahkan untuk orang-orang kafir sekalipun⁵². Al-Mawardi lebih lanjut menyatakan seorang imam diperbolehkan tidak menerima keputusan hakim (*qaḍī*) kafir tersebut, dan jika orang-orang menolak membawa perkaranya kepada hakim (*qaḍī*) kafir tersebut, mereka tidak boleh dipaksa

⁵⁰ Abdul Manan, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan: Suatu Kajian dalam Sistem Peradilan Islam*, h. 22.

⁵¹ Departemen Agama RI, *Al-qurān dan Terjemahnya* (Jakarta: Sygma, 2007), h. 92.

⁵² Imām Al-Mawardi, *Al-Ahkām As-Sulṭhaniyyāt: Hukum-hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*, penerj. Fadli Bahri (Cet. IV; Jakarta: Dārul Falāh, 2012), h. 123.

membawa perkaranya kepadanya, karena hukum Islam lebih layak diterapkan terhadap mereka⁵³.

Kalangan ahli hukum Islam yang berasal dari madzhab Hanafi membenarkan pengangkatan hakim (*qadī*) non muslim untuk menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi antara orang-orang Islam dengan orang-orang yang bukan Islam. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Ibnu Abidin bahwa diperkenankan untuk melantik hakim (*qadī*) bagi golongan *ḍimmīh*, untuk menyelesaikan persoalan dan kasus-kasus yang mereka hadapi, karena hal ini sama halnya dengan mengangkat orang Islam untuk menjadi hakim (*qadī*) bagi golongan orang-orang yang beragama Islam⁵⁴. Hal ini dipertegas dengan pendapat ahli hukum Islam dari kalangan madzhab Hanafi, bahwa *hujjāh* yang mengharuskan pengangkatan orang bukan Islam sebagai hakim (*qadī*) bagi orang Islam ialah berdasarkan prinsip bahwa orang-orang bukan Islam layak menjadi saksi sesama mereka, maka di antara mereka layak menjadi hakim (*qadī*) diantara sesama mereka sendiri⁵⁵.

Pandangan ulama Hanafiyah yang membolehkan kesaksian seorang kafir *ḍimmī* diantara sesama mereka, apabila mereka adil di dalam agama mereka seperti antara orang Yahudi dengan orang Nasrani didasarkan pada sebuah hadits yang

⁵³Imām Al-Mawardi, *Al-Aḥkām As-Sulṭaniyyāt: Hukum-hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*, penerj. Fadli Bahri, h. 124.

⁵⁴Abdul Manan, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan: Suatu Kajian dalam Sistem Peradilan Islam*, h. 22.

⁵⁵Abdul Manan, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan: Suatu Kajian dalam Sistem Peradilan Islam*, h. 22.

diriwayatkan oleh Ibnu Majāh dari Jabir Ibn Abdullāh⁵⁶ yang berbunyi; *Bahwasanya Nabi membolehkan kesaksian ahl-kitab sebagian mereka atas sebagian yang lain.*

Muhammad Salam Madzkur,⁵⁷ memberikan pendapat yang berlainan terhadap pengangkatan hakim (*qadī*) non muslim atas diri orang-orang Islam. Muhammad Salam Madzkur memperbolehkan dan membenarkan pengangkatan hakim (*qadī*) non muslim tersebut atas dasar kelayakan mereka menjadi saksi dimana orang non muslim boleh menjadi saksi bagi orang Islam (kecuali dalam perkara yang berhubungan dengan kekeluargaan). Lebih lanjut untuk menguatkan pendapatnya Salam Madzkur menyebutkan bahwa, *Majallāh Ahkām Adliāh* tidak menyebutkan sama sekali persyaratan agama Islam sebagai salah satu syarat pengangkatan hakim (*qadī*), termasuk pula dalam hal penerimaan saksi, tidak mensyaratkan harus beragama Islam. Salam Madzkur juga mengemukakan pendapat bahwa madzhab Hambali, Syuraih, Ibnu Mas'ud, Al-Auzā'i, al-Nakḥā'i, dan Al-Imāmiāh adalah orang-orang yang mau menerima kesaksian (*syahadat*) dari orang-orang yang bukan beragama Islam atas wasiat orang Islam dalam keadaan musafir⁵⁸.

Abdul Al-Auṭwah, kemudian memberikan sanggahan atas pendapat yang telah dikemukakan oleh Salam Madzkur, atas kebolehan pengangkatan seorang

⁵⁶Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kerangka Fiqh al Qadha* (Cet. I; Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2012), h. 81

⁵⁷Abdul Manan, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan: Suatu Kajian dalam Sistem Peradilan Islam*, h. 23.

⁵⁸Abdul Manan, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan: Suatu Kajian dalam Sistem Peradilan Islam*, h. 23.

hakim (*qaḍī*) non muslim terhadap perkara atas orang-orang Islam. Auṭwāh mengemukakan bahwa kebolehan pengangkatan hakim (*qaḍī*) non muslim hanya diperbolehkan dalam kondisi darurat saja. Demikian pula pengangkatan hakim (*qaḍī*) non muslim karena didasarkan atas penyaksian dari orang-orang non Islam kepada orang Islam yang diperbolehkan oleh *syara'* sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh Imām Ahmad, pendapat menurut Auṭwāh⁵⁹ tidak kuat karena tidak menjadi pengangan madzhab Hanafi. Kecuali tersebut sedikit di dalam *Turāq al-Hukmiāh* itupun pendapat yang lemah dan riwayat kedua yang diperselisihkan. Hal ini menurut Auṭwāh berlaku pula dalam hal wilayah kesaksian (syahadat), sementara wilayah *al-qaḍa* bersifat umum dan wilayah kesaksian bersifat khusus, sehingga tidak sama dalam pelaksanaannya.

2) *Harus Laki-laki*

Ketentuan pengangkatan hakim (*qaḍī*) dikalangan jumhur ulama madzhab Syafi'i, Māliki dan Hambāli, mensyaratkan bahwa untuk diangkat menjadi seorang hakim (*qaḍī*) harus laki-laki⁶⁰. Pengangkatan wanita sebagai hakim (*qaḍī*) menurut madzhab ini, tidak dapat dibenarkan dan putusan yang dijatuhkan tidak sah dalam arti tidak dapat dilaksanakan. Persyaratan pengangkatan hakim (*qaḍī*) bahwa harus seorang yang berjenis kelamin laki-laki, didasarkan pada pandangan di dalam Surat QS Al-Nisā /4: 34:

⁵⁹ Abdul Manan, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan: Suatu Kajian dalam Sistem Peradilan Islam*, h. 23.

⁶⁰ Abdul Manan, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan: Suatu Kajian dalam Sistem Peradilan Islam*, h. 24.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالَّذِينَ حَقِصَتْ حَفِظَتْ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٢٤﴾

Terjemahnya:

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang shaleh adalah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri dibalik pembelakangan suaminya oleh karena Allah telah memelihara (mereka) wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkan diri dari tempat tidur mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Mengetahui⁶¹.

Pandangan ini lebih diperkuat atas sebuah hadits yang diriwayatkan dari Abi Barkah dimasa Rasulullah saw bersabda, *“Bahwa suatu bangsa tidak akan jaya apabila pemerintahan dipegang oleh kaum wanita”*. Rasulullah saw menyampaikan hal ini ketika mendengar Raja Persia telah mati dan rakyat Persia mengangkat anak perempuannya menjadi Ratu⁶².

Menurut Muhammad Jawād Mugniyāh maksud ayat dalam Surat Al-Nisā /4: 34 tersebut, tidak bertujuan untuk menciptakan perbedaan yang menganggap wanita

⁶¹Departemen Agama RI, *Al-qurān dan Terjemahnya* (Jakarta: Sygma, 2007), h. 76.

⁶²Abdul Manan, *Etika Hakim dalam Penyclenggaraan Peradilan: Suatu Kajian dalam Sistem Peradilan Islam*, h. 24.

lebih rendah kedudukannya dibandingkan dengan kaum laki-laki, tetapi keduanya adalah sama. Jawad Mugniyāh lebih lanjut menjelaskan bahwa ayat tersebut hanya ditujukan kepada laki-laki sebagai suami dan wanita sebagai istri sebagai rukun kehidupan. Keduanya bersifat saling melengkapi, dan ayat ini hanya ditujukan kepemimpinan suami saja, dalam memimpin istrinya⁶³. Huzaimāh T. Yanggo juga menjelaskan bahwa maksud ayat 34 dalam Surat Al-Nisā tersebut adalah untuk mempertegas pembagian tugas antara laki-laki selaku suami dan wanita selaku istri. Tugas suami adalah untuk melindungi, menjaga, membela, bertindak sebagai wali, dan memberi nafkah. Sementara posisi wanita berada dalam jaminan, keamanan, dan nafkah⁶⁴. Hal inilah yang menyebabkan sehingga laki-laki memperoleh warisan dua kali lipat dari pada wanita.

Penulis berpendapat kedudukan kaum laki-laki atas kaum wanita adalah sederajat. Kelebihan yang dimiliki oleh laki-laki, pada hakikatnya tidak memberikan legitimasi atas kesewenang-wenangan pada diri seorang perempuan. Hal itu, menurut penulis berlaku pula terhadap diri seorang wanita (istri), yang tidak dibenarkan untuk meremehkan kelebihan seorang laki-laki. Substansi kedudukan antara seorang wanita dan laki-laki yang setara dapat dilihat dalam QS Al-Baqarāh /2: 228:

⁶³Huzaimah T. Yanggo, *Hukum Keluarga dalam Islam* (Cet. I; Palu: Yayasan Masyarakat Indonesia Baru, 2013), h. 31.

⁶⁴Huzaimah T. Yanggo, *Hukum Keluarga dalam Islam* h. 31.

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْنَ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَى نِ دَرَجَةٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

Dan para wanita (isteri) mempunyai hak yang seimbang dengan kewajiban menurut cara yang makruf. Akan tetapi, para suami mempunyai satu tingkatan atas istrinya (karena memberi nafkah, sebab berfungsi selaku qawwam)⁶⁵.

Kutipan ayat di atas, menurut penulis merupakan suatu legitimasi terhadap persamaan dan kedudukan status antara seorang wanita dan seorang laki-laki. Adapun mengenai penegasan status pria yang berada satu tingkat di atas kaum wanita, lebih mengarah kepada persoalan tanggung jawab seorang pria sebagai kepala keluarga dalam mencari, memberi nafkah, serta sebagai pelindung dan pengayom dalam keluarga.

Kedudukan wanita yang setara dengan laki-laki dalam suatu keluarga, memberikan indikasi bahwa seorang laki-laki tidak dibenarkan untuk berlaku secara sewenang-wenang terhadap istrinya. Sebab pada posisi ini, seorang wanita karena pergaulan hidup dalam rumah tangga, berhak untuk menuntut pembatalan akad nikah dengan jalan *khuluq* (talak tebus). Keadaan ini, menurut perspektif penulis dapat disimpulkan bahwa status seorang wanita tidak serta merta, berada dan tunduk di bawah kekuasaan seorang laki-laki (suami). Hak untuk mengajukan *khuluq* (talak tebus) merupakan suatu contoh legitimasi/pengakuan terhadap status seorang wanita yang bisa menuntut pembatalan akad nikah sebagaimana dalam perkara talak.

⁶⁵Departemen Agama RI, *Al-qurān dan Terjemahnya* (Jakarta: Sygma, 2007), h. 45.

Huzaimah T. Yanggo⁶⁶, memberikan penjelasan bertalian dengan Surat Al-Nisā ayat 34, jumhur ulama mengatakan bahwa wanita tidak boleh menjadi hakim atau *top leader* (Perdana Menteri atau Kepala Negara) sebagaimana Hadits dari Abi Bakrah, dapat ditelusuri jawabannya dalam QS Al-Taubat/ 9: 71:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong (pemimpin) bagi sebagian yang lain. Mereka menyeru (mengerjakan) yang makruf, mencegah yang mungkar, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana⁶⁷.

Dalam ayat di atas, Allah swt menggunakan kata *awliyā* yang berarti pemimpin. Redaksi ini, tidak hanya ditujukan kepada pihak laki-laki saja, tetapi keduanya (laki-laki dan wanita) secara bersamaan. Berdasarkan hal ini, wanita juga dapat menjadi pemimpin, yang penting dia mampu dan memenuhi kriteria sebagai seorang pemimpin, karena menurut Al-Marāghy dan Rasyid Ridha bahwa kata *awliyā* tersebut dengan tafsiran yang mencakup wali penolong, wali solidaritas, dan

⁶⁶Huzaimah T. Yanggo, *Hukum Keluarga dalam Islam* h. 36.

⁶⁷Departemen Agama RI, *Al-qurān dan Terjemahnya* (Jakarta: Sygma, 2007), h. 189.

wali kasih sayang⁶⁸. Lebih lanjut dikemukakan bahwa dalam Surat At-Taubat ayat 71 tersebut di atas, bahwa Al-qurān tidak melarang wanita untuk memasuki berbagai profesi sesuai dengan keahliannya seperti menjadi guru, dosen, pengusaha, menteri, hakim, kepala negara, dengan pengecualian dalam tugasnya tetap memperhatikan hukum-hukum atau aturan-aturan yang ditetapkan Al-qurān dan As-Sunnah.

Pengecualian tersebut tetap dibuka sepanjang wanita tersebut misalnya tidak melalikan tugasnya dalam rumah tangga, harus ada izin dan persetujuan dari suami, bila dia bekerja setelah/sebelum suami tidak mendatangkan hal yang bersifat negatif bagi diri, keluarga dan agamanya⁶⁹. Terhadap posisi hadits dari Abi Bakrāh yang menyatakan bahwa tidak akan bahagia suatu kaum mengangkat pemimpin seorang wanita, maka Al-qurān justru menampilkan kisah yang sebaliknya. Negeri Shaba' (Shan'a) yang dipimpin oleh Ratu Balqis, disebutkan telah berhasil memimpin rakyatnya dan hidup dalam keadaan yang makmur. Hal ini dapat ditelusuri dalam Al-qurān Surat Sabā/ 34: 15 dan kisah selanjutnya dalam Surat Al-Naml/ 27: ayat 23,24,27, sd. 44.

Kisah yang diuraikan dalam Al-qurān sebagaimana dalam ayat-ayat di atas, secara historis berbicara tentang kepemimpinan seorang wanita yang berhasil memimpin Negeri Saba, dengan segala kecemerlangan ide yang dimilikinya, ketajaman pikiran, pandangan dan kebijaksanaannya dalam mengambil berbagai

⁶⁸Huzaimah T. Yanggo, *Hukum Keluarga dalam Islam* h. 37. Lihat juga dalam Ahmad Mustafa Al-Marāghy, *Tafsir Al-Marāghy*, al-Qahirāh: Mustafa al-Baby al-Halāby wa Awlāduh 1383 H/1963 M, Juz X, Cet. III, h. 159. Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manār*, Jilid II, h. 626.

⁶⁹Huzaimah T. Yanggo, *Hukum Keluarga dalam Islam* h. 38.

keputusan politik. Sebagai contoh yang dapat penulis kemukakan, ketika Nabi Sulaiman mengirim surat dan mengajak Ratu Balqis sang penguasa Negeri Saba' untuk bersedia memeluk dan berserah diri dalam ajaran Islam, Ratu Balqis mengadakan musyawarah dengan para pembesar negerinya karena dia sendiri memiliki pandangan yang jauh ke depan; Ratu Balqis tahu konsekwensi surat yang dikirimkan oleh Nabi Sulaiman kepadanya dan Ratu Balqis sebagai penguasa Negeri Saba' tidak ingin negerinya hancur dan dia merasa kasihan terhadap rakyatnya.

Ratu Balqis tahu persis bahwa Nabi Sulaiman adalah seorang raja yang kuat, dan sang penguasa Negeri Saba' tersebut menugaskan seorang utusan untuk memberikan hadiah yang berharga kepada Nabi Sulaiman, dengan suatu isyarat ketika Nabi Sulaiman menerimanya berarti dia bukan seorang Nabi, melainkan seorang penguasa yang cinta terhadap materi saja. Kalau Nabi Sulaiman menolaknya maka dapat dipastikan bahwa Sulaiman adalah seorang Nabi. Dan sangatlah tidak bijaksana, melawan Sulaiman dan melawan kebenaran yang tentu dijamin oleh Tuhan dengan kemenangan. Juga sangatlah tidak bijaksana menghalangi kaum dan rakyatnya untuk menikmati kebenaran tersebut dengan berperang melawannya untuk mempertahankan kebatilan⁷⁰.

Kisah Ratu Balqis di dalam Al-qurān merupakan cerminan kecemerlangan pemikiran dan kebijaksanaan seorang wanita sebagai pemimpin. Hal ini dapat dilihat bahwa Ratu Balqis tidak serta-merta menerima ajakan/seruan dari penguasa lain,

⁷⁰Huzaimah T. Yango, *Hukum Keluarga dalam Islam* h. 39.

tetapi menyelidiki terlebih dahulu motif ajakan tersebut. Selain itu, penulis juga menyimpulkan bahwa Ratu Balqis merupakan sosok pemimpin yang demokratis, dimana dalam pengambilan keputusan selalu dilakukan melalui musyawarah, dengan harapan agar kepentingan rakyat banyak tidak dikorbankan. Kisah Ratu Balqis disebutkan Allah swt, merupakan suatu isyarat bahwa wanita boleh menjadi pemimpin sebagaimana halnya laki-laki.

Menurut Muhammad Jarir al-Thabāry dan Ibnu Hazm berpendapat bahwa hadits Abi Bakrāh tersebut tidak memperbolehkan wanita untuk menjadi pemimpin, hanya dalam hal untuk menjadi Kepala Negara Islam (khalifāh). Sedangkan untuk menjadi Perdana Menteri/Kepala Pemerintahan, hakim, boleh dijabat oleh seorang wanita⁷¹.

3) Baligh dan Berakal

Dalam berbagai literatur hukum Islam, tidak ditemukan secara pasti kriteria usia minimal bagi seorang untuk diangkat menjadi seorang hakim (*qaḍī*). Islam hanya menentukan syarat minimum untuk diangkat menjadi seorang hakim (*qaḍī*) adalah orang sudah *baligh*. Dengan demikian anak-anak tidak diperbolehkan untuk menjadi seorang hakim (*qaḍī*) sebab pada diri mereka, belum dituntut untuk mempertanggungjawabkan pekerjaannya. Pada umumnya para ahli hukum Islam

⁷¹Huzaimah T. Yango, *Hukum Keluarga dalam Islam* h. 39.

menyepakati bahwa usia minimal untuk diangkat menjadi seorang hakim (*qadī*) adalah berusia minimal 25 tahun⁷².

Selain itu, orang yang diangkat menjadi hakim (*qadī*) hendaknya orang yang berakal, dan tidak dibenarkan mengangkat orang gila meskipun kadang-kadang ingatannya sembuh. Menurut Imām Al-Mawardi, akal mempunyai peranan yang sangat penting untuk mengetahui hal-hal yang bersifat *taklif* (perintah), dan harus mempunyai pengetahuan yang bersifat *dzarūri* (urgen). Hal ini merupakan syarat yang harus dipenuhi karena, seorang hakim (*qadī*) dituntut untuk mampu membedakan segala sesuatu dengan benar, cerdas, dan jauh dari sifat lupa⁷³. Dengan kecerdasannya seorang hakim (*qadī*) dituntut untuk mampu menjelaskan hal-hal yang bersifat samar-samar (kabur), dan memutuskan masalah yang rumit sekalipun.

Keadan ini, menuntut seorang hakim (*qadī*) dalam memutuskan suatu perkara harus mempergunakan segala daya dan upaya serta, menggali fakta-fakta hukum yang sebenarnya untuk merumuskan peristiwa hukumnya dan menentukan putusannya tersebut. Terhadap hal ini, penulis tidak lupa untuk mengutip beberapa peristiwa yang membutuhkan analisa dan penalaran logis yang cukup mendalam untuk memutuskan kasus tersebut;

⁷²Abdul Manan, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan: Suatu Kajian dalam Sistem Peradilan Islam*, h. 25.

⁷³Imām Al-Mawārdi, *Al-Ahkām As-Ṣultaniyyāt: Hukum-hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*, penerj. Fadli Bahri, h. 123.

a.) Nabi Sulaiman dan kasus pengakuan dua orang Ibu terhadap seorang bayi

Terkenal adalah perkara yang diputuskan oleh Raja Sulaiman mengenai dua orang wanita yang menyatakan sebagai ibu dari seorang anak. Setelah mendengar keduanya berdebat dihadapannya, raja berkata, “ambillah pedang bagiku!” orang-orang membawa sebilah pedang ke depan raja, dan raja berkata, “belahlah anak hidup ini jadi dua, dan berikan sebelah kepada wanita itu, serta sebelah lagi kepada wanita lainnya”. Akan tetapi wanita yang adalah ibu dari si anak tadi menyatakan kepada raja (karena dia merasa kasihan terhadap anaknya). “ya tuanku, berikanlah anak hidup ini kepada wanita itu, dan janganlah membunuhnya”. Sebaliknya, wanita yang satunya berkata, “biarlah anak itu bukan milikmu dan bukan milikku, belahlah dia”. Maka raja menjawab dan berkata; “berikanlah kepada wanita yang satu itu anak yang hidup, dan jangan bunuh dia, dialah ibunya”. Dan seluruh Israel mendengar keputusan yang telah diambil oleh raja, dan merasa takut dihadapan raja, karena mereka merasa bahwa, kebijaksanaan tuhan ada padanya untuk memberikan keadilan”⁷⁴.

b). Kasus Lelaki tua dan Istrinya

Pada suatu hari, seorang lelaki tua pendatang yang jelek tampannya mengadu kepada sang raja, bahwa istrinya dibawa lari di perjalanan oleh seorang pemuda. Setelah pemuda bersama seorang pemuda yang dikenal oleh orang tua itu ditangkap, maka ditanyailah pemuda itu mengenai pengaduan lelaki tua itu. Pemuda itu mengadu bahwa perempuan yang ditemaninya adalah istrinya dan keterangan itu dikuatkan oleh si wanita. Sebaliknya orang tua itu tetap mempertahankan, bahwa wanita itu adalah istrinya. Oleh raja disuruh pisahlah ketiga orang itu masing-masing di sebuah rumah, lalu diperintahkannya untuk mengumpulkan kotoran (tinja) mereka masing-masing. Keesokan harinya kotoran ketiga kotoran orang itu dibawalah ke sidang pengadilan. Ternyata, bahwa kotoran orang tua itu, dan perempuan itu sama warnanya, ialah kehitam-hitaman dan kotoran si pemuda itu keputih-putihan. Lalu raja memeriksa tersendiri ketiga orang itu. Orang tua itu menyatakan, ia makan ketan pulut hitam bersama dengan istri mudanya, dan baru buang air pada pagi hari itu. Wanita itu menerangkan bahwa ia makan ketan pulut hitam bersama dengan si pemuda itu sebelum berangkat dan pagi hari itu baru buang air. Selanjutnya si pemuda itu menyatakan bahwa ia makan ketan pulut putih bersama istrinya sebelum berangkat. Dipanggillah ketiganya menghadap kembali dan diperlihatkan kotoran mereka masing-

⁷⁴Achamd Ali dan Wiwic Heryani, *Sosiologi Hukum: Kajian Empiris Terhadap Pengadilan* (Cet. I; Jakarta : Kencana, 2012), h. 158.

masing. Akhirnya si pemuda itu mengakui kesalahannya bahwa ia telah membujuk istri orang itu untuk mengakuinya sebagai suaminya. Karena tidak pantas orang tua jelek itu memperistrikan wanita muda yang cantik itu. Setelah perempuan itu mengakui pula, bahwa ia sebenarnya istri orang tua jelek itu dan bahwa ia makan pulut hitam bersamanya sebelum berangkat, maka raja menjatuhkan hukuman kepada si pemuda itu⁷⁵.

Uraian singkat mengenai dua contoh pada kasus tersebut di atas, memberikan gambaran betapa pentingnya kapabilitas intelektual seorang hakim (*qadī*). Penalaran logis pada dua contoh kasus tersebut di atas, menuntut seorang hakim untuk melakukan berbagai macam tafsiran guna menemukan suatu titik terang yang bermuara kepada kebenaran dan selanjutnya dikukuhkan oleh putusan hakim tersebut. Kondisi pada kasus tersebut di atas, menurut hemat penulis tidak mungkin dapat diselesaikan oleh orang yang belum *baligh* dan tidak berakal. Hal inilah salah satu syarat mendasar bagi kriteria pengangkatan seorang hakim (*qadī*) karena dituntut untuk menyelesaikan segala macam perselisihan (sengketa) yang terjadi meskipun dasar hukumnya masih samar atau tidak ada sama sekali. Prasyarat inilah yang seharusnya menjadi acuan bahwa putusan (*vonnis*) seorang hakim (*qadī*) sejatinya merupakan penyelesaian atas segala macam persengketaan yang terjadi. Penulis beranggapan sebagaimana dua contoh kasus tersebut di atas, maka seorang hakim (*qadī*) adalah orang yang betul-betul memiliki daya intelegensi yang kuat (berakal) hal ini disebabkan karena, hakim (*qadī*) dituntut untuk memberikan

⁷⁵Achamd Ali dan Wiwic Heryani, *Sosiologi Hukum: Kajian Empiris Terhadap Pengadilan* h. 158.

penerangan dan penjelasan atas kasus yang terjadi meskipun kasus tersebut bersifat kabur (samar-samar) sekalipun, baik fakta hukum dan peristiwa hukumnya.

4) *Merdeka*

Kalangan ahli hukum Islam (*fuqahā*) dalam berbagai madzhab sepakat mengenai syarat pengangkatan hakim (*qadī*) tidak diperbolehkan dari kalangan budak secara mutlak. Hal ini disebabkan karena seorang budak tidak mampu untuk memiliki kemampuan terhadap dirinya sendiri⁷⁶. Hal ini pula berlaku secara *mutatis mutandis* dalam memberikan kesaksian dalam berbagai kasus, oleh karenanya seorang budak tidak dapat dijadikan hakim (*qadī*). Apabila kondisi sebaliknya yang terjadi, misalnya seorang budak telah merdeka maka, boleh saja diangkat menjadi hakim (*qadī*) meskipun budak tersebut tetap menanggung *walā'* (keterkaitan dengan bekas tuannya⁷⁷).

Imām Al-Mawardi menyatakan bahwa budak tidak memiliki kekuasaan yang sempurna (utuh) terhadap dirinya sendiri. Oleh karena itu, seorang budak tidak dapat berkuasa atas orang lain, dan kesaksian budak atas kasus-kasus hukum tidak dapat diterima, sehingga sangat logis apabila dikatakan bahwa status budak menghalangi penerapan hukum olehnya dan pengangkatan dirinya menjadi hakim⁷⁸. Al-Mawardi

⁷⁶Abdul Manan, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan: Suatu Kajian dalam Sistem Peradilan Islam*, h. 31.

⁷⁷Abdul Manan, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan: Suatu Kajian dalam Sistem Peradilan Islam*, h. 31.

⁷⁸Imām Al-Mawārdī, *Al-Ahkām As-Ṣultaniyyāt: Hukum-hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*, penerj. Fadli Bahri, h. 123.

lebih lanjut menguraikan bahwa ketentuan ini berlaku terhadap budak yang kemerdekaannya tidak utuh seperti budak *mudabbār*⁷⁹ atau budak *mukatib*⁸⁰ atau orang yang diperbudak sebagiannya. Namun status budak tidak menghalangi bagi budak tersebut, untuk mengeluarkan fatwa dan meriwayatkan hadits, karena dalam bidang tersebut tidak mengandung aspek kekuasaan⁸¹.

5) *Megetahui hukum-hukum syariat*

Kriteria dalam pengangkatan hakim (*qadī*) yang selanjutnya penulis dapat kemukakan adalah mengetahui hukum-hukum syariat. Menurut hemat penulis, hal ini merupakan jantung dari pada berbagai macam kriteria dalam pengangkatan hakim (*qadī*). Alasan penulis mengemukakan hal ini karena syariat merupakan esensi (ruh) dalam agama Islam. Kedudukan syariat sebagai keseluruhan redaksi firman-firman Allah swt, telah membawa berbagai macam skema penafsiran di kalangan para *mufasssīr* dan berbagai macam proses penggalian (*istinbāt*) di kalangan para *fuqahā*, yang mengarah kepada munculnya kesimpulan yang berbeda-beda dalam konteks dan situasi zaman yang berbeda pula.

Kondisi seperti ini, tentunya membawa hukum Islam tampil dalam untaian kedinamisan zaman. Hal ini pula yang menurut hemat penulis merupakan tantangan

⁷⁹Budak *mudabbār* ialah budak yang pembebasan dirinya ditentukan setelah kematian tuannya, misalnya tuannya berkata, "jika aku telah meninggal dunia, engkau menjadi merdeka".

⁸⁰Budak *mukātib* ialah budak dalam proses pemerdekaan membayar sejumlah uang kepada tuannya.

⁸¹Imām Al-Mawardi, *Al-Ahkām As-Ṣultaniyyāt: Hukum-hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*, penerj. Fadli Bahri, h. 123.

tersendiri bagi *fuqahā* kontemporer untuk bagaimana merekonstruksi ulang berbagai hal di dalam hukum Islam. Penulis tidak memberikan tendensi, apapun tetapi yang penulis maksud dalam hal ini adalah *fuqahā* kontemporer dituntut untuk menggali berbagai nash-nash di dalam sumber hukum Islam, sehingga persoalan yang dihadapi oleh ummat Islam yang tidak ada rujukannya di dalam Al-qurān dan As-Sunna di era global sekarang ini dapat terpecahkan.

Imām Al-Mawardi menyebutkan bahwa seorang hakim (*qadī*) dituntut untuk harus mengetahui hukum-hukum syariat; ilmu-ilmu dasar (*ushūl*); dan cabang-cabangnya (*furu'*). Selanjutnya dikemukakan oleh Imām Al-Mawardi bahwa ilmu-ilmu dasar dalam syariat terdiri atas empat bagian yaitu;

- 1). Mengetahui Kitabullah *Azzā wa Jallā* dengan benar, hingga ia mengetahui hukum-hukumnya yang *nasikh* (nash yang menghapus) dan *mansukh* (nash yang dihapus), ayat-ayat yang *muhkam*, dan ayat-ayat yang bersifat *mutasyabihāt*.
- 2). Mengetahui Sunnah Rasullullah *shallallahu Alaihi wa Sallam* yang eksis; ucapan beliau dan tindakannya, teknis penyampaianya; *mutawātir* atau *ahad*, *shahih* atau tidaknya, dan sebab-sebabnya.
- 3). Mengetahui penafsiran para generasi *salaf* dalam kesepakatan mereka dengan *ijma'* mereka dan berijtihad dengan pendapatnya sendiri dalam masalah-masalah yang mereka perselisihkan.
- 4). Mengetahui *qiyās* yang mengharuskannya mengembalikan masalah-masalah (cabang-cabang) yang tidak disebutkan dalam *nash-nash*, hingga ia mendapatkan jalan untuk mengetahui ilmu tentang kasus-kasus aktual dan membedakan antara yang benar dan bathil⁸².

Penetapan di atas sebagaimana uraian pendapat yang telah dikemukakan oleh Al-Mawardi, apabila dimiliki seseorang secara kumulatif dalam Ilmu Syariat, maka

⁸²Imām Al-Mawardi, *Al-Ahkām Al-Shūṭaniyyāt: Hukum-hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*, penerj. Fadli Bahri, h. 124.

secara langsung orang tersebut telah menjadi seorang *mujtahid* dalam agama ini, diperbolehkan untuk berfatwa, memutuskan perkara, diminta untuk berfatwa, diminta untuk memutuskan perkara⁸³. Keadaan ini berlaku dalam kondisi yang sebaliknya, apabila seseorang tidak menguasai ilmu dasar (*ushūl*) secara lengkap, maka orang tersebut tidak dapat disebut sebagai *mujtahid*, tidak diperbolehkan untuk berfatwa, dan memutuskan perkara. Apabila orang tersebut tetap diangkat sebagai hakim (*qadī*), kemudian orang tersebut memutuskan perkara dengan benar atau salah maka, pengangkatan orang tersebut tidak sah. Terhadap keputusan yang ditetapkan kendati telah sesuai dengan kebenaran, menurut Al-Mawardi tetap tertolak. Adapun mengenai keputusan yang salah sebagaimana telah ditetapkannya, dialamatkan kepada diri orang tersebut dan kepada orang yang mengangkatnya⁸⁴.

Abu Hanifāh *Rahimahullah* membolehkan pengangkatan orang yang tidak memiliki kriteria sebagai *mujtahid* menjadi seorang hakim (*qadī*). Namun, pendapat Imam Abu Hanifāh tersebut menyelisihi pendapat *jumhur fuqahā*, karena pendapat para *fuqahā* mensyaratkan bahwa kekuasaan hakim yang tidak memiliki syarat sebagai *mujtahid* tidak sah dan seluruh keputusan yang ditetapkannya tertolak⁸⁵.

⁸³Imām Al-Mawardi, *Al-Ahkām Al-Shūṭaniyyāt: Hukum-hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*, penerj. Fadli Bahri, h. 125.

⁸⁴Imām Al-Mawardi, *Al-Ahkām Al-Shūṭaniyyāt: Hukum-hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*, penerj. Fadli Bahri, h. 125.

⁸⁵Imām Al-Mawardi, *Al-Ahkām Al-Shūṭaniyyāt: Hukum-hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*, penerj. Fadli Bahri, h. 125.

6) *Sempurna Panca Indera*

Orang yang akan diangkat menjadi hakim (*qadi*) hendaklah orang tersebut sempurna pancaindranya, terutama dapat mendengar dan tidak bisu. Hal ini penting bagi seorang hakim (*qadi*) karena akan memberikan arahan dan menanyakan segala hal ikhwal yang berkaitan dengan para pihak yang berperkara. Hal ini tentu akan menjadi kendala tersendiri, apabila diangkat seorang hakim (*qadi*) yang tidak dapat mendengar dan tidak dapat berbicara, karena peranan seorang hakim (*qadi*) dalam persidangan harus mencari dan menemukan fakta-fakta hukum, memeriksa pembuktian, sehingga putusan (*vonnis*) yang dijatuhkan sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan.

Putusan yang dijatuhkan oleh seorang hakim (*qadi*) dalam menangani dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, harus mampu meredam dan menyelesaikan segala macam bentuk persengketaan yang terjadi di tengah masyarakat. Ketika diajukan suatu pertanyaan, apakah syarat sempurnanya pancaindra seseorang merupakan suatu syarat mutlak dalam pengangkatan hakim (*qadi*), penulis beranggapan bahwa kriteria yang harus dimiliki oleh seseorang ketika akan diangkat menjadi seorang hakim (*qadi*) adalah berpengetahuan luas dan sempurna pancaindra. Sengaja penulis mengemukakan hal ini karena, dalam praktek dan tahapan persidangan di dalam pengadilan, seorang hakim (*qadi*) harus menemukan peristiwa/fakta hukum yang mendasari timbulnya suatu persengketaan, sehingga dengan dikemukakannya peristiwa/fakta hukum tersebut, seorang hakim

(*qadi*) harus memberikan kepada para pihak untuk memberikan berbagai macam argumen pembuktian.

Letak peranan seorang hakim (*qadi*) dalam memeriksa dan memutus suatu perkara, membutuhkan interpretasi logis yang sesuai dengan apa yang terjadi secara riil sehingga, seorang hakim (*qadi*) ketika berada dalam posisi menangani perkara/sengketa yang diajukan kepadanya, hakim (*qadi*) harus melihat fakta-fakta riil yang terjadi, kemudian dengan melihat fakta-fakta tersebut dan dilengkapi dengan aturan pembuktian maka, seorang hakim (*qadi*) harus memberikan putusan (*vonnis*). Hal inilah sekiranya menurut hemat dan perspektif penulis bahwa sempurna pancaindra merupakan syarat mutlak bagi seseorang untuk diangkat menjadi seorang hakim (*qadi*).

7) Kredibilitas Individu

3. Tugas dan peranan seorang hakim

Peradilan agama sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman mempunyai tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia (Pasal 1 dan 2 UU. No.14/1970).

a) Tugas Yustisial

Hakim peradilan agama mempunyai tugas untuk menegakkan hukum perdata islam yang menjadi kewenangannya dengan cara-cara yang diatur dalam hukum acara peradilan agama⁸⁶.

Adapun tugas-tugas pokok hakim di pengadilan agama adalah sebagai berikut:

- i. Membantu mencari keadilan.
- ii. Mengatasi segala hambatan dan rintangan.
- iii. Mendamaikan para pihak yang bersengketa.
- iv. Memimpin persidangan.
- v. Memeriksa dan mengadili perkara.
- vi. Meminitur berkas perkara.
- vii. Mengawasi pelaksanaan putusan.
- viii. Memberikan pengayoman kepada pencari keadilan.
- ix. Menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.
- x. Mengawasi penasehat hukum⁸⁷.

b) Tugas Non Yustisial

Selain tugas pokok sebagai tugas justisial tersebut, hakim juga mempunyai tugas non justisial, yaitu:

- i. Tugas pengawasan sebagai hakim pengawas bidang;

⁸⁶Drs. H.A. Muktiarto,SH. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 29.

⁸⁷Drs. H.A. Muktiarto,SH. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 30.

- ii. Turut melaksanakan hisab, rukyat dan mengadakan kesaksian hilal;
- iii. Memberikan penyuluhan hukum;
- iv. Melayani riset untuk kepentingan ilmiah;
- v. Tugas-tugas lain yang diberikan kepadanya⁸⁸;

Pola rekrutmen hakim pada Mahkamah Agung RI, untuk badan-badan peradilan yang ada di bawahnya, yang akan di bahas dalam tesis ini hanya pada Peradilan Umum, Peradilan Agama.

Pada Peradilan Umum, dasar hukum rekrutmen hakim adalah didasarkan pada Pasal 14 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum ditentukan bahwa:

1. Untuk diangkat sebagai hakim pengadilan, seorang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia.
 - b. Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa.
 - c. Setia kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - d. Sarjana Hukum.
 - e. Lulus Pendidikan Hakim.
 - f. Mampu secara Rohani dan Jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban.

⁸⁸Drs. H.A. Muktiarto,SH. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 36.

- g. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 40 (empat puluh) tahun.
- h. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh hukum tetap.⁸⁹

Kemudian pada badan Peradilan Agama, sebagaimana diatur dalam pasal 13 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, ditentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat diangkat sebagai Hakim Pengadilan Agama, yakni:

- a. Warga Negara Indonesia.
- b. Beragama Islam.
- c. Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa.
- d. Setia kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- e. Sarjana Syariah, Sarjana Hukum Islam atau Sarjana hukum yang menguasai hukum Islam.
- f. Lulus Pendidikan Hakim.
- g. Mampu secara Rohani dan Jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban.
- h. Berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela.
- i. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 40 (empat puluh) tahun.

⁸⁹Pasal 14 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum.

- j. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh hukum tetap⁹⁰.

B. Tentang Pembuktian

1. Pengertian Pembuktian

Proses pembuktian perkara di pengadilan bertujuan untuk memperjelas atau memberikan titik terang atas sengketa/peristiwa yang terjadi. Pada tahapan ini, hakim akan melihat sejauh mana gugatan yang dilakukan oleh penggugat yang terbukti, dan sejauhmana bantahan tergugat atas dalil-dalil gugatan penggugat yang tidak terbukti. Apabila penggugat berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, oleh majelis hakim gugatan penggugat akan diterima/dikabulkan. Selanjutnya apabila tergugat berhasil membuktikan bahwa gugatan penggugat tidak terbukti maka, oleh majelis hakim gugatan tersebut ditolak, dan pihak yang dinyatakan kalah oleh majelis hakim dihukum pula untuk membayar biaya perkara selama proses beracara di pengadilan berlangsung.

Pembuktian dalam hukum acara perdata dan hukum acara pidana memiliki perbedaan yang cukup mendasar. Selain perbedaan mengenai jenis alat bukti, terdapat juga perbedaan mengenai sistem pembuktian⁹¹. Pembuktian yang ingin dicapai dalam sistem hukum acara pidana, adalah kebenaran yang bersifat materil (mutlak). Sedangkan pembuktian dalam hukum acara perdata, yang ingin dicapai

⁹⁰Pasal 13 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

⁹¹Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian: Pidana dan Perdata*, h. 2.

adalah kebenaran yang bersifat formil. Proses pembuktian dalam hukum acara pidana menganut sistem pembuktian negatif (*negatief wettelijk bewijsleer*) sementara, pembuktian dalam hukum acara perdata menganut sistem pembuktian positif (*positief wettelijk bewijsleer*)⁹².

Definisi pembuktian yang dikemukakan oleh para ahli sangat beragam dan bersifat variatif. Hilman Hadikusuma menyatakan pembuktian dalam acara perdata, berarti perbuatan hakim dalam usahanya menyelidiki apakah suatu hubungan hukum yang diperkirakan itu terbukti, artinya benar-benar ada atau tidak. Untuk itu hakim harus melihat bahan-bahan bukti dari kedua pihak yang berperkara⁹³. R. Subekti menyatakan pembuktian sebagai upaya meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan⁹⁴. Definisi pembuktian seperti yang dikemukakan oleh R. Subekti di atas, terbatas pada kasus persengketaan (*contentiosa*) semata, tetapi dalam proses pembuktian di pengadilan, tidak terbatas pada kasus persengketaan semata. Dalam hal perkara permohonan (*voluntair*) yang diajukan ke pengadilan, tetap membutuhkan proses pembuktian untuk memperjelas bahwa permohonan yang dilakukan oleh pemohon memang benar adanya, seperti dalam perkara penetapan ahli waris dan pengesahan asal-usul anak.

Pendapat yang sama dikemukakan oleh Teguh Samudera yang menyebutkan bahwa membuktikan berarti menjelaskan (menyatakan) kedudukan hukum yang

⁹²Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian: Pidana dan perdata* h. 2.

⁹³Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*. (Cet. IV; Bandung: Alumni, 2010), h. 160.

⁹⁴R. Subekti, *Hukum Pembuktian*. (Cet. XII; Jakarta :Pradnya Paramita, 1999), h. 1.

sebenarnya berdasarkan keyakinan hakim kepada dalil-dalil yang dikemukakan para pihak yang bersengketa⁹⁵. Alimuddin berpendapat, pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran suatu peristiwa yang dikemukakan⁹⁶. Penulis menilai definisi pembuktian yang telah dikemukakan oleh Alimuddin di atas, melihat pembuktian dalam konteks yang luas karena, perkara di pengadilan tidak hanya meliputi perkara sengketa (*contentiosa*) tetapi, meliputi perkara permohonan (*voluntair*).

Pendapat Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata selanjutnya mengemukakan bahwa membuktikan suatu peristiwa, mengenai adanya hubungan hukum adalah suatu cara untuk menyakinkan hakim akan kebenaran dalil-dalil yang menjadi dasar gugat, atau dalil-dalil yang dipergunakan untuk menyangkal tentang kebenaran dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh pihak lawan⁹⁷. Sudikno Mertokusumo berpendapat definisi membuktikan mengandung beberapa macam pengertian yaitu;

- 1.) Kata membuktikan dikenal dalam arti logis atau ilmiah. Membuktikan berarti memberi kepastian yang bersifat mutlak karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti lawan. Berdasarkan suatu aksioma yaitu, asas-asas umum yang dikenal dalam ilmu pengetahuan, dimungkinkan adanya

⁹⁵Teguh Samudera, *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*, (Cet. I; Bandung: Alumni, 1992), h. 12.

⁹⁶Alimuddin, *Pembuktian anak dalam Acara Peradilan Agama*. (Cet. I; Bandung: Nuansa Aulia, 2014), h. 22.

⁹⁷Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. (Cet. IX; Bandung: Mandar Maju, 2002), h. 59.

bukti lawan. Berdasarkan suatu aksioma bahwa dua garis sejajar tidak mungkin bersilang dapat dibuktikan bahwa dua kaki dari sebuah segitiga tidak mungkin sejajar. Terhadap pembuktian ini tidak dimungkinkan adanya bukti lawan, kecuali pembuktian itu berlaku bagi setiap orang. Di sini aksioma dihubungkan menurut ketentuan-ketentuan logika dengan pengamatan-pengamatan yang diperoleh dari pengalaman, sehingga diperoleh kesimpulan-kesimpulan yang memberi kepastian mutlak.

- 2.) Kata membuktikan dikenal dalam arti konvensional. Di sini membuktikan berarti juga memberi kepastian. Hanya saja bukan kepastian mutlak, melainkan kepastian yang bersifat nisbi atau relatif, yang mempunyai tingkatan-tingkatan.
 - a. Kepastian yang didasarkan atas perasaan belaka, karena didasarkan atas perasaan, kepastian ini bersifat intuitif dan disebut *conviction in time*.
 - b. Kepastian yang didasarkan atas pertimbangan akal sehingga disebut *conviction rasonne*.
- 3.) Membuktikan dalam hukum acara mempunyai arti yuridis. Didalam ilmu hukum tidak dimungkinkan adanya pembuktian yang logis dan mutlak berlaku bagi setiap orang serta, menutup segala kemungkinan akan bukti lawan. Akan tetapi, merupakan pembuktian yang konvensional yang bersifat khusus. Pembuktian dalam arti yuridis ini hanya berlaku bagi pihak-pihak yang berperkara atau yang memperoleh hak dari mereka. Dengan demikian, pembuktian dalam arti yuridis tidak menuju kepada kebenaran mutlak. Ada kemungkinannya bahwa pengakuan, kesaksian, atau surat-surat itu tidak benar atau dipalsukan. Maka dalam hal ini dimungkinkan adanya bukti lawan. Pembuktian secara yuridis tidak lain merupakan pembuktian historis. Pembuktian yang bersifat historis ini mencoba menetapkan apa yang telah terjadi secara *konkreto*. Baik dalam pembuktian yuridis maupun ilmiah, membuktikan pada hakikatnya berarti mempertimbangkan secara logis mengapa peristiwa-peristiwa tertentu dianggap benar.
 - a. Dalam pembuktian secara yuridis, sering terjadi bahwa pengamatannya sebagai dasar pembuktian tidak bersifat langsung didasarkan atas penglihatan, tetapi didasarkan atas kesaksian orang lain. Kecuali itu dipisahkan antara pihak yang mengajukan alat-alat bukti dan pihak yang harus menetapkan bahwa sesuatu telah terbukti.
 - b. Membuktikan dalam arti yuridis tidak lain berarti memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran yang diajukan⁹⁸.

⁹⁸Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia edisi revisi*. (Cet. V; Yogyakarta; Cahaya Atma Pustaka, 2013), h. 142-144.

Pembuktian perdata menurut Achmad Ali dan Wiwie Heryani adalah upaya yang dilakukan oleh para pihak untuk menyelesaikan persengketaan mereka atau untuk memberi kepastian tentang benar terjadinya peristiwa hukum tertentu, dengan menggunakan alat bukti yang ditentukan hukum, sehingga dapat dihasilkan suatu penetapan atau putusan oleh pengadilan⁹⁹.

H. Drion mengemukakan pendapat yang cukup menarik mengenai definisi pembuktian. Lebih lanjut H. Drion menyatakan bahwa pembuktian yuridis adalah pembuktian yang bersifat historis, karena yang hendak dibuktikan dalam suatu persengketaan perdata ataupun pidana adalah “sesuatu yang sudah terjadi”, sesuatu yang sudah berada dimasa silam. Jadi, pembuktian yuridis yang bersifat historis mencoba menetapkan apa yang terjadi secara *in-concreto*¹⁰⁰.

Pendapat M. Natsir Asnawi menyimpulkan pembuktian sebagai proses menghadirkan alat-alat bukti yang diatur menurut hukum acara di dalam persidangan pengadilan yang bertujuan untuk meyakinkan hakim akan kebenaran dalil-dalil dari masing-masing pihak¹⁰¹. Pendapat Abdul Kadir Muhammad menyatakan pembuktian adalah suatu proses pengungkapan fakta-fakta yang menyatakan suatu peristiwa hukum sudah benar terjadi. Peristiwa hukum yang sudah

⁹⁹Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Asas-asas Hukum Pembuktian Perdata* (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2013), h. 21.

¹⁰⁰Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Asas-asas Hukum Pembuktian Perdata*, h. 17.

¹⁰¹M. Natsir Asnawi, *Hukum Pembuktian Perkara Perdata di Indoensia : Kajian Kontekstual mengenai Sistem, Asas, Prinsip, Pembebanan, dan Standar Pembuktian*, h. 3.

terjadi itu dapat berupa perbuatan, kejadian, atau keadaan tertentu seperti yang diatur oleh hukum¹⁰².

Mengacu kepada definisi pembuktian yang telah dikemukakan oleh para pakar maupun praktisi hukum di atas, penulis menyimpulkan pembuktian adalah serangkaian tindakan dalam persidangan antara pihak-pihak yang berperkara dengan perantaraan hakim untuk menghadirkan alat bukti yang diakui oleh undang-undang guna memberikan titik terang atas peristiwa hukum yang telah terjadi antara pihak-pihak yang bersengketa dalam perkara *contentiosa* atau pihak pemohon dalam perkara *voluntair*.

Sementara itu, H. P. Panggabean mengemukakan pendapat berbeda yang menyatakan bahwa dalam peradilan *voluntair* (perkara permohonan) seperti yang disebutkan pada umumnya, hukum pembuktian tidak berlaku baik yang dimuat dalam KUH Perdata, HIR, dan Undang-undang lainnya, karena proses penanganan peradilan *voluntair* adalah ditujukan untuk mendapatkan penetapan hakim yang bersifat administratif, seperti dalam perkara permohonan penetapan pengangkatan pengampu (pasal 27 HIR) dan permohonan pemisahan budel (pasal 263 HIR)¹⁰³. Wirjono Prodjodikoro mengemukakan pendapat yang sama, yakni dalam hal suatu perkara yang tidak terdapat seorang tergugat, maka tidak dapat dikatakan sebagai

¹⁰²Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, h. 125.

¹⁰³H. P. Panggabean, *Hukum Pembuktian: Teori-Praktik dan Yurisprudensi Indonesia*, h. 26.

perkara perdata. Dalam hal ini tugas dan peranan pengadilan negeri tidak bertindak sebagai hakim, melainkan sebagai penguasa tata usaha¹⁰⁴.

Uraian pendapat yang telah dikemukakan seperti di atas, bertolak belakang dengan pendapat yang dikemukakan oleh M. Yahya Harahap. M. Yahya Harahap mengemukakan pendapatnya, bahwa prinsip dan sistem pembuktian yang harus ditegakkan dan diterapkan dalam perkara permohonan (*voluntair*) adalah:

1.) Pembuktian harus berdasarkan alat bukti yang ditentukan Undang-undang

Sesuai yang dirinci secara enumeratif dalam pasal 164 HIR (pasal 284 RGB) [*sic*], atau pasal 1866 KUH perdata alat bukti yang sah terdiri atas:

- a.) Tulisan (akta)
- b.) Keterangan saksi
- c.) Persangkaan
- d.) Pengakuan
- e.) Sumpah¹⁰⁵

2.) Ajaran pembuktian berdasarkan pasal 163 HIR (pasal 203 RGB) [*sic*] atau pasal 1865 KUH Perdata

Dalam hal ini, sepenuhnya beban wajib bukti, (*bewijslast, burden of proof*) dibebankan kepada pemohon¹⁰⁶.

¹⁰⁴Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. (Cet. X; Bandung: Sumur, 1978), h. 18.

¹⁰⁵M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (Cet. XII; Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 40.

¹⁰⁶M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* h. 40.

- 3.) Nilai kekuatan dalam proses pembuktian yang sah, harus mencapai batas minimal pembuktian

Alat bukti yang diajukan pemohon hanya bernilai sebagai alat bukti permulaan atau alat bukti yang diajukan hanya satu saksi (*unus testis*) tanpa alat bukti yang lain, dalam hal seperti ini alat bukti yang harus diajukan oleh pemohon belum mencapai batas minimal untuk membuktikan dalil permohonan¹⁰⁷.

- 4.) Yang sah sebagai alat bukti, hanya terbatas pada alat bukti yang memenuhi syarat formil dan materil.

Paling tidak asas dan sistem pembuktian yang jelas di atas, harus ditegakkan dan diterapkan pengadilan dalam memutus dan menyelesaikan permohonan¹⁰⁸.

Berdasarkan uraian pendapat yang dikemukakan oleh M. Yahya Harahap diatas dalam hal perkara permohonan (*voluntair*), dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa proses pembuktian dalam perkara permohonan (*voluntair*) seperti yang diatur dalam hukum acara perdata, wajib menerapkan alat bukti yang memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti yang sah. Adanya anggapan yang menyatakan bahwa dalam suatu perkara permohonan (*voluntair*) tugas hakim hanya bersifat administratif, menurut hemat penulis juga tidak sepenuhnya benar, karena hasil akhir dalam suatu perkara permohonan berupa penetapan (*beschikking*) dan dalam perkara gugatan (*contentiosa*) berupa putusan (*vonnis*), keduanya merupakan akta autentik yaitu, akta yang dibuat oleh pejabat yang telah diberi wewenang untuk melaksanakan tugas tersebut.

Hasil akhir dalam suatu perkara permohonan (*voluntair*) berupa penetapan (*beschikking*) yang bersifat menerangkan suatu keadaan (*declaratoir*). Sementara itu,

¹⁰⁷M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, h. 40.

¹⁰⁸M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, h. 40.

suatu putusan pengadilan (*vonnis*) jika ditinjau berdasarkan sifatnya, terdapat putusan yang bersifat *declaratoir* yang berarti pernyataan yang bersifat menerangkan sesuatu¹⁰⁹, seperti menyatakan tergugat telah *wanprestasi*, atau menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.

2. *Dasar Pembuktian*

Sebagai tahapan dalam proses beracara yang memiliki urgensi yang sangat penting, pembuktian adalah proses dimana tahapan serta, muara putusan hakim akan diketahui. Terhadap putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), akan dilaksanakan tahap pelaksanaan putusan (eksekusi). Tugas dan peranan seorang hakim dalam menangani suatu perkara adalah harus melihat sejauhmana dalil-dalil persengketaan di antara para pihak yang terbukti, sehingga hakim akan menetapkan pihak yang kemudian berhak untuk dimenangkan dalam suatu putusan pengadilan.

Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada Bab II tentang Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman, dalam pasal 3 ayat (2) disebutkan bahwa “Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar Kekuasaan Kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Ketentuan dalam pasal di atas, memberikan suatu penegasan bahwa lembaga peradilan merupakan lembaga negara yang bersifat independen, serta bebas dari

¹⁰⁹D. Y. Witanto, *Hukum Acara Perdata tentang Ketidakhadiran Para Pihak dalam Proses Berperkara (Gugur dan Verstek)*, (Cet.I; Bandung: Mandar Maju, 2013), h. 23.

campur tangan pihak lain diluar kekuasaan kehakiman. Sebagai lembaga negara, pengadilan dalam tataran kekuasaan yudikatif memiliki peranan penting dalam menerima, memeriksa, memutus, serta menyelesaikan persengketaan yang diajukan kepadanya. Hal ini berarti, setiap proses pemeriksaan perkara di pengadilan memiliki acuan standar pemeriksaan perkara yang harus dipatuhi dan mengikat terhadap para pihak termasuk majelis hakim. Pengabaian terhadap ketentuan hukum acara sebagai acuan dalam pemeriksaan perkara di pengadilan, mengakibatkan putusan (*vonnis*) yang dijatuhkan majelis hakim “batal demi hukum”.

Pembuktian sebagai ketentuan dalam tahapan hukum acara yang berlaku di pengadilan, terikat terhadap aturan yang mengatur masalah pembuktian, mulai dari jenis alat bukti, beban pembuktian, kekuatan pembuktian serta hal yang berkaitan dengannya telah ditentukan dalam ketentuan pokok hukum acara. Hal ini dapat dipahami bahwa proses pembuktian memiliki aturan kodifikasi tersendiri seperti halnya dalam tahapan pemeriksaan perkara yang lain.

Indonesia sebagai bekas negara jajahan Belanda, menganut sistem hukum Belanda (Eropa Kontinental)¹¹⁰ dan mengadopsi berbagai aturan hukum yang pernah diberlakukan oleh Belanda dalam berbagai kitab kodifikasi. Keberadaan kitab kodifikasi tersebut tersebar dalam berbagai aturan pemeriksaan perkara dan kitab

¹¹⁰Achmad Ali berpendapat bahwa sistem hukum Indonesia menganut paham *legal mixed system*. Hal ini dapat ditelusuri dari sistem hukum perundang-undangan, hukum adat, dan hukum Islam. Selengkapnya lihat dalam Achamd Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence): Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*. (Edisi I, Cet. III; Jakarta: Kencana, 2009), h. 203.

hukum acara yang saat ini sebagian telah ditinggalkan karena, dianggap tidak mampu menyesuaikan dengan aspirasi masyarakat global serta, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan Indonesia. Tidak seperti halnya dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang telah memiliki kitab kodifikasi tersendiri sebagai mahakarya bangsa Indonesia, yang telah menggantikan kedudukan HIR dan RBg dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981. Ketentuan mengenai undang-undang tersebut mengatur tentang proses pemeriksaan perkara pidana maka, secara otomatis aturan pemeriksaan pidana yang termaktub dalam HIR dan RBg dinyatakan tidak berlaku.

Keadaan seperti yang telah diterangkan di atas, berbeda halnya dengan hukum acara perdata, sampai saat ini belum ada satu kitab khusus yang mengatur secara rinci mengenai pemeriksaan perkara perdata di pengadilan. Aturan pemeriksaan perkara perdata masih tersebar dalam beragam kitab kodifikasi seperti, HIR, RBg, WvK, Rv, KUH Perdata serta, termuat dalam beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung. Sebenarnya, rancangan kitab undang-undang hukum acara perdata telah ada, namun belum disahkan oleh Dewan perwakilan Rakyat (DPR) mengingat fenomena yang terjadi di DPR adalah beragam kristalisasi kepentingan, dan tentunya fenomena ini tidak bisa dilepaskan dari aspek politik hukum yang terjadi.

Aturan pembuktian yang tersebar dalam beragam kitab tersebut dapat penulis kemukakan sebagai berikut;

1.) Perihal Menerima atau Menolak Alat Bukti

a.) Pasal 162 HIR

Tentang bukti dan hal menerima atau menolak alat bukti dalam perkara perdata pengadilan negeri wajib memperhatikan peraturan pokok seperti di bawah ini.

b.) Pasal 282 RBg

Terhadap soal bukti dan penerimaan atau penolakan alat bukti dalam perkara perdata yang menjadi wewenang hakim distrik, pengadilan distrik, peradilan oleh jaksa dan peradilan negeri harus diperhatikan peraturan-peraturan pokok sebagai berikut.

2.) Perihal Membuktikan

a.) Pasal 163 HIR

Barangsiapa yang mempunyai sesuatu hak atau menyebutkan suatu kejadian untuk meneguhkan hak itu atau membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak itu atau kejadian itu”.

b.) Pasal 283 RBg

Barangsiapa yang beranggapan mempunyai sesuatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain harus membuktikan hak atau keadaan itu.

c.) Pasal 1865 KUH Perdata

Setiap orang yang mengaku mempunyai sesuatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu, atau membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu.

d.) Putusan MARI Nomor 1897 K/Sip/1956, tanggal 30 Desember 1957¹¹¹

Dalam sengketa jual beli dimana pihak pembeli mendalihkan bahwa ia belum menerima seluruh barang yang dibelinya menurut kontrak, sedang pihak penjual membantah dengan mengemukakan bahwa ia telah menyerahkan seluruh barang yang dijualbelikan, pihak pembeli harus dibebani pembuktian mengenai adanya kontrak dan pembayaran yang telah dilakukan sedang pihak penjual mengenai barang-barang yang telah diserahkannya”.

e.) Putusan MARI Nomor 108 K/Sip/1954, tanggal 10 Januari 1957¹¹²

¹¹¹Hari Sasangka dan Ahmad Rifai, *Perbandingan HIR dengan RBG: Disertai dengan Yurisprudensi MARI dan Kompilasi Peraturan Hukum Acara Perdata*, (Cet. I; Bandung: Mandar Maju, 2005), h. 97.

¹¹²Hari Sasangka dan Ahmad Rifai, *Perbandingan HIR dengan RBG: Disertai dengan Yurisprudensi MARI dan Kompilasi peraturan Hukum Acara Perdata*, h. 97.

Pihak yang mendalihkan bahwa cap dagang yang telah didaftarkan oleh pihak lawan telah tiga tahun lamanya tidak dipakai, harus membuktikan adanya *non-usus* selama tiga tahun itu; dan tidaklah tepat bila dalam hal ini beban pembuktian diserahkan kepada pihak lawan, ialah untuk membuktikan bahwa ia selama tiga tahun itu secara terus-menerus menggunakan cap dagang termaksud.

f.) Putusan MARI Nomor 22 K/Sip/1973, tanggal 25 November 1976¹¹³

Dalam hal ada pengakuan yang terpisah-pisah, hakim bebas untuk menentukan berdasarkan rasa keadilan pada siapa harus dibebankan pembuktian.

3.) Perihal Alat-alat Bukti

a.) Pasal 164 HIR

Alat-alat bukti yaitu; bukti tulisan, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, sumpah, semuanya dengan memperhatikan peraturan yang diperintahkan dalam pasal-pasal berikut.

b.) Pasal 284 RBg

Alat-alat bukti terdiri dari; bukti tertulis, bukti dengan saksi, persangkaan, pengakuan-pengakuan, sumpah, semuanya dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal ini”.

c.) Pasal 1866 KUH Perdata

Alat pembuktian meliputi; bukti tertulis, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, sumpah, semuanya tunduk pada aturan-aturan yang tercantum dalam bab-bab berikut.

4.) Perihal Akta autentik

a.) Pasal 164 HIR

Akta autentik, yaitu suatu surat yang dibuat oleh atau dihadapan pegawai umum yang berwenang untuk membuatnya, mewujudkan bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli waris masing-masing serta sekalian orang yang mendapat hak darinya tentang segala hal yang disebut dalam surat itu dan tentang hal yang tercantum dalam surat itu sebagai pemberitahuan; tetapi yang tersebut terakhir hanya sekedar diberitahukan itu langsung menyangkut pokok akta itu.

b.) Pasal 285 RBg

Sebuah akta autentik, yaitu yang dibuat dengan bentuk yang sesuai dengan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang di tempat akta itu dibuat, merupakan bukti lengkap antara para pihak serta keturunannya

¹¹³Hari Sasangka dan Ahmad Rifai, *Perbandingan HIR dengan RBG: Disertai dengan Yurisprudensi MARI dan Kompilasi Hukum Acara Perdata*, h. 98.

dan mereka yang mendapatkan hak tentang apa yang dimuat di dalamnya dan bahkan tentang suatu pernyataan belaka, hal terakhir ini sepanjang dengan pernyataan itu ada hubungan langsung dengan apa yang menjadi pokok akta itu

c.) Pasal 1868 KUH Perdata

Suatu akta autentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.

d.) Pasal 1870 KUH Perdata

Bagi para pihak yang berkepentingan beserta para ahli warisnya ataupun bagi orang-orang yang mendapatkan hak dari mereka, suatu akta otentik memberikan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya.

5.) Perihal Akta Bawah Tangan

a.) Pasal 286 RBg

(1). Akta-akta di bawah tangan adalah akta-akta yang ditanda tangani di bawah tangan, surat-surat, daftar-daftar, surat-surat mengenai rumah tangga dan surat lain yang dibuat tanpa campur tangan pejabat pemerintah.

(2). Cap jari yang dibubuhkan di bawah surat di bawah tangan disamakan dengan tanda tangan asal disahkan dengan surat keterangan yang bertanggal oleh notaris atau pejabat lain yang ditunjuk oleh undang-undang dan menerangkan bahwa ia mengenal pemberi cap jari, atau yang diperkenalkan padanya, dan bahwa isi akta itu telah dijelaskan kepada si pembubuh cap jari dan bahwa cap jari tersebut dibubuhkan dihadapannya.

(3). Pejabat tersebut membukukan surat itu.

(4). Pernyataan serta pembukuannya dilakukan menurut apa yang telah ditentukan dalam ordonansi atau menurut apa yang akan ditentukan peraturan perundang-undangan.

b.) Pasal 1874 KUH Perdata

Yang dianggap sebagai tulisan di bawah tangan adalah akta yang ditanda tangani di bawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan lain yang dibuat tanpa peraturan seorang pejabat umum. Dengan penandatanganan sebuah tulisan di bawah tangan disamakan pembubuhan suatu cap jempol dengan suatu pernyataan yang bertanggal dari seseorang notaris atau seorang pejabat lain yang ditunjuk undang-undang, yang menyatakan bahwa pembubuh cap jempol tersebut dikenalnya atau telah diperkenalkan kepadanya, bahwa isi akta telah dijelaskan kepada orang itu, dan bahwa setelah itu cap jempol tersebut dibubuhkan pada tulisan tersebut di hadapan pejabat yang bersangkutan. Pegawai ini harus membukukan tulisan

tersebut. Dengan undang-undang dapat diadakan aturan-aturan lebih lanjut tentang pernyataan dan pembukuan termaksud.

6.) Perihal 1 (satu) Orang Saksi

a.) Pasal 169 HIR

Keterangan dari seorang saksi saja, tanpa suatu alat bukti lain tidak dapat dipercaya dalam hukum.

b.) Pasal 307 RBg

Keterangan satu orang saksi tanpa alat bukti lain, menurut hukum tidak boleh dipercaya.

c.) Pasal 1905 KUH Perdata

Keterangan seorang saksi saja, tanpa alat pembuktian lain dalam pengadilan tidak boleh dipercaya.

7.) Perihal Kesaksian beberapa Orang yang berkaitan

a.) Pasal 170 HIR

Jika kesaksian-kesaksian yang berpisah-pisah dan berdiri sendiri dari beberapa orang tentang beberapa kejadian dapat meneguhkan perkara tertentu karena kesaksian-kesaksian itu sesuai dan berhubungan satu sama lain, maka kekuatan bukti hukum sepanjang yang akan diberikan pada kesaksian yang beraneka ragam itu, diserahkan kepada pertimbangan hakim berhubung dengan keadaan.

b.) Pasal 307 RBg

Jika kesaksian-kesaksian beberapa orang terpisah dan berdiri sendiri mengenai berbagai peristiwa karena keterkaitannya dan hubungannya digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan maka hakim mempunyai kebebasan untuk memberi kekuatan pembuktian terhadap kesaksian masing-masing, segala sesuatu memperhatikan keadaan.

c.) Pasal 1906 KUH Perdata

Jika kesaksian-kesaksian berbagai orang mengenai berbagai peristiwa terlepas satu sama lain, dan masing-masing berdiri sendiri, namun menguatkan suatu peristiwa tertentu karena mempunyai kesesuaian dan hubungan satu sama lain maka, hakim menurut keadaan bebas untuk memberikan kekuatan pembuktian kepada kesaksian-kesaksian yang berdiri sendiri itu.

8.) Perihal Syarat suatu Kesaksian

a.) Pasal 171 HIR

(1) Tiap-tiap kesaksian harus disertai keterangan tentang bagaimana saksi mengetahui kesaksiannya.

(2) Pendapat atau dugaan khusus yang timbul dari pemikiran, tidak dipandang sebagai kesaksian.

b.) Pasal 308 RBg

- (1) Tiap-tiap kesaksian harus disertai alasan mengenai pengetahuan saksi.
- (2) Pendapat-pendapat khusus serta perkiraan-perkiraan yang disusun berdasarkan pemikiran bukan kesaksian.

c.) Pasal 1907 KUH Perdata

- (1) Tiap-tiap kesaksian harus disertai keterangan tentang bagaimana saksi mengetahui kesaksiannya.
- (2) Pendapat maupun dugaan khusus, yang diperoleh dengan memakai pikiran, bukanlah suatu kesaksian.

d.) Putusan MARI Nomor 308 K/Sip/1959, tanggal 11 November 1959¹¹⁴

Testimonium de auditu tidak dapat digunakan sebagai bukti langsung, tetapi penggunaan kesaksian yang bersangkutan sebagai persangkaan yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu, tidaklah dilarang.

9.) Perihal Nilai Kesaksian

a.) Pasal 172 HIR

Dalam hal menimbang nilai kesaksian itu, hakim harus memperhatikan; cocoknya para saksi satu sama lain, kesesuaian kesaksian-kesaksian mereka dengan apa yang diketahui dari sumber lain tentang perkara yang bersangkutan; semua alasan para saksi untuk menerangkan duduk perkaranya dengan cara begini atau begitu; peri kehidupan, adat istiadat, dan kedudukan para saksi pada umumnya, segala hal yang dapat menyebabkan saksi itu dapat dipercayai atau kurang dipercayai.

b.) Pasal 309 RBg

Dalam menilai kekuatan kesaksian, hakim harus memperhatikan secara khusus kesesuaian saksi yang satu dengan yang lain; persamaan kesaksian-kesaksian itu dengan hal-hal yang dapat ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan, alasan-alasan yang dikemukakan saksi sehingga ia dapat mengemukakan hal-hal seperti itu; cara hidup, kesusilaan, dan kedudukan saksi dan pada umumnya yang semua sedikit banyak dapat berpengaruh atas dapat tidaknya dipercaya.

c.) Pasal 1908 KUH Perdata

Dalam mempertimbangkan suatu kesaksian, hakim harus memberikan perhatian khusus pada kesesuaian kesaksian-kesaksian satu sama lain; pada persamaan antara kesaksian-kesaksian dan apa yang diketahui dari sumber lain tentang pokok perkara; pada alasan-alasan yang kiranya telah mendorong para saksi untuk menerangkan duduknya perkara secara begini atau secara begitu;

¹¹⁴Hari Sasangka dan Ahmad Rifai, *Perbandingan HIR dengan RBG: Disertai dengan Yurisprudensi MARI dan Kompilasi Peraturan Hukum Acara Perdata*, h. 115.

pada peri kehidupan, kesusilaan dan kedudukan para saksi; dan umumnya pada apa saja yang mungkin ada pengaruhnya terhadap dapat tidaknya para saksi itu dipercaya.

10.) Perihal Persangkaan

a.) Pasal 173 HIR

Dugaan-dugaan yang tidak berdasarkan suatu peraturan undang-undang, hanya boleh diperhatikan oleh hakim dalam menjatuhkan putusannya, jika dugaan-dugaan itu penting, saksama, tertentu dan sesuai satu sama lain.

b.) Pasal 310 RBg

Persangkaan/dugaan belaka yang tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan hanya boleh digunakan hakim dalam memutus perkara suatu perkara jika itu sangat penting, cermat, tertentu, dan bersesuaian satu dengan yang lain.

c.) Pasal 1915 KUH Perdata

Persangkaan ialah kesimpulan yang oleh undang-undang atau oleh hakim ditarik dari suatu peristiwa yang diketahui umum ke arah suatu peristiwa yang tidak diketahui umum.

Ada dua macam persangkaan yaitu; persangkaan yang berdasarkan undang-undang dan persangkaan yang tidak berdasarkan undang-undang.

11.) Perihal Pengakuan

a.) Pasal 174 HIR

Pengakuan yang diucapkan di hadapan hakim, cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, entah pengakuan itu diucapkannya sendiri, entah dengan perantaraan orang lain yang diberi kuasa khusus.

b.) Pasal 311 RBg

Pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus.

c.) Pasal 1925 KUH Perdata

Pengakuan yang diberikan di hadapan hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu.

d.) Putusan MARI Nomor 288 K/Sip/1973, tanggal 16 Desember 1975¹¹⁵

¹¹⁵Hari Sasangka dan Ahmad Rifai, *Perbandingan HIR dengan RBG: Disertai dengan Yurisprudensi MARI dan Kompilasi Peraturan Hukum Acara Perdata*, h. 116.

Berdasarkan yurisprudensi tetap mengenai hukum pembuktian dalam acara khususnya pengakuan, hakim berwenang menilai suatu pengakuan sebagai tidak mutlak karena diajukan tidak sebenarnya. Hal bilamana terhadap suatu pengakuan yang diajukan tidak dengan sebenarnya merupakan wewenang *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi.

Pengadilan Tinggi mempertimbangkan; bahwa pengakuan tergugat 1 - turut terbanding, yang memihak para penggugat-terbanding, tidak disertai alasan-alasan yang kuat (*met redenen omkleed*) maka menurut hukum tidak dapat dipercaya.

12.) Perihal Sumpah

a.) Pasal 177 HIR

Dari orang yang di dalam suatu sidang telah mengangkat sumpah yang dibebankan atau dikembalikan kepadanya oleh lawannya atau dibebankan kepadanya oleh hakim, tidak boleh diminta keterangan lain untuk meneguhkan kebenaran sumpahnya.

b.) Pasal 314 RBg

Dari seorang yang dalam suatu perkara mengucapkan sumpah yang dibebankan kepadanya oleh pihak lawannya atau yang mengembalikan wajib sumpah itu kepada lawannya atau yang oleh hakim diperintahkan mengangkat sumpah, tidak boleh dimintakan bukti lain untuk menguatkan apa yang telah diucapkan dengan sumpah sebagai hal yang benar.

c.) Pasal 1929 KUH Perdata

Ada dua sumpah di hadapan hakim;

- (1.) Sumpah yang diperintahkan oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain untuk pemutusan suatu perkara; sumpah ini disebut sumpah pemutus.

Sumpah yang diperintahkan oleh hakim karena jawabannya kepada salah satu pihak.

3. *Jenis Alat Bukti*

Definisi kata bukti, pembuktian atau membuktikan dalam hukum Inggris sering menggunakan istilah dua perkataan, yaitu: *proof* dan *evidence*. Adapun dalam

Hukum Belanda disebut dengan *bewijs*¹¹⁶. Selanjutnya, menurut Milton M. Jacobs membedakan *proof* dan *evidence* sebagai berikut;

“Evidence is the medium of proof, proof is the effect of evidence”

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan oleh Milton M. Jacobs di atas, dapat disimpulkan bahwa *evidence* adalah “alat bukti” sedangkan *proof* adalah hasil atau akibat yang timbul dari alat bukti¹¹⁷. Lebih lanjut Milton M. Jacobs mengatakan *evidence* merupakan penggunaan umum bagi pembuktian yang terjadi di muka pengadilan atau proses pengadilan¹¹⁸.

Proses pembuktian dalam perkara perdata yang mengacu kepada pencarian kebenaran formil, terikat terhadap jenis alat bukti yang telah ditentukan undang-undang. Pembuktian perkara perdata yang berdasar kepada alat bukti limitatif seperti yang telah ditentukan dalam HIR, RBg, dan KUH Perdata. Mengingat adanya keterbatasan dalam penunjukan alat bukti tersebut, serta memperhatikan disatu sisi adanya pengaruh globalisasi sebagai akibat kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), maka dipandang perlu untuk memperluas ragam alat bukti dalam aturan pembuktian perdata.

Perbedaan proses pembuktian dalam acara pidana dan perdata dapat ditelusuri dari sistem pembuktian pidana yang menganut sistem pembuktian negatif (*negatief wettelijk bewijsleer*), yang ingin dicapai oleh hakim adalah kebenaran

¹¹⁶ Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Asas-asas Hukum Pembuktian Perdata*, h. 15.

¹¹⁷ Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Asas-asas Hukum Pembuktian Perdata*, h. 20.

¹¹⁸ Achmad Ali dan Wiwie heryani, *Asas-asas Hukum Pembuktian Perdata*, h. 20.

materil,¹¹⁹ lebih lanjut dikatakan bahwa yang dimaksud sistem pembuktian negatif (*negatief wettelijk bewijsleer*) adalah suatu sistem pembuktian di depan pengadilan agar suatu pidana dapat dijatuhkan oleh hakim, harus memenuhi dua syarat mutlak yaitu, alat bukti yang cukup dan keyakinan hakim¹²⁰.

M. Yahya Harahap mengemukakan bahwa sistem pembuktian negatif adalah penggabungan secara terpadu sistem pembuktian menurut keyakinan dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif. Hasil dari penggabungan antara kedua sistem yang saling bertolak belakang tersebut, mewujudkan sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Rumusan mengenai sistem pembuktian negatif berbunyi “Salah tidaknya seorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang”¹²¹. Dengan demikian, sistem ini memadukan unsur “objektif” dan “subjektif” dalam menetapkan salah atau tidaknya terdakwa. Lebih lanjut dikatakan dalam sistem pembuktian negatif tidak ada yang paling dominan diantara kedua unsur tersebut¹²².

Eksistensi penerapan hukum acara sebagai perangkat/kumpulan aturan untuk menegakkan hukum materil dalam praktik persidangan sangat dibutuhkan. Hal ini

¹¹⁹Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian: Pidana dan Perdata*, h. 2.

¹²⁰Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian: Pidana dan Perdata*, h. 2.

¹²¹M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali* (Cet. XIII; Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 279.

¹²²M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, h. 279.

diharapkan agar penerapan hukum acara sebagai ujung tombak pelaksanaan dan penjaminan hukum materil agar lebih teratur, sistematis dan terarah dapat tercapai. Munculnya tindak pidana kejahatan melalui dunia maya, dan laju kehidupan manusia yang semakin hari semakin berkembang membuat kejahatan yang terjadi di tengah masyarakat semakin berkembang pula. Keadaan ini menurut hemat penulis dapat dikatakan sebagai suatu keadaan sebab-akibat. Penjelasan ini dapat dijabarkan secara sederhana sebagai berikut; kejahatan yang muncul melalui dunia maya disebabkan karena adanya perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), sehingga akibat dari munculnya kejahatan tersebut dari aspek legalitas yakni, suatu kejahatan tidak dapat dipidanakan apabila belum ada pengaturannya sama sekali.

Kehadiran HIR yang kemudian dinyatakan tidak berlaku sejak Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) diundangkan, belum dapat memberikan solusi terhadap problem yang terjadi dalam masyarakat dewasa ini. Perihal pembuktian yang diatur dalam Kitab hukum acara tersebut belum dapat menjangkau kebutuhan hukum di era globalisasi. Munculnya tindak pidana kejahatan mayantara (*cybercrime*) dimana seorang pelaku kejahatan dapat melakukan perbuatan pidana seperti, pencurian, pembobolan, perjudian, dan penipuan melalui internet maupun dalam bentuk transaksi elektronik lainnya, membawa problem tersendiri di era globalisasi. Pengaturan tindak pidana kejahatan mayantara (*cybercrime*) yang belum terlintas dibenak para legislator dan penyusun HIR termasuk KUHAP sendiri membawa dampak tersendiri. Keadaan

seperti ini jika secara cermat tidak dianulir maka, akan membahayakan aspek kehidupan manusia dan masyarakat.

Problematika mendasar sebagai upaya terhadap munculnya tindak pidana kejahatan maya antara (*cybercrime*) apabila dihubungkan dengan aspek legalitas dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) maka, akan ditemui kesulitan untuk menjerat pelaku tindak pidana (kriminal) yang dilakukan di dunia maya. Kesulitan yang dimaksud adalah perihal yang berkaitan dengan masalah pembuktian¹²³. Selain itu, eksistensi pasal 1 ayat (1) KUHP sebagai asas legalitas dalam perkara pidana, mengakibatkan adanya problem untuk menjerat pelaku secara yuridis. Rumusan pasal 1 ayat (1) KUHP menyebutkan bahwa;

“Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada”.

Mencermati rumusan pasal 1 ayat (1) KUHP di atas, dapat disimpulkan bahwa suatu perbuatan tidak dapat di pidana, apabila belum ada ketentuan yang mengaturnya. Ketentuan ini memiliki urgensi mendasar dalam memberikan kepastian hukum kepada setiap perbuatan yang dilakukan oleh individu tertentu. Selain itu, ketentuan dalam pasal di atas, bertujuan untuk mengatur pola kehidupan masyarakat. Mengingat adanya aspek legalitas dalam suatu perbuatan pidana, maka dipandang perlu untuk memberikan rumusan yang jelas terhadap segala macam

¹²³Budi Suharyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime): Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya* (Cet. II; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h. 73.

perbuatan yang merupakan perbuatan pidana atau perbuatan yang diatur oleh hukum, guna mencegah tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*).

Urgensi pengaturan tentang pembuktian dalam tindak pidana melalui dunia maya (*cybercrime*) merupakan suatu hal yang harus diakomodasi, karena modus operandi dari pelaku kejahatan di era globalisasi yang semakin canggih, serta munculnya suatu tatanan dunia baru yang seolah-olah tanpa sekat (*borderless*), mengakibatkan kehadiran hukum sebagai sebuah pranata memegang peranan penting dalam mengatur laju kehidupan masyarakat yang semakin berkembang. Keberadaan hukum acara sebagai seperangkat aturan untuk menegakkan hukum materil harus mampu menjangkau problem yang dihadapi masyarakat.

Terlepas dari adanya perbedaan pendapat di antara kalangan ahli hukum tentang perlunya hukum acara mengadakan penyesuaian untuk mengakomodasi realitas di era globalisasi, satu hal yang perlu diperhatikan bahwa KUHP dan KUHAP adalah hukum publik yang mengatur kepentingan umum. Dalam tulisan ini, penulis juga akan menguraikan tentang pembuktian perkara perdata. Seperti yang telah disebutkan di atas, pencarian kebenaran dalam perkara perdata bertujuan untuk mencapai kebenaran formil. Sementara sistem pembuktian perkara perdata menganut sistem pembuktian positif (*positief wettelijk bewijsleer*).

Kebenaran formil yang dimaksud adalah kebenaran yang ditentukan oleh undang-undang, yang berarti bahwa dalam perkara perdata alat bukti yang diajukan ke persidangan ditentukan masing-masing oleh para pihak dan hakim hanya menilai

pembuktian yang dilakukan di antara para pihak yang berperkara. Sifat hakim dalam perkara perdata hanya bersifat pasif, artinya luas sengketa ditentukan oleh para pihak sendiri dan hakim tidak diperbolehkan mengabulkan melebihi gugatan yang dituntut meskipun dalam fakta persidangan ternyata kerugian yang diderita oleh salah satu pihak melebihi dari *petitum* dalam gugatan.

Pembuktian perdata adalah rangkaian tahapan persidangan setelah proses mediasi, pembacaan gugatan dan jawaban tergugat, *replik*, dan *duplik*. Dalam tahapan ini para pihak diberi kesempatan untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya dan tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan bantahan atas dalil gugatan penggugat. Mencermati tahapan/rangkaian proses perkara perdata di pengadilan, dapat menimbulkan sebuah pertanyaan yang cukup fundamental yakni, apakah bagi hakim perdata tidak diperkenankan untuk melakukan pencarian kebenaran secara materil seperti dalam perkara pidana, untuk menjawab persoalan tersebut dapat dilihat dalam putusan MARI Nomor 3136 K/Pdt/1983 tanggal 6 Maret 1985 yang menyatakan tidak ada larangan bagi hakim pengadilan perdata untuk mencari dan menemukan kebenaran materil. Namun, apabila kebenaran materil tidak ditemukan, maka hakim dibenarkan mengambil putusan berdasarkan kebenaran formil¹²⁴.

Ketentuan dalam putusan Mahkamah Agung tersebut, memberikan gambaran bahwa pencarian kebenaran materil dalam perkara perdata pada hakikatnya tetap dibolehkan. Keadaan seperti ini, berbeda halnya dalam perkara pidana yang ingin

¹²⁴ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, h. 498.

mencari kebenaran yang bersifat materil dan wajib untuk diterapkan. Hal ini dapat dilihat dalam proses pemeriksaan perkara pidana di pengadilan. Kedudukan dari pengakuan terdakwa yang telah mengakui melakukan suatu perbuatan pidana, mengakibatkan hakim tidak terikat dengan pengakuan tersebut. Keadaan ini menuntut peranan hakim pengadilan pidana, harus mencari bukti sedemikian rupa yang menyatakan terdakwa secara materil telah melakukan tersebut. Sementara, suatu pengakuan dalam perkara perdata, bersifat mengikat bagi hakim dan para pihak yang berperkara, sehingga dengan adanya pengakuan salah satu pihak, harus diterima oleh hakim meskipun pengakuan tersebut adalah suatu kebohongan.

Tugas hakim pengadilan dalam memeriksa suatu perkara memiliki tiga tugas pokok yang harus dilakukan secara berurut dan sistematis yakni; *pertama*, mengkonstatir perkara, *kedua* mengkualifisir suatu perkara, dan yang *ketiga* adalah mengkonstituir suatu perkara¹²⁵. Tindakan hakim dalam tahapan mengkonstatir perkara adalah memilihat fakta/peristiwa yang diajukan para pihak yang berperkara. Selanjutnya hakim mengkualifisir fakta/peristiwa yang telah ditemukan tersebut untuk menemukan rangkaian peristiwa hukumnya dan bertujuan untuk menemukan hakum atas peristiwa tersebut. Tahapan mengkonstituir suatu perkara adalah tahapan dimana hakim memberikan putusan konstitusinya atau putusan hukumnya atas perkara yang telah dikonstatir dan dikualifisir tersebut.

¹²⁵ Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kerangka Fiqh al-Qadha* (Cet. I; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), h. 53.

Sengketa dalam perkara perdata ditentukan masing-masing para pihak yang berperkara, dimana gugatan yang diajukan ke pengadilan ditentukan oleh para pihak sendiri. Dengan adanya sifat seperti ini, hakim perdata bersifat pasif dan tidak aktif seperti dalam perkara pidana. M. Yahya Harahap memberikan pengertian makna “pasif” dalam tugas hakim pengadilan perdata berarti;

- 1). Hakim tidak dibenarkan mengambil prakarsa aktif meminta para pihak mengajukan atau menambah pembuktian yang diperlukan.
- 2). Menerima setiap pengakuan dan pengingkaran yang diajukan para pihak di persidangan, untuk selanjutnya dinilai kebenarannya oleh hakim.
- 3.) Pemeriksaan dan putusan hakim, terbatas pada tuntutan yang diajukan penggugat dalam gugatan¹²⁶.

Ahmad Mujahidin memberikan pendapat bahwa majelis hakim harus aktif memimpin pemeriksaan perkara dan berusaha mengatasi hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya keadilan¹²⁷. Pendapat yang dikemukakan oleh Ahmad Mujahidin tersebut, lebih menitikberatkan kepada prosedur pemeriksaan perkara di pengadilan dibandingkan dengan konsep formil hukum acara perdata. Makna kata “pasif” seperti yang telah dikemukakan oleh M. Yahya Harahap menurut hemat penulis sudah seyogyanya diterapkan dalam praktik peradilan perdata. Adanya pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat menjadikan pemeriksaan perkara tidak bersifat *fair*, dan mengabaikan asas ketentuan umum lembaga kekuasaan

¹²⁶M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan putusan Pengadilan*, h. 500.

¹²⁷Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah di Indonesia: Lengkap dengan Contoh Blanko Perkara* (Cet. I; Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia IKAHI, 2008), h. 29.

kehakiman di Indonesia seperti, tidak memihak kepada salah satu pihak yang berperkara, dan mengadili melebihi apa yang dituntut dalam surat gugatan.

Kehadiran sebuah alat bukti di pengadilan akan memberikan titik terang atas sengketa yang terjadi. Hal ini bertujuan agar setiap tuduhan yang disangkakan oleh penggugat memiliki landasan yang cukup kuat secara yuridis, jika hal ini diabaikan maka, setiap orang akan dengan mudah mendakwa seorang lainnya. Begitu pula bantahan tergugat, harus dibangun berdasar alat bukti yang kuat dan sah. Pengabaian terhadap ketentuan ini mengakibatkan seseorang akan dengan mudah didakwa oleh orang lain.

a.) Bukti Tulisan

Alat bukti tulisan dalam praktik disebut juga dengan istilah bukti surat¹²⁸. Alat bukti tertulis atau surat ialah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian¹²⁹. Achmad Ali dan Wiwie Heryani memberikan klasifikasi suatu alat bukti tertulis harus memenuhi tiga unsur yakni;

- 1.) Harus memuat tanda-tanda bacaan
- 2.) Bermaksud untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang .

¹²⁸Mohammad Saleh dan Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Acara Perdata Indonesia: Perspektif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya* (Cet. I; Bandung: Alumni, 2012), h. 162.

¹²⁹Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia edisi revisi*, h. 157.

3.) Sengaja dibuat untuk pembuktian¹³⁰.

Pendapat Achmad Ali dan Wiwie Heryani tersebut, persis sama dengan definisi alat bukti surat yang dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo. Dalam hal ini penulis tidak menemukan suatu kutipan mengenai definisi surat di dalam buku karangan Achmad Ali dan Wiwie Heryani tersebut. Sehingga, apakah klasifikasi surat sebagai alat bukti berasal dari definisi uraian dari Sudikno Mertokusumo atau tidak.

Klasifikasi pembagian bukti tulisan (surat) terdapat perbedaan di antara para praktisi dan teoritis hukum. Mohammad Saleh dan Lilik Mulyadi menyatakan dalam praktik alat bukti surat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) macam yaitu¹³¹;

1.) Surat Biasa

Surat biasa adalah surat yang dibuat tidak dengan maksud untuk dijadikan alat bukti¹³². Kehadiran surat biasa dengan tidak bermaksud dibuat sebagai alat bukti di pengadilan, tidak berlaku secara penuh. Surat biasa dapat dijadikan alat bukti untuk hal-hal yang bersifat insidentil, misalnya, surat cinta, dan surat korespondensi perdagangan.

¹³⁰ Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Asas-asas Hukum Pembuktian Perdata*, h. 91.

¹³¹ Mohammad Saleh dan Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Acara Perdata: Perspektif, Teoritis, Praktik, dan Permasalahannya*, h. 162.

¹³² Mohammad Saleh dan Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Acara Perdata: Perspektif, Teoritis, Praktik, dan Permasalahannya*, h. 162.

2.) Akta Autentik

Akta autentik adalah akta yang dibuat sesuai dengan undang-undang dan dibuat oleh pegawai umum yang berwenang. Pengertian pejabat umum meliputi, notaris, hakim, panitera, juru sita dan pegawai pencatat sipil¹³³. Sementara itu, akta autentik meliputi; putusan pengadilan, penetapan, berita acara persidangan, dan akta notaris. Ketentuan mengenai akta autentik di dalam pasal 1868 KUH Perdata dibedakan atas akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan akta yang dibuat dihadapan pegawai umum yang berwenang.

Teguh Samudera mengemukakan perbedaan mengenai akta autentik yang dibuat oleh pegawai umum dan akta autentik yang dibuat dihadapan pegawai umum. Akta autentik yang dibuat oleh pegawai umum bersifat inisiatif datang dari pihaknya, dan pihaknya mengetahui benar tentang hal-hal yang dikemukakan dalam isi akta. Sedangkan akta autentik yang dibuat dihadapan pegawai umum bersifat inisiatif datangnya dari pihak yang berkepentingan, pegawai umum tidak pernah memulai inisiatifnya, dan pegawai umum tidak tahu benar kebenaran yang dikemukakan oleh kedua belah pihak yang hadir di hadapannya¹³⁴.

3.) Akta Bawah Tangan

Akta bawah tangan adalah akta yang dibuat oleh para pihak sendiri tanpa melibatkan adanya pihak pemerintah/pejabat. Kehadiran akta di bawah tangan yang

¹³³Teguh Samudera, *Hukum Pembuktian dalam Acara perdata*, h. 41.

¹³⁴Teguh Samudera, *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*, h. 42-43.

dibuat oleh para pihak, dapat menjadi alat bukti dikemudian hari jika terdapat persengketaan di dalamnya. Ketentuan mengenai pembuatan akta bawah tangan tidak seperti akta autentik yang telah digariskan oleh undang-undang, sehingga kekuatan pembuktian akta bawah tangan bersifat sempurna jika tanda tangan di dalam akta tersebut diakui oleh masing-masing pihak¹³⁵.

b.) Bukti Saksi

Keterangan saksi sebagai alat bukti bertujuan untuk menerangkan pokok peristiwa yang berkaitan langsung dengan perkara yang dihadapi maupun memiliki relevansi dengan perkara tersebut. Seorang saksi harus melihat, mendengar, atau mengalami sendiri kejadian yang berkaitan dengan pokok perkara. Suatu kesaksian tidak dapat diterima, jika kejadian tersebut hanya disaksikan oleh satu orang. Hal ini sesuai dengan asas *unus testis nullus testis* yang berarti satu saksi bukan saksi. Selain itu, dalam HIR dan RBg terdapat golongan yang dilarang untuk menjadi saksi dalam suatu perkara. Mereka yang dimaksud dalam golongan tersebut adalah keluarga sedarah dan keluarga semenda menurut keturunan yang lurus dari salah satu pihak; istri atau suami salah satu pihak meskipun sudah bercerai; anak-anak yang berumur kurang dari 15 tahun; orang gila meskipun ingatannya kadang-kadang sembuh¹³⁶.

¹³⁵Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia edisi revisi*, h. 172.

¹³⁶Ismet Baswedan, *Hukum Acara Perdata Peradilan Umum* (Cet. I; Surabaya: Airlangga University Press, 2004), h. 32.

Terdapat pengecualian mengenai orang yang tidak boleh menjadi saksi dalam suatu perkara, khususnya dalam ketentuan acara peradilan agama mengenai kasus perceraian. Adanya larangan bagi anggota keluarga sedarah dan semenda untuk tidak memberikan kesaksian dalam suatu perkara, dikesampingkan dalam ketentuann acara peradilan agama. Dalam kasus perceraian misalnya, jika tetap berpatokan kepada ketentuan pasal 145 HIR, maka kecil kemungkinan bagi hakim untuk mendapat gambaran yang jelas mengenai perselisihan yang terjadi jika keluarga sedarah dan semenda dilarang menjadi saksi. Secara otomatis, penggambaran suatu perkara menjadi tidak jelas.

c.) **Bukti Persangkaan**

Persangkaan adalah kesimpulan yang ditarik oleh undang-undang atau oleh hakim dari peristiwa yang diketahui ke arah peristiwa yang belum diketahui¹³⁷. Berdasarkan uraian defenisi di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa persangkaan dapat dibedakan dalam dua kategori yakni;

1.) Persangkaan berdasar undang-undang

Persangkaan menurut undang-undang lazim disebut sebagai persangkaan menurut hukum¹³⁸. Menurut pasal 1916 KUH Perdata persangkaan undang-undang adalah berdasar ketentuan khusus suatu pasal undang-undang dihubungkan dengan

¹³⁷ Ismet Baswedan, *Hukum Acara Perdata Peradilan Umum*, h. 37.

¹³⁸ Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah Indoensia: Lengkap dengan Contoh Blanko Perkara*, h. 273.

perbuatan tertentu dan peristiwa tertentu. Persangkaan menurut undang-undang diklasifikasikan menjadi;

a.) Persangkaan yang tidak dapat dibantah

Bertitik tolak dari pasal 1916 KUH Perdata terdapat persangkaan yang tidak dapat dibantah. Terdapat ciri-ciri suatu persangkaan tidak dapat dibantah adalah; *pertama* apabila dalam ketentuan suatu pasal undang-undang terdapat ancaman bahwa perbuatan itu batal (*nuul*) atau suatu perbuatan batal demi hukum, atau perbuatan dianggap tidak pernah ada (*never existed*). *Kedua* karena adanya larangan, seperti ketentuan izin poligami pasal 4 dan 5 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang larangan berpoligami tanpa adanya izin dari istri pertama dan izin pengadilan, maka hal ini bermuara kepada adanya pembuktian¹³⁹. Sudikno Mertokusumo menyatakan persangkaan undang-undang yang tidak dapat dibantah pada hakikatnya bukanlah sebuah persangkaan¹⁴⁰. Pendapat Sudikno Mertokusumo didasarkan kepada pasal 173 HIR/pasal 310 RBg yang berbunyi;

Dugaan-dugaan yang tidak berdasarkan suatu peraturan undang-undang, hanya boleh diperhatikan hakim dalam menjatuhkan putusannya jika dugaan-dugaan itu penting, saksama, tertentu dan sesuai satu sama lain

Rumusan pasal 173 HIR/310 RBg tersebut memberikan penegasan bahwa hanya dugaan yang tidak berdasar kepada undang-undang yang boleh diperhatikan oleh hakim. Dugaan/persangkaan yang diperhatikan tersebut bukan merupakan

¹³⁹ Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah Indonesia: Lengkap dengan Contoh Blanko Perkara*, h. 274-275.

¹⁴⁰ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia edisi revisi*, h. 190.

sesuatu tanpa syarat, yang mana undang-undang sendiri menentukan syarat tersebut meliputi, penting, saksama, tertentu, dan berkesesuaian satu sama lain. Apabila hanya dugaan yang tidak berdasar kepada undang-undang yang harus diperhatikan oleh hakim, ditambah dengan beberapa macam persyaratan tersebut, apakah persangkaan/dugaan yang berdasar kepada undang-undang masih dianggap sebagai persangkaan, pendapat Sudikno Mertokusumo mengenai persangkaan menurut undang-undang yang tidak memungkinkan adanya bukti lawan, tidak dapat dibantah dengan sendirinya mengandung perbedaan di antara para kalangan hukum.

b.) Persangkaan yang dapat dibantah

Rumusan undang-undang mengenai persangkaan di dalam KUH Perdata, menunjukkan adanya rumusan dalam pasal tersebut yang memungkinkan adanya bukti lawan. Sebagai contoh, dalam pasal 1394 yang berbunyi;

Mengenai pembayaran sewa rumah, sewa tanah, tunjangan tahunan untuk nafkah, bunga abadi atau bunga cagak hidup, bunga uang pinjaman, dan pada umumnya segala sesuatu yang harus dibayar tiap tahun atau tiap waktu yang lebih pendek, maka dengan adanya tiga surat tanda pembayaran tiga bulan berturut-turut, timbul suatu persangkaan bahwa angsuran-angsuran yang lebih dahulu telah dibayar lunas, kecuali jika dibuktikan sebaliknya.

Persangkaan sebagaimana dalam pasal 1394 KUH perdata di atas, adalah persangkaan undang-undang, tetapi memungkinkan adanya bukti lawan terhadap persangkaan tersebut. R. Subekti menyatakan pada dasarnya pembuktian lawan selalu diperkenankan sepanjang tidak ada ketentuan undang-undang yang menyatakan batalnya persangkaan tersebut¹⁴¹.

¹⁴¹R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, h. 47.

d.) Bukti Pengakuan

Pengakuan dalam perkara perdata, mempunyai kekuatan pembuktian mengikat dan menentukan. Hakim harus menerima pengakuan yang dilakukan oleh satu pihak yang berperkara, meskipun pengakuan tersebut dibangun atas dasar kebohongan belaka. Hal ini, tidak bisa dilepaskan dari ketentuan pokok hukum acara perdata yang mencari kebenaran formil. R. Subekti menyatakan “pengakuan” tidak tepat dikatakan sebagai alat bukti karena, apabila dalil-dalil yang dikemukakan oleh suatu pihak, diakui pihak lawan maka pihak yang mengemukakan dalil-dalil tersebut tidak perlu untuk membuktikannya¹⁴².

Dalam praktek perkara perdata, pengakuan dapat diklasifikasikan kedalam beberapa bagian yaitu¹⁴³;

a.) Pengakuan Murni

Adalah pengakuan yang membenarkan secara tegas keseluruhan dalil gugat, dalam pengakuan murni tidak ada terselip pengingkaran yang sekecil-kecilnya, suatu pengakuan yang bersifat totalitas atas semua dalil gugat.

b.) Pengakuan Berkualifikasi

Adalah pengakuan atas dalil gugat yang dibarengi dengan syarat. Pada pengakuan berkualifikasi pihak yang mengakui menambah sesuatu atas inti

¹⁴²R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, h. 51.

¹⁴³Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah Indonesia: Lengkap dengan Contoh Blanko Perkara*, h. 285.

persoalan yang diakui berupa syarat atau sering dikatakan pengakuan yang dibarengi dengan tambahan keterangan menurut pandangan pihak yang memberi pengakuan.

c.) Pengakuan Berklausula

Pengakuan berklausula adalah pengakuan terhadap sebagian gugat akan tetapi, membantah atas bagian lain dari dalil gugat tersebut. Pengakuan berkualifikasi dan pengakuan berklausula dalam praktik terkadang sulit dibedakan, sehingga menerapkan pengakuan berkualifikasi dan pengakuan berklausula menimbulkan permasalahan hukum yang berkenaan dengan *ontsplitbaar aveau* (pengakuan tidak boleh dipisah-pisah).

d.) Pengakuan *Ontsplitbaar*

Pengakuan *ontsplitbaar* adalah ketidakbolehan undang-undang untuk melarang melakukan pemisahan antara bagian keterangan yang berisi pengakuan dengan keterangan yang berisi keterangan bersyarat dan keterangan tambahan yang berisi sangkalan atas gugatan.

e.) **Bukti Sumpah**

Sudikno Mertokusumo memberikan definisi tentang sumpah yaitu, suatu pernyataan khidmat yang diberikan atau diucapkan pada waktu memberi janji atau keterangan dengan mengingat akan sifat Mahakuasa dari Tuhan dan percaya bahwa siapa yang memberi keterangan atau janji tidak benar akan dihukum oleh-Nya¹⁴⁴.

¹⁴⁴Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia edisi revisi*, h. 197.

Dalam praktek perkara di dalam pengadilan, sumpah dapat diklasifikasikan kedalam beberapa kategori yakni;

a.) Sumpah *suppletoir*

Adalah sumpah pelengkap yang diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada salah satu pihak untuk melengkapi pembuktian peristiwa yang menjadi sengketa sebagai dasar putusannya¹⁴⁵. Kekuatan pembuktian dari sumpah *suppletoir* adalah bersifat sempurna, dan masih memungkinkan adanya bukti lawan. Mengingat sifat dari sumpah *suppletoir* yang bersifat sebagai sumpah pelengkap, kewenangan untuk memerintahkan sumpah ini terletak kepada hakim, maka sumpah ini bersifat “fakultatif” yang berarti boleh atau dapat dilakukan, bukan bersifat wajib atau harus¹⁴⁶.

b.) Sumpah Penaksir

Adalah sumpah yang dibebankan atas perintah hakim untuk menetapkan jumlah yang akan dikabulkan sehubungan dengan apa yang dituntut oleh penggugat atau menetapkan harga barang yang dituntut apabila tidak ada jalan lain untuk menetapkan harganya¹⁴⁷.

¹⁴⁵Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia edisi revisi*, h. 198.

¹⁴⁶Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah Indonesia: Lengkap dengan Contoh Blanko Perkara*, h. 293.

¹⁴⁷Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah Indonesia: Lengkap dengan Contoh Blanko Perkara*, h. 292.

c.) Sumpah *Decisoir*

Sumpah *decisoir* atau sumpah pemutus adalah sumpah yang dibebankan atas permintaan salah satu pihak kepada lawannya¹⁴⁸. Sifat dari sumpah pemutus bersifat mengakhiri perkara, apabila dalam proses pemeriksaan di pengadilan seseorang membebankan kepada lawannya untuk mengucapkan sumpah pemutus, dan yang dibebankan sumpah tersebut bersedia untuk mengucapkannya maka, pihak yang membebankan sumpah tersebut akan ditolak gugatannya oleh majelis hakim. Mengingat sumpah pemutus (*decisoir*) bersifat mengakhiri perkara, maka hakim dan para pihak yang bersengketa terikat terhadap kekuatan pembuktian dari sumpah pemutus (*decisoir*) tersebut.

Ketentuan alat bukti perkara perdata di atas mengundang perbedaan di antara kalangan hukum. Sudikno Mertokusumo mengemukakan bahwa di luar pasal 164 HIR terdapat alat-alat bukti yang dapat dipergunakan untuk memperoleh kepastian mengenai kebenaran suatu peristiwa yang menjadi sengketa¹⁴⁹. Alat bukti yang dimaksud oleh Sudikno Mertokusumo meliputi pemeriksaan setempat (*destence*) dan keterangan ahli (*expertise*)¹⁵⁰. M. Yahya Harahap berpendapat bahwa pemeriksaan setempat dan keterangan ahli secara formil tidak termasuk dalam alat bukti sebagaimana pasal 164 HIR, pasal 1866 KUH Perdata, pasal 284 RBg, namun

¹⁴⁸Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indoensia edisi revisi*, h. 200.

¹⁴⁹Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia edisi revisi*, h. 204.

¹⁵⁰Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia edisi revisi* h. 204.

pemeriksaan setempat dan keterangan ahli digolongkan dalam tindakan hukum atau permasalahan hukum yang erat kaitannya dengan pembuktian¹⁵¹.

Keterangan ahli (*expertise*) menurut Abdulkadir Muhammad digolongkan dalam kategori alat bukti saksi¹⁵², sementara Djamanat Samosir mengemukakan alat-alat bukti dalam perkara perdata meliputi;

- 1.) Alat bukti menurut pasal 164 HIR/pasal 284 RBg, yaitu :
 - a.) Alat Bukti Surat
 - b.) Alat Bukti Saksi
 - c.) Alat bukti Persangkaan
 - d.) Alat Bukti Pengakuan
 - e.) Alat Bukti Sumpah
- 2.) Alat bukti lain yang penting sebagai alat bukti ;
 - a.) Alat bukti pemeriksaan setempat (pasal 153 HIR/180 RBg)
 - b.) Alat bukti Saksi Ahli (pasal 154 HIR/pasal 181 RBg)
 - c.) Alat Bukti Pembukuan (pasal 167 HIR/pasal 296 RBg)
 - d.) Pengetahuan Hakim (pasal 178 ayat (1) HIR/pasal 189 ayat (1) RBg)
- 3.) Alat bukti di luar undang-undang sebagai akibat kemajuan Ilmu pengetahuan dan teknologi, seperti, *phonograph, compact disc, photographic*, televisi, radar, radio, genetik *engineering*, percakapan melalui *cellular*¹⁵³.

Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata mengemukakan dalam perkara perdata terdapat satu macam alat bukti yang sering dipergunakan ialah pengetahuan hakim. Pengetahuan hakim yang dimaksud oleh Retnowulan Sutantio

¹⁵¹M .Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, h. 779.

¹⁵²Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, h. 143-144.

¹⁵³Djamanat Samosir, *Hukum Acara Perdata: Tahap-tahap Penyelesaian Sengketa*, h. 220-221.

dan Iskandar Oeripkartawinata adalah hal yang diketahui sendiri oleh hakim dalam sidang, misalnya hakim melihat sendiri dalam pemeriksaan setempat bahwa benar ada barang-barang penggugat yang dirusak oleh tergugat dan sampai seberapa jauh kerusakannya¹⁵⁴. Pemeriksaan setempat menurut Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata di atas, termasuk dalam kategori “pengetahuan hakim”. Mengenai pendapat seperti yang telah dikemukakan oleh Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata dapat menimbulkan suatu pertanyaan, apakah pemeriksaan setempat (*destence*) dengan sendirinya merupakan pengetahuan hakim atau berdiri sendiri secara terpisah antara pemeriksaan setempat sebagai alat bukti dan pengetahuan hakim sebagai bukti.

Mengenai permasalahan ini, penulis akan memaparkan defenisi pemeriksaan setempat yang dikemukakan oleh beberapa ahli. Sudikno Mertokusumo memberikan defenisi bahwa pemeriksaan setempat (*destence*) adalah pemeriksaan perkara oleh hakim karena jabatannya yang dilakukan di luar gedung atau tempat kedudukan pengadilan, agar hakim dengan melihat sendiri memperoleh gambaran atau keterangan yang memberi kepastian tentang peristiwa-peristiwa yang menjadi sengketa¹⁵⁵. M. Yahya Harahap memberikan pengertian pemeriksaan setempat

¹⁵⁴Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, h. 61.

¹⁵⁵Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia edisi revisi*, h. 204.

berarti sidang pengadilan yang dilakukan di tempat objek barang terletak untuk melihat keadaan atau memeriksa secara langsung objek tersebut¹⁵⁶.

Mencermati rumusan pemeriksaan setempat (*destence*) di atas, penulis berkesimpulan bahwa pemeriksaan setempat (*destence*) bertujuan untuk memperoleh kepastian mengenai objek barang yang menjadi persengketaan, sehingga dapat dirumuskan dengan jelas mengenai seluk-beluk barang sengketa. Adanya pemeriksaan setempat (*destence*) memberikan pengetahuan kepada hakim sehingga, dengan adanya pengetahuan ini dapat dirumuskan untuk menjatuhkan putusan. Pengetahuan hakim yang dimaksud adalah pengetahuan yang diperoleh di dalam persidangan, bukan pengetahuan yang lahir di luar persidangan¹⁵⁷. Selain adanya perbedaan pendapat di antara kalangan hukum baik para teoritis dan praktisi hukum tentang alat bukti yang secara terbatas tercantum dalam HIR, RBg, dan KUH Perdata, permasalahan yang muncul sebagai sebuah problem dalam proses pembuktian adalah, munculnya ragam transaksi elektronik yang kemudian melahirkan beberapa transkrip elektronik tertentu, disatu sisi merupakan sebuah alat bukti yang dapat dipergunakan dikemudian hari.

Munculnya beragam transkrip elektronik tersebut disatu sisi, sebagai akibat adanya transaksi elektronik di era globalisasi membuat hal tersebut perlu ditinjau ulang terutama dari perspektif pembuktian. Aturan pembuktian harus mengakomodir

¹⁵⁶M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Pertada tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, h. 781.

¹⁵⁷Djamanat Samosir, *Hukum Acara Perdata: Tahap-tahap Penyelesaian Sengketa*, h. 262.

tentang alat bukti elektronik mengingat hubungan keperdataan di era globalisasi telah mencakup hubungan keperdataan internasional. Keadaan seperti ini berarti, tidak sedikit dari bermacam hubungan keperdataan yang terjadi disetiap hari dilakukan secara lintas negara, nasional, lokal yang dilakukan melalui dunia internet (*cyber*).

4. Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Elektronik

Alat-alat bukti dalam kategori perkara perdata, memegang peranan penting untuk menilai seberapa jauh kekuatan pembuktian dari alat bukti tersebut. Masing-masing alat bukti mempunyai kekuatan pembuktian tersendiri yang telah ditentukan oleh undang-undang. Bagi para hakim adalah tugas mereka untuk menilai suatu kekuatan pembuktian dari masing-masing alat bukti. Sepanjang alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil maka, kekuatan pembuktian dari alat bukti bersifat “sempurna”. M. Natsir Asnawi menyimpulkan kekuatan pembuktian dari suatu alat bukti merupakan kekuatan pembuktian yang melekat dalam alat bukti yang diajukan oleh para pihak di pengadilan. Lebih lanjut dikemukakan oleh M. Natsir Asnawi bahwa kekuatan pembuktian dari suatu alat bukti terbagi atas dua yakni, kekuatan pembuktian secara intrinsik dan kekuatan pembuktian yang dipengaruhi oleh suatu keadaan di luar alat bukti tersebut (ekstrinsik)¹⁵⁸.

Achmad Ali dan Wiwic Heryani menyatakan bahwa terdapat lima jenis kekuatan pembuktian atau daya bukti dari alat bukti yaitu;

¹⁵⁸M. Natsir Asnawi, *Hukum Pembuktian Perkara Perdata d Indonesia: Kajian kontekstual mengenai Sistem, Asas, Prinsip, Pembebanan, dan Standar Pembuktian*, h. 40.

- 1.) Kekuatan pembuktian sempurna, yang lengkap (*volledig bewijsracht*)
- 2.) Kekuatan pembuktian lemah, yang tidak lengkap (*onvolledig bewijsracht*)
- 3.) Kekuatan pembuktian sebagian (*gedeeltelijk bewijsracht*)
- 4.) Kekuatan pembuktian menentukan (*beslissende bewijsracht*)
- 5.) Kekuatan pembuktian perlawanan (*tegenbewijs*)¹⁵⁹.

Kekuatan pembuktian lebih lanjut diuraikan oleh M. Natsir Asnawi yang menyatakan dalam praktik dikenal 6 (enam) tingkatan kekuatan pembuktian alat bukti, sebagai berikut;

- 1.) Kekuatan bukti permulaan (*begin bewijskracht*)

Kekuatan bukti permulaan adalah kekuatan bukti pada alat bukti yang belum memenuhi batas minimal pembuktian. Dalam pengertian yang lebih sederhana, kekuatan bukti permulaan adalah kekuatan pada alat bukti yang belum dapat menentukan apa-apa. Kemampuannya membuktikan suatu peristiwa atau fakta tertentu harus didukung dengan minimal satu alat bukti lain untuk memenuhi batas minimal pembuktian.

- 2.) Kekuatan pembuktian bebas (*vrij bewijskracht*)

Kekuatan pembuktian bebas adalah kekuatan pembuktian pada alat bukti yang penilaian dan penghargaannya diserahkan kepada hakim. Undang-undang mengatur beberapa alat bukti yang penilaian kekuatan pembuktiannya diserahkan kepada kebijaksanaan hakim. Misalnya, alat bukti kesaksian.

- 3.) Kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*)

Kekuatan pembuktian sempurna adalah kekuatan pembuktian pada alat bukti yang menyebabkan nilai pembuktian pada alat bukti cukup kepada dirinya sendiri. Cukup dalam arti alat bukti tertentu tidak memerlukan alat bukti lain untuk membuktikan suatu peristiwa, hubungan hukum, hak, dan kewajiban.

- 4.) Kekuatan pembuktian mengikat (*bindende bewijskracht*)

Kekuatan pembuktian mengikat adalah kekuatan pembuktian alat bukti yang mengikat pihak-pihak tertentu. Kekuatan pembuktian mengikat yang melekat dalam alat bukti tertentu menyebabkan pihak-pihak yang berkepentingan dengannya terikat untuk meyakini atau mempercayai apa yang diungkap atau dibuktikan oleh alat bukti tersebut.

- 5.) Kekuatan pembuktian menentukan (*besslissende bewijskracht*)

¹⁵⁹ Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Asas-asas Hukum Pembuktian Perdata*, h. 80-81.

Kekuatan pembuktian menentukan adalah kekuatan pembuktian alat bukti yang eksistensinya menentukan putusnya suatu perkara. Dengan adanya alat bukti demikian, maka persengketaan diantara para pihak dapat diputuskan.

6.) Kekuatan pembuktian memaksa (*dwingen bewijskracht*)

Kekuatan pembuktian memaksa adalah kekuatan pembuktian pada alat bukti yang eksistensinya memaksa para pihak untuk meyakinkannya dan menerima konsekuensi yang dilahirkan dari alat bukti tersebut. salah satu alat bukti yang merepresentasikan kekuatan memaksa dari alat bukti ialah sumpah *li'an* dalam praktik hukum acara peradilan agama¹⁶⁰.

Berdasarkan rumusan terkait kekuatan pembuktian suatu alat bukti dalam praktik perkara perdata di pengadilan, terdapat beragam pendapat mengenai pengklasifikasian kekuatan pembuktian dari suatu alat bukti. Penulis menyimpulkan bahwa pembagian klasifikasi kekuatan pembuktian seperti yang telah dipaparkan di atas, tidak memiliki dampak yang cukup substansial secara umum, karena kekuatan pembuktian masing-masing pendapat seperti yang penulis kutip, disandarkan kepada peraturan perundang-undangan mengenai ketentuan hukum acara yang berlaku di pengadilan.

5. *Hal-hal yang perlu di Buktikan*

Tujuan pembuktian suatu perkara di pengadilan dalam perkara pidana maupun perdata, bertujuan untuk merumuskan dengan jelas mengenai pokok persengketaan yang terjadi. Berdasarkan proses pembuktian yang dilakukan tersebut, maka dapat dirumuskan bahwa suatu putusan (*vonis*) yang ditetapkan oleh majelis hakim dalam suatu sidang yang terbuka untuk umum agar suatu persengketaan yang terjadi dapat diselesaikan.

¹⁶⁰M. Natsir Asnawi, *Hukum Pembuktian Perkara perdata di Indonesia: Kajian Kontekstual mengenai Sistem, Asas, Prinsip, Pembebanan, dan Standar Pembuktian*, h.42.

Aturan mengenai adanya hal yang dianggap perlu untuk dibuktikan dapat pula dilihat di dalam pasal 1865 KUH Perdata. Rumusan pasal tersebut secara lengkap berbunyi sebagai berikut;

Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.

Rumusan mengenai hal yang perlu untuk dibuktikan secara tegas dinyatakan dalam pasal 163 HIR, dan pasal 1865 KUH Perdata. Kesimpulan yang dapat ditarik berdasarkan rumusan pasal tersebut, bahwa yang wajib untuk dibuktikan adalah adanya suatu hak, dan peristiwa. Ketentuan mengenai rumusan pembuktian tersebut dinyatakan berlaku terhadap pihak yang membantah adanya hak orang lain. Penegasan ini secara tegas memberikan penggambaran bahwa pembuktian dalam perkara perdata dilakukan oleh mereka yang mendalilkan mempunyai sesuatu hak dan mereka yang membantah adanya hak orang lain.

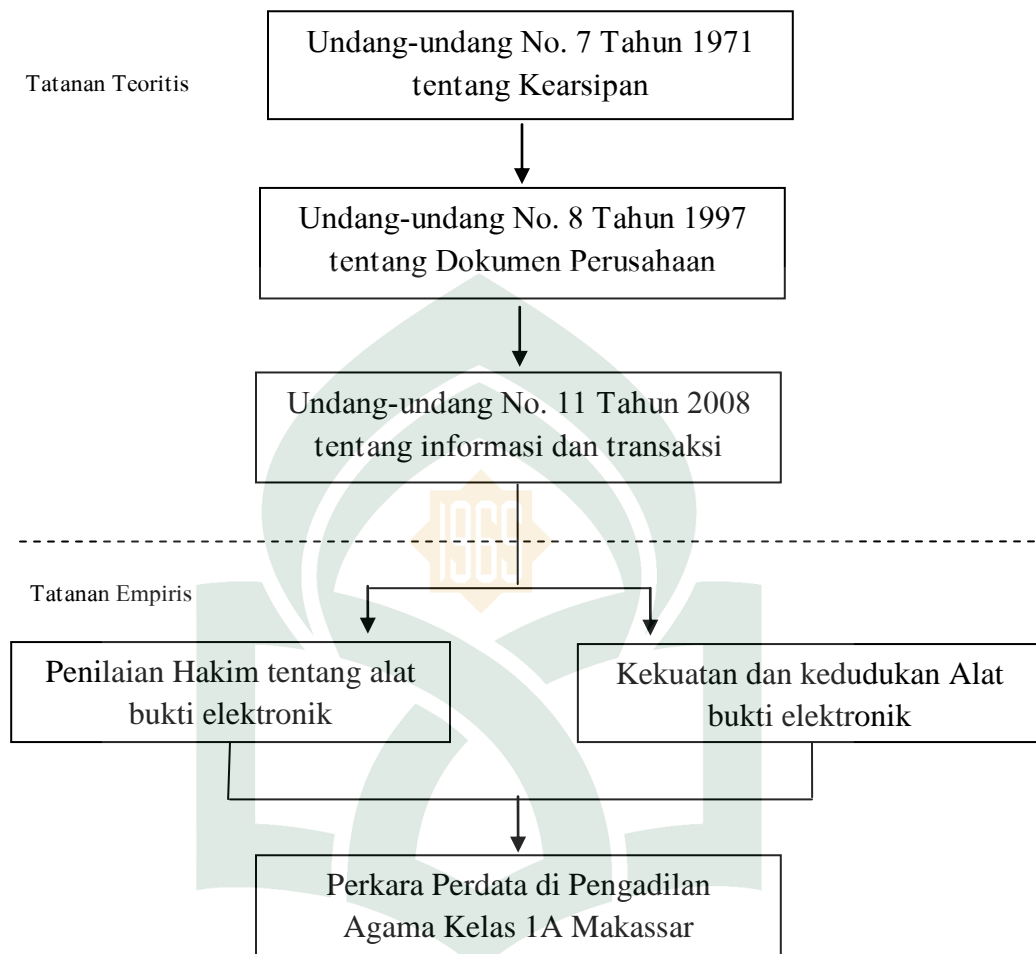
Ketentuan ini mengisyaratkan suatu hal penting, bahwa dalam perkara perdata diberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada masing-masing pihak untuk membuktikan dalil-dalil gugatan, dan dalil yang membantah adanya hak orang lain. Selain hak dan peristiwa yang wajib untuk dibuktikan maka, satu hal penting yang menurut perspektif penulis wajib untuk dibuktikan adalah adanya hubungan hukum. Hubungan hukum yang penulis maksud, adalah rangkaian peristiwa yang menyatakan bahwa antara pengugat dan tergugat memang benar telah terjadi hubungan hukum yang mengakibatkan adanya peristiwa hukum. Pengertian

hubungan hukum secara sempit yang penulis maksud adalah segala hal yang berkaitan dengan adanya peristiwa hukum tersebut.

C. KERANGKA FIKIR

Kerangka pikir dalam tesis ini berlandaskan pada asumsi bahwa setelah di berlakukannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang disahkan pada tanggal 21 April 2008 dimana dalam undang-undang tersebut memiliki suatu terobosan baru dalam hal tanda tangan elektronik (*digital signature*) diakui memiliki hukum sama dengan tanda tangan konvensional yang menggunakan tinta basah dan materai, dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih maka tanda tangan elektronik tersebut bisa di transfer atau dikirimkan melalui internet misalnya untuk mengadakan perjanjian di antara para pihak tanpa bertemu muka. Kehadiran teknologi informasi ini, ternyata masih belum diikuti dengan perkembangan hukum yang dapat mengikuti percepatan kemajuan teknologi komunikasi sehingga diperlukan adanya perangkat hukum yang dapat menyelesaikan suatu permasalahan yang terjadi dalam proses penyelesaian perkara di dalam pengadilan.

Sehubungan dengan hal itu, maka untuk lebih memperjelas kerangka pikir yang dimaksud, dapat di lihat dari bentuk skema di bawah:



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pada umumnya, penelitian terbagi atas penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif¹⁵⁵. Penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif analisis¹⁵⁶, dan termasuk penelitian lapangan (*field reseach*) dengan menggunakan jenis kualitatif melalui observasi, dokumentasi, wawancara. Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk memberikan gambaran sistematis, cermat, dan akurat mengenai penilaian Hakim tentang alat bukti elektronik dalam proses perkara perdata di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar yakni berupa fakta-fakta, keadaan yang ada hubungannya dengan variabel-variabel yang diteliti.

Menurut Lexi J. Moleong, penelitian kualitatif yakni penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian. misalnya prilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik serta dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode

¹⁵⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 8-9.

¹⁵⁶S.Suriasumantri, “*Penelitian Ilmiah, Kefilsafatan dan Keagamaan: Mencari Pradigma keberagamaan*” dan M. Deden Ridwan, (ed al). *Tradisi Baru Penelitian Agama Islam: Tinjauan Antar disiplin Ilmu* (Bandung: Nuansa, 2001), h. 68.

alamiah¹⁵⁷. Penelitian kualitatif biasa disebut pula dengan penelitian *naturalistik* (bersifat alamiah)¹⁵⁸. Penelitian ini pula bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan akurat mengenai objek atau bidang tertentu¹⁵⁹.

2. Lokasi Penelitian

Menurut S. Nasution bahwa ada tiga unsur yang perlu diperhatikan dalam penelitian antara lain adalah menetapkan lokasi, tempat, pelaku dan aktifitas kegiatan.¹⁶⁰ Maka dari itu untuk memperjelas lokasi yang akan menjadi tempat penelitian ini, peneliti memilih lokasi di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar, yang bertempat di jalan Perintis Kemerdekaan Km 14 Kota Makassar merupakan suatu lembaga peradilan agama yang berada di Ibukota provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki jumlah penduduk yang majemuk dan kompleks dan beragam suku yang berdomisili di dalamnya, maka dari itu Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar menangani kasus yang beragam dan lebih bervariasi. Adapun fokus penelitian ini adalah penilaian Hakim tentang alat bukti elektronik dalam proses perkara perdata di Pengadilan sebagai objek penelitian.

¹⁵⁷Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cet. XXVII; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), h. 6.

¹⁵⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Cet. XI; Bandung: Alfabeta, 2010), h. 14.

¹⁵⁹Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Cet. XI; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 7.

¹⁶⁰S. Nasution, *Metode Naturalistik Kualitatif* (Cet. I; Bandung: Tarsito, 1996), h. 43.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan merupakan suatu langkah awal yang harus ditempuh oleh seorang peneliti dalam mengkaji penelitiannya. Pendekatan yang dimaksudkan disini menjelaskan perspektif yang digunakan dalam membahas objek penelitian¹⁶¹.

- a. Pendekatan teologis normatif (Syar'i) yakni pendekatan yang menggunakan kaidah agama dan aspek hukumnya berlandaskan al-qur'ān, hadis dan ijtihad.
- b. Pendekatan yuridis perundang-undangan (*statute approach*) Pendekatan ini digunakan untuk menelaah semua undang-undang dan regulasi yang terkait dengan pembahasan¹⁶²
- c. Pendekatan historis (*historical approach*) Pendekatan ini digunakan untuk membantu penelitian mengetahui dan memahami aturan hukum dari waktu ke waktu¹⁶³

C. Sumber Data

Penelitian yang dilakukan menggunakan dua jenis sumber data yang diperlukan yaitu:

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh dari instansi atau lembaga terkait yang dianggap relevan dengan tujuan penelitian melalui dokumentasi, observasi, wawancara.

¹⁶¹Tim Penyusun Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah; Makalah, Skripsi, Tesis, Disertasi dan Laporan Penelitian* (Cet. I; Makassar: Alauddin Press, 2013), h. 16.

¹⁶²Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Cet. V; Jakarta: Kencana, 2009), h. 93.

¹⁶³Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Cet. V; Jakarta: Kencana, 2009), h. 126.

- b. Data sekunder berupa dokumenter yang bersumber dari buku-buku, hasil-hasil penelitian, jurnal, majalah, media cetak, dan dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini yang diperoleh dengan cara penelusuran arsip dari berbagai perpustakaan.

D. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Adapun teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Observasi (pengamatan)

Observasi adalah melakukan pengamatan langsung di lapangan untuk mengetahui kondisi objektif di seputar lokasi penelitian dan dengan cara memantau dari dekat kegiatan persidangan di Pengadilan Agama¹⁶⁴. Teknik observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah nonpartisipan, yaitu penelitian tidak terlibat secara langsung di dalam aktivitas subjek observasi. Adapun yang menjadi objek observasi adalah proses pembuktian perkara di pengadilan.

¹⁶⁴Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek* (Cet. IV; Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h.58.

b. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah teknik yang penulis gunakan untuk memperoleh informasi dari responden.¹⁶⁵ Teknik wawancara ini digunakan untuk menemukan data tentang permasalahan secara terbuka, pihak informan diminta pendapat dan ide-idenya, sedangkan peneliti mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.¹⁶⁶ Bentuk pertanyaan yang digunakan dalam wawancara ini adalah bentuk pertanyaan yang berstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara.

c. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang yang tertulis. Dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya¹⁶⁷. Hasil penelitian dari observasi dan wawancara, akan lebih kredibel/dapat dipercaya jika didukung oleh dokumentasi.

E. Instrumen Penelitian

Adapun instrumen utama dalam penelitian kualitatif adalah peneliti sendiri dan dengan bantuan orang lain sebagai alat pengumpul data utama, sebab manusialah sebagai alat yang dapat berhubungan dengan informan atau objek lainnya, dan hanya manusialah yang mengetahui kaitan-kaitan antara satu data

¹⁶⁵Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), h. 95.

¹⁶⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D* (Cet. IV; Bandung: Alfabet, 2009), h. 320.

¹⁶⁷Lexy J. Molcong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), h. 186.

dengan data yang lain di lapangan. Peneliti sebagai *humant instrumen* berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informasi sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, dan menilai kualitas data, analisis data dan membuat kesimpulan dari hasil temuannya¹⁶⁸.

Sebagai upaya untuk memperoleh data mengenai permasalahan yang diteliti, peneliti akan menggunakan seperangkat instrumen dalam bentuk pedoman wawancara terstruktur, pedoman observasi, dokumentasi berupa kamera dan alat *recording* untuk mengumpulkan informasi tentang proses penilaian Hakim tentang alat bukti elektronik dalam proses perkara perdata di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar.

F. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data

Pada dasarnya analisis data adalah sebuah proses mengatur urutan data dan mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan rumusan kerja seperti yang disarankan oleh data.¹⁶⁹ Pekerjaan analisis data dalam hal ini mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode dan mengkategorikan data yang terkumpul baik dari catatan lapangan, gambar, foto atau dokumen berupa laporan.

Untuk melaksanakan analisis data kualitatif ini maka perlu ditekankan beberapa tahapan dan langkah-langkah sebagai berikut:

¹⁶⁸Neong Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cet. VIII; Yogyakarta: Rake Selatan, 1998), h. 308.

¹⁶⁹Neong Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 103.

a. Reduksi Data

Miles dan Huberman mengatakan bahwa reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Mereduksi data bisa berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya¹⁷⁰.

b. Display Data

Agar data yang telah direduksi mudah dipahami baik oleh peneliti maupun orang lain, maka data tersebut perlu disajikan. Adapun bentuk penyajiannya adalah dalam bentuk naratif deskriptif (pengungkapan secara tertulis)¹⁷¹. Tujuannya adalah memudahkan dalam mendeskripsikan suatu peristiwa, sehingga memudahkan untuk mengambil kesimpulan.

c. Penarikan kesimpulan atau *verifikasi*

Menurut Miles dan Huberman dalam Harun Rasyid, mengungkapkan bahwa *verifikasi* data dan penarikan kesimpulan adalah upaya untuk mengartikan data yang ditampilkan dengan melibatkan pemahaman peneliti¹⁷². Kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten

¹⁷⁰Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, h. 92.

¹⁷¹Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, h. 249.

¹⁷²Harun Rasyid, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Ilmu Sosial dan Agama* (Pontianak: STAIN Pontianak, 2000), h. 71.

saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan merupakan kesimpulan yang kredibel¹⁷³.

Pada tahap ini dilakukan pengkajian tentang kesimpulan yang telah diambil dengan data pembanding teori tertentu; melakukan proses *member check* atau melakukan proses pengecekan ulang, mulai dari pelaksanaan pra survey (orientasi), wawancara, observasi dan dokumentasi; dan membuat kesimpulan umum untuk dilaporkan sebagai hasil dari penelitian yang telah dilakukan.

G. Pengujian Keabsahan Data

Untuk menguji keabsahan data guna mengukur validitas hasil penelitian ini dilakukan dengan triangulasi. Triangulasi adalah teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang ada. Selain itu pengamatan lapangan juga dilakukan, dengan cara memusatkan perhatian secara bertahap dan berkesinambungan sesuai dengan fokus penelitian, yaitu, penilaian Hakim tentang ragam alat bukti elektronik dalam proses perkara perdata di Pengadilan Agama kelas 1A Makassar. Selanjutnya mendiskusikan dengan orang-orang yang dianggap paham mengenai permasalahan penelitian ini.

Oleh karena itu, kesadaran rangkaian tahapan-tahapan penelitian ini tetap berada dalam kerangka sistematika prosedur penelitian yang saling berkaitan serta saling mendukung satu sama lain, sehingga hasil penelitian dapat dipertanggung jawabkan. Implikasi utama yang diharapkan dari keseluruhan proses ini adalah

¹⁷³Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, h. 99.

penarikan kesimpulan tetap signifikan dengan data telah dikumpulkan sehingga hasil penelitian dapat dinyatakan sebagai sebuah karya ilmiah yang representatif.

Tujuan dari triangulasi ini bukan untuk mencari kebenaran tentang beberapa fenomena, tetapi lebih pada peningkatan pemahaman peneliti terhadap apa yang telah ditemukan.



BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Perkara di Pengadilan Agama kelas 1A Makassar

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang direvisi oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah lagi oleh Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, yang semakin memantapkan eksistensi Peradilan Agama sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia, apalagi diikuti oleh Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam sebagai asuhan material bagi para hakim Peradilan Agama.

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

1. Perkawinan
 - a. Izin Poligami
 - b. Izin Kawin
 - c. Dispensasi Kawin
 - d. Pencegahan Perkawinan
 - e. Penolakan Perkawinan oleh PPN
 - f. Pembatalan Perkawinan

- g. Cerai Gugat
- h. Pencabutan kekuasaan Wali
- i. Penguasaan Anak
- j. Pengesahan Anak
- k. Nafkah anak oleh Ibu
- l. Hak-hak bekas Istri
- m. Penunjukkan orang lain sebagai Wali
- n. Ganti rugi terhadap Wali
- o. Asal-usul Anak
- p. Penolakan Kawin Campur
- q. Itsbat Nikah
- r. Wali Adhol

2. Kewarisan

Penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris.

3. Wasiat

Perbuatan seseorang memberikan suatu benda atau manfaat kepada orang lain atau lembaga/badan hukum, yang berlaku setelah yang memberi tersebut meninggal dunia.

4. Hibah

Pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.

5. Wakaf

Perbuatan seseorang atau sekelompok orang (wakif) untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.

6. Zakat

Harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan hukum yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan syari'ah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

7. Infak

Perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain guna menutupi kebutuhan, berupa makanan, minuman, memberikan rezeki (karunia), atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas dan karena Allah Swt.

8. Shadaqoh

Perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain atau lembaga/badan hukum secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu dengan mengharap ridho Allah swt.

9. Ekonomi syariah¹⁷³

- a. Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah.
- b. Asuransi Syari'ah.
- c. Reasuransi Syari'ah.
- d. Reksa Dana Syari'ah.
- e. Obligasi Syari'ah dan Surat Berharga Berjangka Menengah Syari'ah.
- f. Sekuritas Syari'ah.
- g. Pembiayaan Syari'ah.
- h. Pegadaian Syari'ah.
- i. Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syari'ah.

¹⁷³Undang-undang No. 50 Tahun 2009, Pasal 49.

j. Bisnis Syari'ah.

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar

Sejarah keberadaan Pengadilan Agama Makassar tidak diawali dengan peraturan Pemerintah PP. No. 45 Tahun 1957, akan tetapi sejak zaman dahulu, sudah ada sejak zaman Belanda namun sangat berbeda dengan zaman sekarang. Adapun qadi pertama di Makassar adalah Maknum Dg. Manranoka, KH. Abd. Haq dan Ince Moh. Saleh. Setelah keluarnya PP. No. 45 Tahun 1957, maka pada Tahun 1960 terbentuklah Pengadilan Agama Makassar yang waktu itu disebut Pengadilan Mahkamah Syariah.

Sebelum digambarkan tentang perkara yang ditangani di pengadilan Agama Kelas 1A Makassar terlebih dahulu penulis memberikan gambaran umum mengenai Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar dalam Visi dan Misinya sebagai berikut:

1) Visi

Visi Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar yaitu: Terwujudnya Pengadilan Agama Makassar yang bersih, beribawa, dan profesional dalam penegakan hukum dan keadilan menuju supremasi hukum.¹⁷⁴

Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar yang bersih, mengandung makna bersih dari pengaruh non hukum baik bentuk kolusi, korupsi dan nepotisme, maupun pengaruh tekanan luar dalam upaya penegakan hukum. Bersih dan bebas KKN merupakan topik yang selalu dikedepankan pada era reformasi. Tergabungnya suatu

¹⁷⁴Laporan Tahunan Pengadilan Agama Makassar Tahun 2008, h. 5.

proses penyelenggaraan yang bersih dalam pelayanan hukum menjadi persyarat untuk mewujudkan peradilan yang berwibawa.¹⁷⁵

Berwibawa, mengandung arti bahwa Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar ke depan terpercaya sebagai lembaga peradilan yang memberikan perlindungan dan pelayanan hukum sehingga lembaga peradilan tegak dalam kharisma sandaran keadilan masyarakat.¹⁷⁶

Profesionalisme, mengandung arti yang luas, profesionalisme dalam penguasaan ilmu pengetahuan hukum dan profesionalisme manajemen lembaga peradilan sehingga hukum dan peradilan yang diharapkan dapat terwujud. Jika hukum dan keadilan telah terwujud maka supremasi hukum dapat dirasakan oleh segenap masyarakat.¹⁷⁷

2) Misi

Berdasarkan Visi Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar yang telah ditetapkan tersebut, maka ditetapkan beberapa Misi Pengadilan Agama adalah:

1. Mewujudkan Pengadilan Agama yang transparan dalam proses peradilan.
2. Meningkatkan efektivitas pembinaan dan pengawasan.
3. Mewujudkan tertib administrasi dan manajemen peradilan.
4. Meningkatkan sarana dan prasarana hukum.¹⁷⁸

¹⁷⁵Laporan Tahunan Pengadilan Agama Makassar Tahun 2008, h. 6.

¹⁷⁶Laporan Tahunan Pengadilan Agama Makassar Tahun 2008, h. 6.

¹⁷⁷Laporan Tahunan Pengadilan Agama Makassar Tahun 2008, h. 6-7.

¹⁷⁸Laporan Tahunan Pengadilan Agama Makassar Tahun 2008, h. 8.

Misi *pertama*, “Mewujudkan Pengadilan Agama yang transparan dalam proses” mengandung makna bahwa untuk mewujudkan lembaga peradilan yang bersih, beribawa dan profesional, maka pelaksanaan proses peradilan harus diwujudkan dengan transparan. Wajudnya nyata transparan adalah proses yang cepat, sederhana dan biaya murah. Misi tersebut merupakan langkah antisipatif terhadap euforia reformasi hukum yang selalu didengungkan masyarakat. Apatisme masyarakat terhadap peradilan yang selalu menganggap bahwa proses ke pengadilan akan selalu lama, berbelit-belit dan memakan waktu dan biaya yang mahal harus ditepis dengan misi tersebut, misi tersebut juga sesuai dengan kehendak peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.¹⁷⁹

Misi *kedua*, “Meningkatkan efektivitas pembinaan dan pengawasan.” Pembinaan merupakan tindakan antisipatif, yang merupakan upaya peningkatan sumber daya manusia dalam memberikan pelayanan hukum secara maksimal kepada masyarakat. Pengawasan merupakan tindakan (1) menjaga agar pelaksanaan tugas lembaga sesuai dengan rencana dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; (2) mengendalikan agar administrasi peradilan dikelola secara tertib sebagaimana mestinya dan aparat peradilan melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya; (3) menjamin terwujudnya pelayanan publik yang baik bagi para pencari keadilan yang

¹⁷⁹Laporan Tahunan Pengadilan Agama Makassar Tahun 2008, h. 8.

meliputi: kualitas putusan, waktu penyelesaian perkara yang cepat dan biaya perkara yang murah.¹⁸⁰

Peningkatan efektivitas pembinaan dan pengawasan merupakan upaya preventif terhadap peluang atau kesempatan pelanggaran, sedangkan pengawasan yang efektif mempunyai sasaran penyelesaian masalah secara tepat dan cepat terhadap berbagai temuan penyimpangan dan pengaduan dari masyarakat.¹⁸¹ Pengawasan yang terencana dan efektif diharapkan dapat mengurangi sorotan dan kritikan terhadap lembaga peradilan.

Misi *ketiga*, “Mewujudkan tertib administrasi dan manajemen peradilan”. Administrasi dan manajemen merupakan sarana pencapaian tujuan. Pola administrasi dan manajemen yang baik akan mendorong percepatan terwujudnya visi dan misi. Pengetatan dan disiplin terhadap administrasi dan manajemen yang telah ditetapkan merupakan hal yang urgen, perubahan birokrasi atau reformasi birokrasi dalam tubuh lembaga peradilan merupakan jalan menuju reformasi hukum.¹⁸²

Misi *keempat*, “Meningkatkan sarana dan prasarana hukum.” Mengandung makna bahwa tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana dan prasarana tersebut

¹⁸⁰Laporan Tahunan Pengadilan Agama Makassar Tahun 2008, h. 8.

¹⁸¹Laporan Tahunan Pengadilan Agama Makassar Tahun 2008, h. 9.

¹⁸²Laporan Tahunan Pengadilan Agama Makassar Tahun 2008, h. 9.

mencakup sarana gedung, sarana organisasi yang baik, sarana peralatan yang memadai, sarana keuangan yang cukup dan lain-lain.¹⁸³

3) Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar

Ketua	Drs. Moh. Yahya, SH, MH
Wakil Ketua	Dr. Harijah. D, MH
Hakim	Drs. Hanafi Lamuha, MH Drs. Hj. Hadidjah, MH Drs. Yasin Irfan, MH Drs. H. AR. Buddin, MH Dra. Hj. Murni Djuddin Drs. Nurcahaya RI Mufti, SH Drs. Muh. Iqbal, MH Drs. Chairuddin, SH, MH Drs, Hj. Sitti Aminah, MH Dra. Hj. St. Aminah Malik, MH Drs. Arief Musi, SH Drs. Muhtarom, SH Dra. Hj. Nurjaya, MH Drs. H.M. Anas Malik, SH, MH Drs. Kamaruddin Dr. Sukri HC, MH Hj. Abd. Hanan, SH, MH Drs. Maddatuang Drs. H. Imbalo, SH, MH
Penitera/Sekretaris	Drs. H. Jamaluddin

¹⁸³Laporan Tahunan Pengadilan Agama Makassar Tahun 2008, h. 9.

Wakil Penitera	Drs. Muhyidin, MH
Penitera Muda Permohonan	Abd. Rozak Said, SH
Penitera Muda Hukum	Hj. Hartinah, SH
Penitera Muda Gugatan	Shaffar Arfan, SH, MH
Kasubang Kepegawaian	Irfan Tahir Arman, S.PI, SH
Kasubang Keuangan	Hasanuddin R, ST
Kasubang Umum	Rahamat Hidayat, ST
Penitera Pengganti	Dra. Hj. Fatmawati, MH Hj. Salwa, SH, MH Dra Hj. Rifqah Sulaiman Drs. Hj. St. Hafiah, S.Ag Dra. Hanisang Drs. Abd Rasyid P H.M. Sanusi, SH Hj. ST. Munirah, SH Hj. Aminah Amin daus, SH Drs. Hj. Sukmawati, SH Dra. Jawariah Hj. Petraniani, SH Drs. Amiruddin Drs. Haeruddin Muh. Fuadathoni, S.Ag Hj. St. Munirah, SH H. M. Sunusi, MH Salmah N, BA H. A. Muh. Yahya Challd Muh. Fuadathoni, S.Ag
Jurusita	Agus Salim Razak, SH

	Muhammad Arfah, SH
Jurusita Pengganti	Umar Lanna, SH Drs. Misi, S.Ag Aris, S.H Bachra, S.HI Hj. Erni Wahyuni, S.Ag Hj. Nurhayati K. S.HI Umar Boften Syahrani, SH. MH Muh. Sabir, SH

Sumber data laporan tahunan Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar tahun 2015

Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar terdiri dari unsur Jabatan Fungsional dan Struktural, dalam komposisinya Ketua sebagai pucuk pimpinan didampingi oleh Wakil Ketua, selanjutnya Hakim sebagai pejabat negara yang masuk dalam jabatan fungsional menjalankan tugas pokoknya yaitu menerima, memeriksa dan mengadili semua perkara yang diajukan kepadanya.¹⁸⁴

Selain itu, Ketua dan Wakil Ketua dibantu oleh Penitera/Sekretaris untuk menyelenggarakan administrasi perkara dan administrasi umum. Namun karena keterbatasannya, maka seorang Penitera/Sekretaris dibantu oleh Penitera Pengganti dan Jusrita atau Jusrita Pengganti untuk melaksanakan tugas mendampingi Majelis Hakim dalam persidangan dan melaksanakan tugas-tugas kejurusitaan. Di sisi lain, Penitera/Sekretaris dibantu pula oleh Wakil Penitera dan Wakil Sekretaris

¹⁸⁴Laporan Tahunan Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar 2009. h. 40.

sebagai penanggung jawab kegiatan administrasi baik administrasi perkara maupun administrasi umum.

Terkait menjalankan tugas-tugasnya, seorang Wakil Penitera dibantu oleh Penitera Muda, yakni Penitera Muda Gugatan, Penitera Muda Permohonan dan Penitera Muda Hukum yang semuanya bertanggung jawab kepada Wakil Penitera. Begitu pula dengan Wakil Sekretaris, ia dibantu oleh tiga Kepala Sub Bagian, yakni Kepala Sub Bagian Umum, Kepala Sub Bagian Keuangan dan Kepala Sub Bagian Kepegawaian, ketiga sub bagian tersebut bertanggung jawab kepada Wakil Sekretaris.¹⁸⁵

B. Data Perkara yang diputus Tahun 2015



¹⁸⁵Laporan Tahunan Pengadilan Agama Makassar Tahun 2008, h. 40-41.

	BULAN JENIS PERKARA		JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	M E I	J U N I	J U L I	A G U S T U S	S E P T E M B E R	O K T O B E R	N O V E M B E R	D E S E M B E R
	SISA BULAN LALU	2	431	480	491	480	455	472	452					
	DITERIMA	3	246	202	236	226	190	166	151					
	JUMLAH	4	677	682	727	705	645	638	603					
	DICABUT	5	18	19	30	28	25	18	16					
A. PERKAWINAN	IZIN DIPOLIGAMI	6	-	-	-	-	-	-	-					
	IZIN KAWIN	7	-	-	-	-	-	-	-					
	DISPENSASI KAWIN	8	1	-	3	-	-	1	2					
	PENCEGAHAN PERKAWINAN	9	-	-	-	-	-	-	-					
	PENOLAKAN PERKAWINAN OLEH PPN	10	-	-	-	-	-	-	-					
	PEMBATALAN PERKAWINAN	11	-	-	-	-	-	-	1					
	KELALAIAN ATAS KEWAJIBAN SUAMI/ISTRI	12	-	-	-	-	-	-	-					
	CERAI TALAK	13	33	24	-	-	-	-	25					
	CERAI GUGAT	14	108	101	-	-	-	-	104					
	HARTA BERSAMA	15	1	-	3	6	1	-	2					
	PENGUASAAN ANAK	16	1	-	-	2	-	1	1					
	NAFKAH ANAK OLEH IBU	17	-	-	-	-	-	-	-					
	HAK-HAK BEKAS ISTRI	18	-	-	-	-	-	-	-					
	PENGUASAAN ANAK	19	-	-	-	-	-	-	-					
	PENCABUTAN KEKUASAAN ORANG TUA	20	-	-	-	-	-	-	-					
	PENCABUTAN KEKUASAAN WALI	21	-	-	-	-	-	-	-					
	PENUNJUKAN ORANG TUA LAIN SBG WALI	22	2	2	-	-	-	-	-					
	GANTI RUGI TERHADAP WALI	23	-	-	-	-	-	-	-					
	ASAL USUL ANAK	24	-	-	-	-	-	-	-					
	PENOLAKAN KAWIN CAMPUR	25	-	-	-	-	-	-	-					
ISBATH NIKAH	26	1	4	7	4	5	5	1						
WALI ADHAL	27	1	1	1	-	-	-	-						
PENGANGKATAN ANAK	28	-	1	1	-	-	-	-						
B	KEWARISAN	29	-	-	3	5	3	-	-					
C	WASIAT	30	-	-	-	-	-	-	-					
D	HIBAH	31	-	-	-	-	-	-	-					
E	WAKAF	32	-	-	-	-	-	-	-					
F	ZAKAT	33	-	-	-	-	-	-	-					
G	INFAK	34	-	-	-	-	-	-	-					
H	SHADAQAH	35	-	-	-	-	-	-	-					
I. EKONOMI SYARIAH	BANK SYARIAH	36	-	-	-	-	1	-	-					
	LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH	37	-	-	-	-	-	-	-					
	ASURANSI SYARIAH	38	-	-	-	-	-	-	-					
	REASURANSI SYARIAH	39	-	-	-	-	-	-	-					
	REKSADANA SYARIAH	40	-	-	-	-	-	-	-					
	OBLIGASI SYARIAH	41	-	-	-	-	-	-	-					
	SEKURITAS SYARIAH	42	-	-	-	-	-	-	-					
	PEMBIAYAAN SYARIAH	43	-	-	-	-	-	-	-					
	PEGADAIAN SYARIAH	44	-	-	-	-	-	-	-					
	DPLK SYARIAH	45	-	-	-	-	-	-	-					
BISNIS SYARIAH	46	-	-	-	-	-	-	-						
	LAIN-LAIN	47	8	10	1	8	2	-	3					
	CORET-DITOLAK	48	8	4	11	10	8	5	3					
	GUGUR	49	4	4	7	6	-	9	7					
	TIDAK DITERIMA	50	11	21	12	13	-	13	5					
	JUMLAH	51	179	172	217	222	148	168	164					
	SISA AKHIR	52	480	491	480	455	472	452	423					
	KET.	53												

2. Problematika Alat Bukti Elektronik

Perkembangan penggunaan media elektronik dengan menggunakan internet telah mempengaruhi aspek kebutuhan dan perilaku manusia. Kehadiran internet yang tidak mengenal batas dan tanpa sekat (*border less*) telah meluluhlantakkan batas-batas wilayah secara geografis, baik dalam skala nasional dan internasional. Aspek pergaulan manusia secara global memungkinkan terjadinya beragam transaksi yang terjadi setiap hari. Munculnya transaksi perdagangan elektronik (*e-commerce*) yang melahirkan transkrip elektronik sebagai bukti pegangan kepada para pihak jika terjadi sengketa dikemudian hari.

Proses pembuktian dalam perkara perdata yang hanya mengenal alat bukti secara terbatas dan limitatif seperti dalam pasal 164 HIR/284 RBg, serta pasal 1866 KUH Perdata membawa problem tersendiri dalam proses pembuktian di pengadilan. Penegasan mengenai jenis alat bukti yang diakui dalam hukum acara perdata, membawa implikasi bahwa selain dari alat bukti yang disebutkan secara tegas dalam praktik hukum acara, tidak dapat diakui/tidak sah sebagai alat bukti. Hal ini disatu sisi, tentu akan membawa permasalahan yang cukup serius karena tidak jarang praktek dalam lalu lintas hubungan keperdataan kini telah banyak dilakukan melalui media elektronik (internet) seperti jual beli dan hubungan kontrak.

Permasalahan mengenai adanya alat bukti selain yang disebutkan secara terbatas dalam praktik hukum acara perdata, serta munculnya alat bukti baru (elektronik) karena pola hubungan keperdataan manusia yang semakin berkembang

akan membawa kepada suasana yang penuh dengan ketidakpastian hukum. Ketidakpastian hukum yang penulis maksud disini adalah aspek pengaturan mengenai alat bukti elektronik yang belum dapat diterima secara utuh dalam proses pembuktian perkara perdata. Dalam praktik perkara di persidangan, aspek kepastian hukum merupakan unsur penting dalam proses penegakan hukum, sehingga dengan adanya kepastian hukum tersebut hak seseorang akan terlindungi serta, bertujuan untuk mencegah tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*).

Pengakuan terhadap kedudukan alat bukti elektronik selain yang diatur secara terbatas dan limitatif ditinjau dari aspek kepastian hukum, akan tercapai apabila telah ada aturan hukum secara tertulis yang telah diakui untuk mengatur hal tersebut. Kehadiran dari sebuah aturan sebagai sebuah pranata akan membawa konsekuensi kepada pelaksanaan aturan yang telah menjadi pranata tersebut, sehingga bagi siapa saja yang melanggar akan mendapat sanksi atas perbuatan tersebut.

Permasalahan yang muncul dalam proses pembuktian dalam perkara perdata seperti diatur dalam HIR dan RBg sebagai warisan kolonial Belanda, belum mengakomodir mengenai penggunaan dan kedudukan alat bukti elektronik dalam proses pemeriksaan perkara perdata di pengadilan. Hal ini merupakan suatu kewajiban karena, kedudukan HIR dan RBg yang lahir serta, diberlakukan beberapa abad yang lalu belum menggunakan media elektronik dalam lalu lintas hubungan keperdataan. Hubungan keperdataan yang berlaku ketika HIR dan RBg diterapkan

dalam praktek hukum acara perdata pada zaman kolonial Belanda hanya terbatas kepada hubungan keperdataan yang bersifat konvensional.

Keberlakuan HIR dan RBg pasca kemerdekaan Republik Indonesia sebagai pedoman praktik pemeriksaan perkara di pengadilan yang meliputi perkara pidana dan perdata, diakui keberlakuannya oleh pemerintah berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1951. Pembuktian dalam praktik perkara perdata yang berlangsung hingga saat ini, sepenuhnya masih bersandar kepada prinsip yang dianut oleh HIR dan RBg. Persoalan kodifikasi hukum acara perdata yang baru, menurut Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata menyatakan hingga saat ini hukum acara perdata nasional belum diatur dalam undang-undang meskipun rancangan undang-undang tentang hukum acara perdata dalam lingkungan peradilan umum telah disahkan oleh sidang pleno BP LHPN ke XIII tanggal 12 Juni 1967¹⁸⁶.

Meningkatnya laju dan perkembangan pergaulan dalam kehidupan manusia turut mempengaruhi aspek perkembangan hukum disatu sisi. Kehadiran HIR dan RBg sebagai produk hukum beberapa abad yang lalu, secara otomatis tidak dapat menampung aspek perkembangan hukum yang terjadi, ketika didasarkan kepada perkembangan pergaulan dalam kehidupan sehari-hari, mengenai peristiwa hukum dalam lalu lintas hubungan keperdataan.

Lahirnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagai sebuah pengakuan terhadap munculnya transaksi

¹⁸⁶Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, h. 5.

elektronik dapat dikatakan sebagai upaya ke arah pembaharuan hukum. Bagaimana tidak, dalam undang-undang tersebut dikatakan bahwa pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi¹⁸⁷. Pandangan mengenai pemanfaatan Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) apabila ditarik dalam perspektif ranah hukum tentu memberikan pengertian adanya keharusan untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi pengguna transaksi elektronik. Mengenai hal ini, dapat dilihat pada frase kata “keadilan” dan “kepastian hukum”. Keadilan dan kepastian hukum dalam praktik penggunaan transaksi elektronik belum dapat memberikan perlindungan hukum secara utuh dalam lalu lintas hubungan keperdataan, mengingat transaksi yang dilakukan secara elektronik dalam lalu lintas hubungan keperdataan saat ini, tidak menutup kemungkinan dilakukan secara global, dan melintasi sekat-sekat antar bangsa maupun negara, sehingga terhadap perlindungan hukum dalam transaksi elektronik secara yurisdiksi menimbulkan perbedaan hukum yang diterapkan ketika terjadi sengketa.

Permasalahan yang dihadapi dalam transaksi hubungan keperdataan yang dilakukan secara elektronik, selain mengenai yurisdiksi hukum yang diterapkan, penulis menyimpulkan beberapa masalah yang dapat menjadi kendala dalam

¹⁸⁷Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik* pasal 4.

penggunaan transaksi elektronik meliputi, adalah aspek perjanjian elektronik, tanda tangan elektronik, serta, jual beli yang dilakukan secara elektronik (*online*).

1.) Problematika Alat Bukti dari segi Aspek Perjanjian Elektronik

Aspek perjanjian yang dilakukan secara elektronik setidaknya dapat menimbulkan problem tersendiri. Dalam pasal 1320 KUH Perdata menyebutkan klausul syarat sahnya suatu perjanjian atau yang biasa disebut dengan perikatan adalah; adanya kerelaan/kesepakatan masing-masing pihak untuk mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian, cukup umur (dewasa), klausul perjanjian adalah suatu hal yang dibolehkan (halal), dan adanya obyek tertentu dari perjanjian tersebut.

Kendala yang dapat ditemui terhadap perjanjian yang dilakukan secara elektronik apabila diperspektifkan berdasar pada pasal 1320 KUH Perdata, adalah tidak adanya jaminan kepastian bahwa masing-masing pihak yang mengikatkan dirinya dalam sebuah perjanjian adalah orang dewasa. Hal ini dimungkinkan terjadi karena, sifat dari perjanjian elektronik memungkinkan masing-masing pihak untuk tidak bertemu secara langsung (tatap muka). Sehingga, dengan adanya persoalan tersebut dimana salah satu pihak belum dikategorikan dalam usia dewasa/cukup umur dengan sendirinya perjanjian yang dilakukan batal demi hukum. Selain itu, permasalahan yang selanjutnya menjadi kendala yakni, batasan mengenai usia dewasa bagi seseorang yang oleh undang-undang ditentukan secara beragam. Dalam Undang-undang Ketenagakerjaan misalnya, disebutkan bahwa usia seseorang hingga dikatakan telah dewasa ketika mencapai usia 18 tahun. Terhadap pelanggaran

mengenai ketentuan usia dewasa yang telah ditetapkan oleh Undang-undang Ketenagakerjaan, dapat dikategorikan sebagai kejahatan “eksploitasi terhadap anak”.

Kriteria usia dewasa bagi seseorang berdasarkan perspektif dalam Undang-undang Perkawinan disebutkan bahwa bagi laki-laki minimal berusia 19 tahun dan bagi perempuan berusia 16 tahun. Pengaturan mengenai kriteria usia dewasa dalam undang-undang perkawinan tersebut membawa konsekuensi bahwa perkawinan tidak dibolehkan bagi mereka yang belum mencapai umur 19 tahun bagi laki-laki, dan 16 tahun bagi perempuan. Terhadap ketentuan ini oleh undang-undang memberikan pengecualian mengenai dibolehkannya pelaksanaan perkawinan bagi mereka yang belum cukup umur setelah memperoleh izin dispensasi dari pengadilan.

Penentuan usia dewasa bagi seseorang berdasarkan Undang-undang Pemilu adalah ketika orang tersebut telah dinyatakan berumur 17 tahun. Penentuan usia dewasa dalam undang-undang pemilu membawa konsekuensi bahwa seseorang yang telah berusia minimal 17 tahun berarti telah berhak untuk memberikan hak pilihnya dalam pemilu, sebaliknya bagi mereka yang belum dinyatakan berumur 17 tahun maka, terhadap orang tersebut belum dapat menggunakan hak pilihnya serta, dilarang untuk mengikuti segala rangkaian dan tahapan proses dalam pemilu.

Batasan usia dewasa bagi seseorang dalam KUH Perdata ditentukan dengan batasan usia 20 tahun. Terhadap batasan mengenai usia dewasa dalam KUH Perdata membawa konsekuensi bahwa seseorang belum dianggap cakap melakukan suatu perbuatan hukum dan hubungan keperdataan lain ketika usianya dinyatakan belum

mencapai 20 thn. Ketentuan mengenai usia dewasa bagi seseorang perspektif KUH Perdata setidaknya mengundang pertanyaan tersendiri, apakah tindakan jual-beli yang dilakukan oleh orang yang belum mencapai usia 20 tahun dinyatakan tidak sah?

Kriteria usia dewasa bagi seseorang yang tidak seragam dalam berbagai perspektif aturan perundang-undangan, membawa implikasi bahwa belum dapat ditarik kesimpulan secara umum mengenai usia seseorang boleh dikatakan dewasa, sehingga dapat bertindak secara cakap dalam melakukan suatu perbuatan hukum. Penentuan usia dewasa dalam praktik lalu lintas hubungan keperdataan secara umum dapat ditarik sebagai kesimpulan yakni umur 20 tahun. Hal ini menurut penulis, mengacu kepada ketentuan KUH Perdata.

2.) Problematika Alat Bukti dari segi tanda tangan elektronik

Permasalahan selanjutnya yang menjadi kendala dalam proses pembuktian perkara perdata terkait dengan penggunaan alat bukti elektronik adalah aspek tanda tangan elektronik/digital. Penggunaan tanda tangan secara elektronik (*digital signature*) dalam kontrak perjanjian elektronik, dapat membawa problem tersendiri, karena secara yuridis hal ini baru diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Abdul Halim Barkatullah menyatakan bahwa dalam suatu kontrak tanda tangan diperlukan untuk menyatakan persetujuan dari para pihak yang menandatangani terhadap suatu kontrak, selain itu dikemukakan pula bahwa tanda

tangan juga dapat menjadi bukti bahwa para pihak telah mengetahui dan menyatakan keaslian suatu kontrak¹⁸⁸.

Pendapat yang dikemukakan oleh Abdul Halim Barkatullah mengenai kedudukan tanda tangan (*signature*) sebagai syarat adanya persetujuan dari para pihak terhadap suatu kontrak dan sebagai bukti bahwa para pihak telah mengetahui isi dari suatu kontrak tersebut, apabila diperspektifkan dengan tanda tangan elektronik (*digital signature*) dapat memunculkan sebuah pertanyaan baru, apakah sebuah tanda tangan elektronik (*digital signature*) dapat menjamin keautentikan sebuah tanda tangan secara asli atau rentan terhadap pemalsuan? sebelum menjawab pertanyaan di atas mengenai keautentikan sebuah tanda tangan elektronik (*digital signature*), penulis akan mengemukakan tujuan penandatanganan sebuah dokumen yakni;

- a. Sebagai bukti (*evidence*): suatu tanda tangan akan mengautentifikasikan penandatanganan dengan dokumen yang ditandatanganinya. Pada saat penandatanganan membubuhkan tanda tangan dalam suatu bentuk khusus, tulisan tersebut akan mempunyai hubungan (*attribute*) dengan penandatanganan.
- b. Sebagai *ceremony*: penandatanganan suatu dokumen akan berakibat penandatanganan tahu bahwa ia telah melakukan suatu perbuatan hukum, sehingga akan mengeliminasi kemungkinan adanya *inconsiderate angagement*.
- c. Sebagai persetujuan (*approval*): penggunaannya dalam berbagai konteks baik oleh hukum atau oleh kebiasaan, tanda tangan melambangkan adanya persetujuan atau otorisasi terhadap suatu tulisan, atau penandatanganan telah

¹⁸⁸ Abdul Halim Barkatullah, *Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Transaksi E-commerce Lintas Negara di Indonesia*, h. 50.

secara sadar mengetahui bahwa tanda tangan tersebut mempunyai sebuah konsekuensi hukum¹⁸⁹.

Tujuan dan kedudukan dari sebuah tanda tangan (*signature*) yang menjadi sebuah bukti (*evidence*) dalam hubungan keperdataan secara elektronik dapat menimbulkan celah hukum dalam penggunaannya. Hal ini disebabkan karena tanda tangan yang dilakukan secara elektronik (*digital signature*) tersebut ternyata sangat rentan untuk dipalsukan. Pemalsuan sebuah tanda tangan (*signature*) dapat dilakukan dalam transaksi yang berlangsung secara konvensional, maupun kegiatan transaksi yang dilakukan secara elektronik karena, kemajuan dalam bidang Ilmu Pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang mengakibatkan modus operandi dari sebuah kejahatan dalam hal ini pemalsuan sebuah tanda tangan (*signature*) semakin canggih pula. Tujuan daripada sebuah tanda tangan (*signature*) sebagai persetujuan (*approval*) terhadap suatu kontrak tertentu, yang berarti bahwa penandatanganan secara materil telah memberikan persetujuan terhadap isi dari kontrak tersebut belum dapat dijamin keautentikannya mengingat sebuah tanda tangan digital (*digital signature*) ternyata dapat dipalsukan. Permasalahan mengenai adanya hal ini, para pihak dalam transaksi elektronik harus menjamin validitas atau keaslian terhadap suatu kontrak atau transaksi.

Pengaturan yang berkaitan dengan penggunaan tanda tangan digital (*digital signature*) dalam sebuah kontrak atau transaksi dagang bersifat penting, mengingat

¹⁸⁹Abdul Halim Barkatullah, *Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Transaksi E-commerce Lintas Negara di Indonesia*, h. 51.

lalu lintas dalam hubungan keperdataan yang tumbuh semakin pesat, serta meningkatnya penggunaan media elektronik/internet disatu sisi, memerlukan sebuah pengaturan hukum yang cukup jelas. Kedudukan dari sebuah tanda tangan digital (*digital signature*) memiliki kaitan yang erat dengan *confidentiality*, *integrity*, dan *authenticity*¹⁹⁰. Frase kata “*confidentiality*” berarti kerahasiaan yakni, suatu pesan tidak boleh dapat dibaca atau diketahui oleh orang yang tidak berkepentingan¹⁹¹.

Jaminan kerahasiaan dari sebuah tanda tangan elektronik (*digital signature*) menurut penulis adalah sebuah hal yang cukup esensial. Kedudukan sebuah tanda tangan digital (*digital signature*) yang cukup hanya diketahui oleh para pihak yang telah mengikatkan dirinya dalam sebuah kontrak tertentu, dapat memberikan privasi kepada para pihak sehingga, substansi materi dari hal yang disepakati menjadi butir kesepakatan tersebut dapat terjamin keasliannya.

Frase kata “*integrity*” berarti integritas atau keutuhan, yakni penerima harus yakin bahwa pesan yang diterimanya tidak pernah diubah sejak pesan itu dikirim sampai diterima¹⁹². Kegiatan transaksi elektronik atau kontrak yang dilakukan diantara para pihak, harus menjamin keutuhan dari informasi yang dikirimkan oleh salah satu pihak terhadap pihak lainnya. Penulis berpendapat bahwa *integrity* dan

¹⁹⁰Abdul Halim Barkatullah, *Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Transaksi E-commerce Lintas Negara di Indonesia*, h. 123.

¹⁹¹Abdul Halim Barkatullah, *Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Transaksi E-commerce Lintas Negara di Indonesia*, h. 123.

¹⁹²Abdul Halim Barkatullah, *Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Transaksi E-commerce Lintas Negara di Indonesia*, h.123.

authenticity yang berarti keutuhan dan keaslian dari sebuah transaksi atau kontrak yang dilakukan secara elektronik memerlukan verifikasi atau pengecekan ulang terhadap keutuhan dan keaslian dari sebuah informasi yang dikirim secara elektronik yang dilakukan oleh para pihak yang mengikatkan dirinya dalam sebuah transaksi atau kontrak yang dilakukan secara elektronik.

3.) Problematika Alat Bukti dari segi praktik jual beli *on line*

Aspek mendasar yang selanjutnya menjadi permasalahan dalam transaksi elektronik adalah jual beli yang dilakukan melalui internet (*on line*). Praktik jual beli secara *on line* telah menggeser kedudukan jual beli konvensional secara perlahan-lahan. Kemudahan yang ditawarkan dalam transaksi jual beli secara *on line* seperti, efisiensi, merupakan pertimbangan utama menurut penulis sehingga, praktik jual beli secara *on line* semakin banyak diminati. Selain itu, barang yang ditawarkan dalam transaksi *on line* tersebut semakin beragam dan cukup variatif.

Permasalahan yang dapat muncul dalam transaksi jual beli secara *on line* tersebut adalah, mengenai penggunaan transkrip pembelian yang menjadi pegangan para pihak ketika terjadi sengketa dikemudian hari. Kedudukan transkrip elektronik belum diakomodir dalam ketentuan sebagai alat bukti dalam hukum acara yang berlaku di pengadilan. Kondisi seperti ini, akan membawa para pihak terutama konsumen berada dalam situasi ketidakpastian atau dilema hukum. Ketentuan mengenai alat bukti yang diatur secara limitatif atau bersifat terbatas dalam proses pembuktian perdata mengakibatkan transkrip elektronik secara utuh dan penuh,

belum dapat diterima sebagai alat bukti di pengadilan. Sebagai contoh, dalam transaksi jual beli melalui internet menempatkan konsumen dalam posisi tawar yang lemah. Hal ini dapat dilihat bahwa informasi mengenai keadaan suatu barang tertentu sepenuhnya dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha¹⁹³.

Posisi konsumen dalam transaksi jual beli melalui internet tidak memberikan peluang kepada konsumen untuk melihat, mengidentifikasi dan menyentuh barang secara langsung, karena sifat dari transaksi yang dilakukan tanpa melalui tatap muka secara langsung. Keadaan seperti di atas, akan menimbulkan persengketaan dikemudian hari, apabila kualitas barang yang diperjanjikan/dijual, tidak sesuai dengan kenyataan. Terhadap permasalahan seperti ini, memerlukan suatu regulasi pengaturan yang cukup jelas mengenai proses pembuktian sengketa yang terjadi. Selain itu, pemberlakuan aturan hukum negara mana yang akan diterapkan ketika terjadi persengketaan kegiatan jual beli yang dilakukan secara elektronik, mengingat transaksi melalui internet tidak hanya meliputi satu wilayah karena dapat mencakup antar benua yang tidak mengenal batas geografis dan yurisdiksi hukum¹⁹⁴.

Penentuan yurisdiksi hukum dalam kegiatan transaksi elektronik atau jual beli secara *on line* merupakan hal penting, karena dengan adanya yurisdiksi hukum tertentu berarti para pihak dapat menuntut keadilan dan kepastian atas permasalahan yang dihadapi. Penegakan aturan hukum tersebut dapat menjamin kebebasan dan

¹⁹³ Abdul Halim Barkatullah, *Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Transaksi E-commerce Lintas Negara di Indonesia*, h. 46.

¹⁹⁴ Iman Sjahputra, *Problematika Hukum Internet Indonesia*. (Cet. I; Jakarta: PT. Prenhallindo, 2002), h. 93.

hak-hak para pihak dalam suatu perkara. Persoalan yang muncul dalam transaksi yang dilakukan secara elektronik adalah sifat dari kegiatan transaksi yang memungkinkan dilakukan antar negara bahkan antar benua. Apakah aturan hukum negara pelaku usaha yang diterapkan atau aturan hukum negara dari konsumen sebagai pihak yang dirugikan.

Ketidakpastian mengenai penentuan yurisdiksi hukum dalam transaksi jual beli secara elektronik, dapat mengakibatkan adanya ketidakpercayaan dan keraguan bagi kalangan tertentu untuk tetap melakukan transaksi elektronik. Penentuan mengenai yurisdiksi hukum dalam menangani persoalan yang muncul terhadap transaksi yang dilakukan melalui dunia internet tetap harus mempertimbangkan kedudukan hukum perdata internasional, karena lalu lintas dalam hubungan keperdataan saat ini telah menjangkau aspek keperdataan dalam lingkup global.

Pengaturan mengenai aspek yurisdiksi hukum dan pembaharuan hukum dalam acara perdata, setidaknya dapat mengakomodasi berbagai persoalan yang muncul dalam lalu lintas hubungan keperdataan, selain itu diharapkan untuk dapat mengakomodir berbagai bentuk hubungan keperdataan yang dilakukan pada saat ini. Kedudukan transkrip elektronik sebagai bukti pegangan oleh para pihak dalam melakukan transaksi, terutama praktik jual beli secara *on line* dapat dikatakan sebagai upaya pembaharuan hukum disatu sisi, yang memberikan kepastian kepada pihak-pihak tertentu (konsumen) dalam menyelesaikan persoalan, sekaligus memberi

kepastian mengenai kedudukan transkrip elektronik sebagai alat bukti yang dapat dipergunakan dalam proses pembuktian litigasi.

*3. Analisis Yuridis Kedudukan dan Kekuatan Alat Bukti Elektronik,
Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik (ITE)*

Penggunaan alat bukti elektronik secara sah diakui dengan adanya Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) pada pasal 5 ayat (2) yang berbunyi;

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia¹⁹⁵.

Permasalahan mengenai penggunaan dan kedudukan alat bukti elektronik dalam proses pembuktian perkara perdata di pengadilan, tidak dapat dikatakan telah tuntas meskipun terdapat ketentuan undang-undang yang mengatur kedudukan alat bukti elektronik secara sah dikategorikan sebagai alat bukti. Proses pembuktian di pengadilan baik pidana dan perdata, merupakan sebuah tahapan/rangkaian yang sangat penting karena, pada tahapan pembuktian seorang terdakwa akan dinyatakan bersalah, atau seorang tergugat dinyatakan kalah oleh majelis hakim. Adanya pengakuan terhadap kedudukan alat bukti elektronik, masih menyisakan sebuah

¹⁹⁵Pasal 5 Undang-undang RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

pertanyaan penting, yakni bagaimanakah kekuatan pembuktian dari alat bukti elektronik tersebut.

Analisis kekuatan pembuktian dari suatu alat bukti elektronik, sebagaimana tercantum dalam pasal 5 ayat (4) menyebutkan bahwa alat bukti elektronik tidak dapat berlaku untuk hal-hal tertentu seperti;

- a. Surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis.
- b. Surat beserta dokumennya yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Pemahaman yang dapat disimpulkan dari redaksi pasal di atas, bahwa suatu alat bukti elektronik tertentu yang dinyatakan tidak berlaku oleh undang-undang, harus dibuat secara tertulis atau harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau pejabat pembuat akta. Pengecualian mengenai kedudukan serta kekuatan alat bukti elektronik selain yang disebutkan pada pasal di atas, dinyatakan sah dan dapat diterima dalam proses pembuktian di pengadilan. Mengenai, kekuatan pembuktian yang melekat pada suatu alat bukti elektronik, secara otomatis masih perlu untuk dikaji karena, hal ini tentu akan mengundang perbedaan pendapat di antara kalangan, sehingga secara normatif-positif kekuatan alat bukti elektronik dapat ditentukan.

Rumusan redaksi pasal 7 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik (ITE) dapat menjadi adanya peneguhan suatu hak atau peristiwa yang menjadi dasar adanya suatu persengketaan sebagaimana redaksi

bunyi pasal 163 HIR/283 RBg. Rumusan pasal 7 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 selengkapnya berbunyi sebagai berikut;

Setiap orang yang menyatakan hak, memperkuat hak yang telah ada, atau menolak hak orang lain berdasarkan adanya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik harus memastikan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ada padanya berasal dari Sistem Elektronik yang memenuhi syarat berdasarkan Peraturan Perundang-undangan¹⁹⁶.

Kedudukan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dapat menjadi dasar adanya suatu persengketaan seperti rumusan pasal 7 di atas, menurut hemat penulis merupakan perluasan mengenai dasar gugatan/sengketa yang tercantum dalam hukum acara perdata pasal 163 HIR/283 RBg/1865 KUH Perdata. Rumusan pasal 7 yang mengakui informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagai titik pangkal adanya suatu persengketaan, merupakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh negara melalui undang-undang bagi pihak yang melakukan transaksi hubungan keperdataan di era globalisasi.

Ketentuan mengenai peraturan perundang-undangan yang secara sah dan tegas mengakui informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagai dasar adanya suatu persengketaan, maka menurut hemat penulis, kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti elektronik¹⁹⁷ harus ditentukan. Permasalahan mengenai kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti elektronik selanjutnya dapat

¹⁹⁶Pasal 7 Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik (ITE).

¹⁹⁷Penulis berpendapat alat bukti elektronik adalah informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana rumusan pasal 5 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008.

dilihat dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Penjelasan umum undang-undang tersebut menyatakan bahwa;

“Dalam kegiatan *e-commerce* antara lain dikenal adanya dokumen elektronik yang kedudukannya disetarakan dengan dokumen yang dibuat di atas kertas”¹⁹⁸.

Kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti elektronik, oleh Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang menyatakan bahwa dokumen elektronik disetarakan dengan dokumen yang dibuat di atas kertas. Hal ini, berarti bahwa kekuatan pembuktian dokumen elektronik dalam praktik perkara perdata dipersamakan dengan kekuatan alat bukti tulisan (surat). Penyetaraan kedudukan dokumen elektronik yang disetarakan dengan dokumen yang di buat di atas kertas, dapat memunculkan sebuah pertanyaan, yakni apakah salinan dokumen elektronik mempunyai kekuatan pembuktian yang sama dengan dokumen asli, mengingat prinsip suatu dokumen elektronik tidak dapat dibedakan dengan dokumen yang asli, sebagaimana halnya *foto copy* sebagai sebuah salinan tentu dapat dibedakan dengan dokumen yang asli.

Kedudukan salinan suatu dokumen elektronik menurut penjelasan umum pasal 6 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) menyatakan prinsip penggandaan sistem elektronik mengakibatkan

¹⁹⁸Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

informasi yang asli tidak dapat dibedakan dengan salinannya, sehingga hal tersebut tidak relevan lagi untuk dibedakan. Mengenai hal tersebut, dapat dilihat penjelasan pasal 6 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang berbunyi sebagai berikut;

Selama ini bentuk tertulis identik dengan informasi dan/atau dokumen yang tertuang di atas kertas semata, padahal pada hakikatnya informasi dan/atau dokumen elektronik dapat dituangkan ke dalam media apa saja, termasuk media elektronik. Dalam lingkup sistem elektronik informasi yang asli dengan salinannya tidak relevan lagi untuk dibedakan sebab sistem elektronik pada dasarnya beroperasi dengan cara penggandaan yang mengakibatkan informasi yang asli tidak dapat dibedakan lagi dari salinannya¹⁹⁹.

Kesimpulan yang dapat ditarik berdasarkan penjelasan pasal 6 di atas menurut penulis, bahwa dokumen elektronik tidak memerlukan adanya suatu dokumen asli dalam proses pembuktian, sepanjang dokumen elektronik tersebut dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, serta dapat dipertanggung jawabkan untuk dapat menerangkan suatu keadaan, sebagaimana redaksi rumusan pasal 6 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi sebagai berikut;

Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum didalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin

¹⁹⁹Pasal 6 Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga dapat menerangkan suatu keadaan²⁰⁰.

Mengenai kekuatan pembuktian yang melekat terhadap sebuah tanda tangan elektronik, dapat dilihat dalam ketentuan pasal 11 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang berbunyi sebagai berikut;

Tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan sebagai berikut;

- a. Data pembuatan tanda tangan elektronik terkait hanya kepada penanda tangan.
- b. Data pembuatan tanda tangan elektronik pada saat proses hanya berada dalam kuasa penandatanganan.
- c. Segala perubahan terhadap tanda tangan elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui.
- d. Segala perubahan terhadap informasi elektronik yang terkait dengan tanda tangan elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui.
- e. Terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa penandatangerannya.
- f. Terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa penandatanganan telah memberikan persetujuan terhadap informasi elektronik yang terkait²⁰¹.

Kekuatan pembuktian yang melekat pada suatu tanda tangan elektronik dipersamakan dengan kekuatan pembuktian yang melekat pada tanda tangan manual. Hemat penulis, redaksi rumusan pasal 11 di atas, pada huruf “a” yang menyatakan data pembuatan tanda tangan elektronik terkait hanya dengan penandatanganan. Ketentuan ini dapat dipahami, bahwa kekuatan pembuktian dalam

²⁰⁰Pasal 6 Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

²⁰¹Pasal 11 Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

sebuah tanda tangan manual juga memiliki kekuatan yang sama yakni, hanya terkait dengan penandatanganan. Hal ini dapat disimpulkan bahwa kekuatan sebuah tanda tangan mengikat terhadap pihak penandatanganan secara pribadi dan terhadap pihak lain.

Kekuatan mengikat dalam suatu tanda tangan, mempunyai kekuatan mengikat ke dalam dan kekuatan mengikat ke luar. Keadaan seperti ini dapat dipahami, bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam urusan suatu penandatanganan berarti, secara langsung terikat terhadap butir-butir kesepakatan yang telah ditandatangani tersebut. Keterikatan para pihak dalam suatu urusan penandatanganan, berlaku sepanjang kesepakatan tersebut tidak menyalahi ketentuan pokok hukum perikatan yang termaktub dalam pasal 1320 KUH Perdata, atau belum mencapai batas waktu yang telah diperjanjikan, hal ini berlaku dalam hubungan suatu kontak, misalnya. Mengenai adanya sejumlah persyaratan yang menyatakan kekuatan pembuktian tanda tangan elektronik seperti di atas, sebagaimana disebut dalam penjelasan pasal 11 Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) merupakan syarat minimum yang harus dipenuhi dalam setiap tanda tangan elektronik. Lebih lanjut dikatakan ketentuan dalam pasal 11 membuka kesempatan seluas-luasnya kepada siapapun untuk mengembangkan metode, teknik, atau proses pembuatan tanda tangan elektronik.

1.) Analisis kekuatan pembuktian berdasar KUH Perdata

Kekuatan pembuktian dokumen elektronik yang disetarakan dengan dokumen yang dibuat di atas kertas, menurut penjelasan umum Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), menurut penulis dipandang perlu untuk memahami kekuatan pembuktian alat bukti tertulis (surat) sebagaimana yang tercantum dalam KUH Perdata. Kekuatan pembuktian dokumen elektronik yang secara tegas diakui, dan disetarakan dengan dokumen yang dibuat diatas kertas, sangat memungkinkan untuk dilakukan, mengingat sifat dari informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dapat dialihkan kedalam beberapa bentuk atau dicetak dalam bentuk *print out* sehingga, dipersamakan dengan dokumen yang dibuat di atas kertas.

Dokumen yang dibuat di atas kertas, dalam praktik hukum acara perdata, dikategorikan sebagai alat bukti tertulis (surat). Kedudukan alat bukti tertulis dalam praktik perkara perdata adalah termasuk kedalam alat bukti yang paling utama. Sudikno Mertokusumo membagi alat bukti tertulis (surat) ke dalam 2 (dua) kategori bentuk yakni, surat yang merupakan akta dan surat-surat lainnya yang bukan akta²⁰². Lebih lanjut dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo bahwa akta sendiri dibagi menjadi 2 (dua) kategori yakni akta autentik dan akta bawah tangan²⁰³.

²⁰²Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia edisi revisi*, h. 158.

²⁰³Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia edisi revisi*, h. 158.

Ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pembuktian perdata, yang menyatakan bahwa akta autentik adalah akta yang bentuknya telah ditentukan oleh undang-undang, serta dibuat oleh dan/atau dihadapan pejabat umum yang berwenang. Kekuatan pembuktian yang melekat pada suatu akta autentik merupakan bukti sempurna dan mengikat bagi kedua belah pihak. Terhadap adanya cacat formil yang terkandung dalam sebuah akta autentik, maka kekuatan pembuktian yang melekat tersebut, hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana akta bawah tangan. Kekuatan pembuktian yang melekat pada akta autentik meskipun bersifat sempurna, dan mengikat bagi kedua belah pihak tetap dimungkinkan untuk dilumpuhkan dengan adanya bukti lawan.

Kedudukan informasi elektronik dan/atau Dokumen elektronik yang bersifat dapat dialihkan ke dalam beberapa bentuk media lainnya atau dapat di *print out* sehingga dapat berbentuk dokumen tertulis, jika dipersfektikan dalam ranah hukum acara perdata, tetap membuka peluang kemungkinan adanya bukti lawan (*tegenbewijs*). Penulis berpendapat bahwa hasil *print out* dari dokumen elektronik seperti, transaksi jual beli *on line* misalnya, kedudukan transkrip pembayaran elektronik yang dapat dipergunakan sebagai alat bukti adanya sengketa jual beli, tetap membuka kemungkinan adanya upaya untuk meningkari keabsahan suatu alat bukti, dalam hal ini pihak yang meningkari alat bukti transkrip tersebut dibebani kewajiban untuk membuktikan bahwa hasil *print out* transkrip elektronik tersebut tidak benar.

Tugas dan peranan hakim dalam menilai suatu alat bukti elektronik yang dapat dipergunakan dalam praktik persidangan di pengadilan, boleh dikatakan masih sangat beragam. Mengenai kekuatan pembuktian dari alat bukti elektronik, ada yang berpendapat bahwa alat bukti elektronik merupakan alat bukti baru sebagai perluasan alat bukti dalam persidangan sebagaimana tercantum secara tegas dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008, dan ada pula pendapat yang menyatakan kekuatan pembuktian dari alat bukti elektronik merupakan alat bukti permulaan, yakni alat bukti yang tidak dapat berdiri sendiri dan harus ditunjang dengan alat bukti lain²⁰⁴.

Hemat penulis, alat bukti elektronik merupakan alat bukti sebagai perluasan jenis alat bukti yang telah ditentukan secara limitatif dan bersifat terbatas baik yang tercantum dalam pasal 184 KUHP, maupun dalam pasal 1866 KUH Perdata. Mengenai kekuatan pembuktian yang melekat dalam suatu alat bukti elektronik tertentu, penulis berpendapat bahwa alat bukti elektronik tetap memungkinkan untuk dilumpuhkan dengan adanya bukti lawan (*tegenbewijs*). Hal ini tidak berarti, bahwa alat bukti elektronik, mempunyai kekuatan pembuktian yang bersifat *final* yang tidak dapat dilumpuhkan dengan alat bukti apapun.

Permasalahan mengenai adanya bukti lawan (*tegenbewijs*) dalam praktik perkara di persidangan, terhadap kekuatan pembuktian suatu alat bukti elektronik

²⁰⁴Drs. Ikbal, SH. MH, Hakim Pembimbing di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar, Wawancara oleh Penulis bertempat di ruangan hakim, 8 Oktober 2015.

merupakan tugas dan peranan seorang hakim untuk menilai fakta-fakta yang terbukti, berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa.

B. Penilaian Hakim

1. Contoh Kasus di Pengadilan Agama kelas 1A Makassar mengenai Penggunaan Alat Bukti Elektronik

Dengan ditetapkannya Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Sehubungan dengan hasil observasi, wawancara, kuesioner dan dokumentasi dalam penelitian ini, maka untuk mengerti secara komprehensif mengenai pembuktian, perlu dipahami tentang aspek dari pembuktian yang terjadi di pengadilan Agama Kelas 1A Makassar,

Alat bukti dalam perkara perdata di pengadilan Agama menurut Pasal 164 HIR/Pasal 284 R.Bg ialah:

- a. Alat bukti surat
- b. Alat bukti saksi
- c. Alat bukti persangkaan
- d. Alat bukti pengakuan
- e. Alat bukti sumpah
- f. Pemeriksaan di tempat (Pasal 153 HIR / Pasal 180 R.Bg)
- g. Saksi Ahli (Pasal 154 HIR / Pasal 181 R.Bg)
- h. Pembukuan (Pasal 167 HIR / Pasal 296 R.Bg)
- i. Pengetahuan Hakim (Pasal 178 (1) HIR,UU-MA No. 14 / 1985)

Semua alat bukti tersebut tentunya untuk dipergunakan membuktikan peristiwa yang dikemukakan di muka sidang, tiap-tiap alat bukti mempunyai kekuatan pembuktian tersendiri menurut hukum pembuktian.

Sesuai dengan data yang telah diputus di pengadilan Agama Kelas 1A Makassar tahun 2015, mengenai kasus perceraian para pihak yang berperkara di pengadilan Agama selalu menyertakan bukti transaksi elektronik di hadapan para hakim,²⁰⁵ salah satu contoh kasus:

A. 1. Nomor Perkara: 1524/Pdt.G/2015/PA.Mks. Haslinda binti Abdul Muttalib Umur 16 Tahun (pengugat) melawan Agus Wahyudi bin Abdul Rauf 18 Tahun (tergugat), Duduk Perkara:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 31 Agustus 2015 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Register Perkara Nomor 1524/Pdt.G/2015/PA.Mks tanggal 01 September 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2014 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidrap dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0164/0002/VII/2014, tanggal 11 Juni 2014.
- b. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur.

²⁰⁵Drs. Ikbil, SH. MH, Hakim Pembimbing di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar, Wawancara oleh Penulis bertempat di ruangan hakim, 9 Oktober 2015.

- c. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 1 tahun 2 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan pernah melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*) namun tidak dikaruniai anak.
- d. Bahwa pada akhir bulan Desember 2014 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran.
- e. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut: Tergugat mengonsumsi zat terlarang (Narkoba), Tergugat mengambil uang dan emas milik Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat.
- f. Penggugat telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/ rumah tangga tetapi tidak berhasil, karena Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk itu.
- g. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama ke rumah orang tua Penggugat sejak akhir bulan Desember 2014 sampai/ sekarang dan selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami antara tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.
- h. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat dari pada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh

menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu bā'in shughrā tergugat terhadap Penggugat.

B. 1. Kronologis Persidangan

Penggugat dalam meneguhkan dalil-dalil gugatannya, dan telah melengkapi alat bukti yang telah ditetapkan sesuai Pasal 164 HIR/Pasal 284 R.Bg, termasuk salah satu jenis alat bukti elektronik.

C. 1. Analisis

Bahwa selama proses persidangan tergugat telah melengkapi seluruh alat bukti termasuk alat bukti elektronik yaitu salinan *Short Message Service* yang dimasukkan dalam kategori alat bukti tertulis dan di perhadapkan di hadapan hakim, dan hakim dengan keyakinannya menilai alat bukti tersebut, dalam kasus ini dan kasus-kasus yang ditangani oleh pengadilan Agama Kelas 1A Makassar hakim menggolongkan alat bukti elektronik dalam kategori alat bukti tambahan, yang mana masing-masing alat bukti memiliki kekuatan pembuktian tersendiri²⁰⁶.

Sejauh ini dalam praktik pembuktian di pengadilan Agama kelas 1A Makassar dari berbagai kasus yang ditangani sesuai dengan kompetensi peradilan Agama, dalam berbagai kasus pihak yang berperkara meyeritakan alat bukti elektronik seperti salinan sms (*Short Message Service*), foto, Dokumen elektronik, salinan transaksi anjungan tunai mandiri (ATM) dan rekaman telepon, untuk saat

²⁰⁶Drs. Chairuddin, SH. MH, Hakim Pembimbing di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar, Wawancara oleh penulis bertempat di ruangan hakim, 9 Oktober 2015.

ini hanya sebatas alat bukti elektronik tersebut yang ditangani oleh Hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar.

2. Analisis Putusan Hakim dalam Memutuskan Perkara yang menggunakan Alat Bukti Elektronik di Pengadilan Agama Kelas 1 A Makassar

Hakim adalah orang yang paling berkuasa dalam memutus suatu perkara yang diselesaikan di pengadilan, dengan terlebih dahulu menentukan serta menilai kekuatan pembuktian terhadap alat bukti yang diajukan oleh para pihak yang berperkara. Hal tersebut sejalan dengan teori pembuktian bebas.

Teori pembuktian bebas merupakan teori yang menyatakan bahwa penilaian pembuktian diserahkan sepenuhnya kepada hakim, tidak menghendaki adanya ketentuan yang mengikat hakim dalam menilai pembuktian. Menurut teori ini, hakim sepenuhnya berhak memutuskan suatu perkara berdasarkan alat-alat bukti yang ada di persidangan tanpa dipengaruhi oleh undang-undang dan pertimbangan-pertimbangan lain yang membatasi keyakinan hakim. Hal ini tidak terlepas dari salah satu asas dalam Hukum Acara Perdata yaitu *Ius Curia Novit*, bahwa hakim dianggap tahu hukum dan telah memahami suatu perkara sehingga putusan hakim dari pembuktian dianggap sah secara hukum²⁰⁷.

Selain itu ada pula teori pembuktian negatif yang menyatakan bahwa adanya ketentuan yang mengikat, yang bersifat negatif, yaitu ketentuan yang mengikat harus membatasi pada larangan bagi hakim untuk melakukan sesuatu yang

²⁰⁷Drs. Ikbah, SH. MH, Hakim Pembimbing di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar, Wawancara oleh Penulis bertempat di ruangan hakim, 9 Oktober 2015.

berhubungan dengan pembuktian. Dalam hal ini, hakim dilarang dengan pengecualian, misalnya dalam hal keterangan saksi bahwa apabila keterangan saksi hanya didapatkan dari seorang saksi saja, dengan tidak ada alat bukti lain, tidak dapat dipercaya di dalam hukum (Pasal 169 HIR (306 Rbg))²⁰⁸.

Dalam menjatuhkan putusan, seorang hakim dipengaruhi oleh pandangan-pandangan atau pikirannya sendiri. Hakim tidak hanya mempertahankan nilai-nilai yang ada, tetapi secara dinamis menciptakan nilai-nilai yang baru atau merekayasa masyarakat sesuai dengan perkembangan zaman²⁰⁹.

Demikian juga halnya dalam pembuktian terhadap alat-alat bukti elektronik. Meskipun tidak diatur di dalam HIR, berdasarkan Pasal 10 Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (UUKK) menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Secara formal, pengertian alat bukti elektronik pada dasarnya belum diatur dalam hukum acara perdata maupun hukum acara pidana di Indonesia, khususnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata atau HIR.

Hakim memberikan suatu putusan hukum berdasarkan alat-alat bukti di persidangan yang sesuai dengan undang-undang. Dengan kata lain, meskipun hakim diberikan kebebasan dalam memutus suatu perkara di pengadilan, hakim juga terikat

²⁰⁸Lintong Siahaan, *Peran Hakim Agung Dalam Penemuan Hukum (Rechtsvinding) dan Penciptaan Hukum (Rechts schepping) Pada Era Reformasi dan Transformasi, varia Peradilan*, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2006, h. 64.

²⁰⁹Drs. Ikbil, SH. MH, Hakim Pembimbing di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar, Wawancara oleh penulis bertempat di ruangan hakim, 9 Oktober 2015.

pada undang-undang yang mengharuskan seorang hakim mampu menyeimbangkan antara fakta yang terjadi di persidangan serta menghubungkannya dengan aturan-aturan yang ada dalam pembuktian yang terdapat di dalam hukum acara²¹⁰.

Alat-alat bukti yang tidak diatur dalam Pasal 164 HIR, tidak dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah. Hal ini dikarenakan hukum acara perdata merupakan hukum formil yang bersifat mengikat. Sebagai orang yang paling berkuasa dalam memutuskan suatu perkara dan dianggap sebagai orang yang dapat memberi *vonnis van de rechter* (keputusan Hakim), seorang Hakim diberikan keleluasaan untuk menemukan hukum (*rechtsvinding*), baik dengan cara melakukan interpretasi hukum (*wetinterpretatie*) maupun dengan menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat²¹¹.

Walaupun Pasal 164 HIR hanya mengatur 5 alat bukti (tidak termasuk bukti elektronik), namun bila para pihak yang berperkara mengajukan bukti elektronik, maka Hakim wajib menerimanya sebagai alat bukti yang sah. 23 Teori hukum *lex specialis derogat lex generalis* juga menjadi acuan hakim dalam mengakui alat-alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah, yaitu undang-undang khusus mengenyampingkan undang-undang yang lama, Melalui UU ITE, berkaitan dengan kekuatan pembuktian dari bukti elektronik, para hakim seharusnya dapat mengakui alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah dan memiliki kekuatan pembuktian

²¹⁰Drs. Ikbāl, SH. MH, Hakim Pembimbing di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar, Wawancara oleh penulis bertempat di ruangan hakim, 9 Oktober 2015.

²¹¹Drs. Ikbāl, SH. MH, Hakim Pembimbing di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar, Wawancara oleh penulis bertempat di ruangan hakim, 16 Oktober 2015.

yang sama dengan alat bukti yang diatur di dalam HIR, tergantung bagaimana para pihak yang berperkara dapat mengajukan serta membuktikan alat bukti tersebut yang selanjutnya dapat diperlihatkan di hadapan hakim dalam persidangan dan disini hakim dengan pengetahuannya menentukan kekuatan alat bukti tersebut, karena masing-masing alat bukti memiliki kekuatan pembuktian tersendiri tergantung dari kasus yang ditangani²¹².



²¹²Drs. Ikbāl, SH. MH, Hakim Pembimbing di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar, Wawancara oleh penulis bertempat di ruangan hakim, 16 Oktober 2015.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya dan hasil penelitian yang penulis lakukan di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar, terhadap penilaian hakim tentang alat bukti elektronik dalam proses pembuktian perkara perdata di pengadilan agama, penulis akan kemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam praktik Penggunaan dokumen elektronik dalam proses pembuktian perkara di pengadilan Agama kelas 1A Makassar merupakan suatu alat bukti yang sah, Berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Dokumen Elektronik dapat dijadikan alat bukti yang sah.
2. Kedudukan alat bukti elektronik di pengadilan Agama kelas 1A Makassar, merupakan alat bukti yang sah, yang mana setiap alat bukti di pengadilan masing-masing memiliki kekuatan pembuktian tersendiri. Penilaian pembuktian diserahkan sepenuhnya kepada hakim. Hakim sepenuhnya berhak memutuskan suatu perkara berdasarkan alat-alat bukti yang ada di persidangan tanpa dipengaruhi oleh undang-undang dan pertimbangan-pertimbangan lain yang membatasi keyakinan hakim. Hal ini tidak terlepas dari salah satu asas dalam Hukum Acara Perdata yaitu *Ius Curia Novit*,

bahwa hakim di anggap tahu hukum dan telah memahami suatu perkara sehingga putusan hakim dari pembuktian dianggap sah secara hukum.

3. Nilai kekuatan pembuktian yang melekat dalam suatu alat bukti elektronik secara yuridis-normatif dipersamakan dengan dokumen yang tertuang di atas kertas. Penegasan ini bermakna, bahwa kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti elektronik dalam perkara perdata dapat dipersamakan dengan kekuatan pembuktian alat bukti tertulis (surat). Kekuatan pembuktian elektronik memiliki nilai pembuktian yang sama dengan alat bukti yang diakui di pengadilan, masing-masing alat bukti memiliki kekuatan pembuktian tersendiri.

B. Implikasi Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, ada beberapa implikasi atau rekomendasi kepada pihak yang berkompeten demi terselenggaranya proses beracara di pengadilan Agama.

1. Penggunaan dokumen elektronik di Indonesia hendaklah dipahami terlebih dahulu dengan sungguh-sungguh apa yang tersurat dan tersirat dalam Undang-Undang, dengan tidak meninggalkan dan tidak boleh terlalu cepat dan terburu-buru dalam mengambil keputusan sebelum memahami secara mendalam dan berfikir yang cukup, menimbang secara matang serta mencurahkan seluruh kemampuannya, sehingga terbentuk suatu hukum yang harmonis. Karena Pembuktian adalah sebuah upaya meyakinkan hakim

dengan segala macam alat bukti. Maka untuk menghindari hal-hal yang dapat merugikan salah satu pihak yang berperkara maka hendaknya seorang hakim dalam menganalisa suatu alat bukti khususnya yang berkaitan dengan bukti Elektronik hendaknya menggunakan saksi ahli untuk memeriksa keaslian alat bukti yang diajukan pihak yang sedang berperkara. Sehingga tidak terjadi kesalahan yang mengakibatkan kerugian pihak-pihak yang berperkara.

2. Dipahami bahwa keputusan hakim di pengadilan merupakan penetapan hak bagi yang dimenangkan dan juga merupakan keputusan bagi yang kalah, mestinya para Hakim bersifat profesional dalam menangani alat Bukti elektronik sehingga tidak terjadi kesalahan di kemudian hari dalam memberikan penetapan keputusan.
3. Diharapkan para Hakim tidak hanya sekedar menilai alat bukti elektronik sebagai alat bukti tambahan, pendukung tapi tidak memiliki kekuatan pembuktian yang kuat.
4. Seiring dengan perkembangan zaman Alat bukti elektronik mestinya sudah bisa di jadikan alat bukti pokok dalam memutuskan sebuah perkara di pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Achmad dan Wiwie Heryani. *Asas-asas Hukum Pembuktian Perdata*. Jakarta: Kencana. 2013.
- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial prudence): Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legis prudence)*. Jakarta: Kencana. 2010.
- Alimuddin. *Pembuktian Anak dalam Hukum Acara Peradilan Agama*. Bandung: Nuansa Aulia. 2014.
- Al-Mawardi, *Al-Ahkām As-Sulṭhaniyyāt: Hukum-hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*, penerj. Fadli Bahri (Cet. IV; Jakarta: Dārul Falāh, 2012
- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata Peradilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2007.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2007.
- Asnawi, M. Natsir. *Hukum Pembuktian Perkara Perdata di Pengadilan: Kajian kontekstual mengenai Sistem, Asas, Prinsip, Pembebanan, dan Standar Pembuktian*. Yogyakarta: UII Press. 2013.
- , *Hermeneutika Putusan Hakim: Pendekatan Multi disipliner dalam Memahami Putusan Peradilan Perdata* Cet. I; Yogyakarta: UII Press, 2014.
- Barkatullah, Abdul Halim. *Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Transaksi E-commerce Lintas Negara di Indonesia*. Yogyakarta : FH UII Press, 2009.
- Baswedan, Ismet. *Hukum Acara Perdata Peradilan Umum*. Surabaya: Airlangga University Press. 2004.
- Bintania, Aris. *Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kerangka Fiqh Al-Qadhā*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2012.
- Djalil, Basiq, *Peradilan Agama Di Indonesia*, Cet. I; Jakarta: Kencana Predena Media Group, 2006.
- Bisri, Cik Hasan, *Peradilan Agama di Indonesia edisi revisi* (Cet. IV; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Fakhriah, Efa Laila. *Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Perdata*. Bandung: Alumni. 2011.
- Fauzan, H.M, *Kaidah Penemuan Hukum Yurisprudensi bidang Hukum Perdata*, Cet. I; Jakarta: Kencana, 2014.

- Fuadi, Munir. *Teori Hukum Pembuktian: Pidana dan Perdata*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2012.
- Hadikusuma, Hilman. *Bahasa Hukum Indonesia*. Bandung: Alumni. 2010.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika. 2012.
- , *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika. 2012.
- Hatta, Ahmad. *Tafsir Qur'ān Per kata: Dilengkapi dengan Asbābun Nuzūl & Terjemah*. Jakarta: Magfirah Pustaka. 2009.
- Hamzah, Andi, Kamus Hukum, Cet; II, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Kamil, Ahmad, *Fisafat kebebasan hakim*. Cet.I; Jakarta: Kencana, 2012
- Kurdi, Muhammad, *Kemandirian Hakim (Perspektif Hukum Islam)*, Cet.I; Makassar, Alauddin University Press, 2012.
- Kartasapoetra, Rien G, *Pengantar Ilmu Hukum Lengkap*, (Cet. I; Jakarta; Bina Aksara, 1986.
- Mahkamah Agung RI, *Pedoman Prilaku Hakim*, Cet: I, 2008.
- , *Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali Perdata Agama Mahkamah Agung RI*, Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, Direktorat Pranata dan Tatalaksana Perkara Perdata Agama, 2013.
- , *Pembaharuan Sistem Pembinaan SDM Hakim*, Mahkamah Agung RI, 2003.
- Mansur, Arief, Dikdik dan Elisatris Gultom. *Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Bandung: Refika Aditama. 2009.
- Manan, Abdul, *Aspek-aspek Pengubah Hukum*. Jakarta: Kencana. 2009.
- , *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan: Suatu Kajian dalam Sistem Peradilan Islam* (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2010.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia edisi revisi*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka. 2013.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2012.
- Mujahidin, Ahmad. *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah di Indonesia: Lengkap dengan Contoh Blanko Perkara*. Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI). 2008.

- Al-Marāghy, Mustafā Ahmad, *Tafsir Al-Marāghy*, al-Qahirāh: Mustafā al-Bāby al-Halabī wa Awlāduh 1383 H/1963 M, Juz X, Cet. III
- Nata, Abdullah, *Metodologi Studi Islam*, Cet. IX; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Nurita, Emma. *Cyber Notary: Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran*. Bandung: Refika Aditama. 2012.
- Panggabean, H.P. *Hukum Pembuktian: Teori-Praktik dan Yurisprudensi Indonesia*. Bandung: Alumni. 2014.
- Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Buku II, Mahkamah Agung RI Direktorat Jendral Peradilan Agama. 2013
- Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum Acara Perdata di Indoensia*. Bandung: Sumur. 1978.
- Pusat bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 2007.
- Puspa, Yan Pramadya. *Kamus Hukum*. Semarang: Aneka Ilmu. 2008.
- Purba, Andar, *Laporan Tim Analisa dan Evaluasi Hukum Tentang Pengaturan Alat Bukti Elektronik Dalam Proses Hukum Perdata*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departement Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, 2004.
- Reksodiputro, Mardjono, *Urgensi Seleksi Hakim Melalui Lembaga Independent*, Buletin Komisi Yusidial, Vol. V, No. 2 Oktober-November 2010.
- Republik Indonesia. Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
- Republik Indonesia. Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Republik Indonesia. Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 1971 tentang Kearsipan.
- Republik Indonesia. Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan.
- Republik Indonesia. Undang-undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Republik Indonesia. Undang-undang RI Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.
- Republik Indonesia. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum.
- Rifai, Ahmad, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Persfektif Hukum Progresif*, Cet. III; Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

- Rimdan, *Kekuasaan Kehakiman Pasca-Amandemen Konstitusi*. Cet. I; Jakarta: Kencana Pramedia Group, 2012.
- Saleh, Muhammad dan Lilik Mulyadi. *Bunga Rampai Hukum Acara Perdata Indonesia: Perspektif, Teoriti, Praktik, dan Permasalahannya*. Bandung: Alumni. 2010.
- Saleh Anshori, Imam, *Konsep Pengawasan Kehakiman*, Malang, Jatim; Cet: I, Setara Press, 2014
- Samosir, Djamanat. *Hukum Acara Perdata: Tahap-tahap Penyelesaian Perkara Perdata*. Bandung: Nuansa Aulia, 2011.
- Samudera, Teguh. *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*. Bandung: Alumni, 1992.
- Sasangka, Hari dan Ahmad Rifai. *Perbandingan HIR dan RBG: Disertai dengan Yurisprudensi MARI dan Kompilasi Hukum Acara Perdata*. Bandung: Mandar Maju. 2005.
- Salam Madkur Muhammad, *Peradilan Dalam Islam*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu 1993.
- Setiawan, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*. Bandung: Alumni. 2008.
- Sjahputra, Iman. *Problematika Hukum Internet*. Jakarta: Prenhalindo. 2002.
- Slamet kurnia Titon, Sri Harini Dwiyatmi, Dyah Hapsari P, *Pendidikan Hukum, Ilmu Hukum & Penelitian Hukum Di Indonesia*, Cet. II; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Soemitro, Romy, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Solahuddin. *KUHP, KUHP, & KUH Perdata: Dilengkapi dengan Undang-undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan KUHP yang Berkaitan dengan Kejahatan terhadap Keamanan Negara*. Jakarta: Visimedia. 2011.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung: CV Alfabeta, 2005.
- , *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D*, Cet. IV; Bandung: Alfabet, 2009.
- Suhariyanto, Budi. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime): Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Sultan, Lomba, Abd. Halim Talli, *Peradilan Islam dalam Lintasan Sejarah*, Sultan, Lomba, *Kekuasaan kehakiman dalam ketatanegaraan islam*, Cet.I; Makassar, Alauddin University Press, 2013
- Sunarto, *Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata*, Cet. I; Jakarta: Kencana, 2014.

- Sutantio, Retonwulan dan Iskandar Oeripkartawinata. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju. 2002.
- Suyuthi Mustafa, Wildan, *Kode Etik Hakim*, Cet. I; Jakarta: Kencana Pramedia Group, 2013.
- Tim Penyusun Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah; Makalah, Skripsi, Tesis, Disertasi dan Laporan Penelitian*. Makassar: Alauddin Press, 2013.
- Tradisi Baru Penelitian Agama Islam: Tinjauan Antar disiplin Ilmu*, Bandung: Nuansa, 2001.
- Tutik, Titik Triwulan. *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana. 2011.
- Talli, Halim, *Peradilan Islam Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia*. Cet. I; Makassar, Alauddin University Press, 2011
- Yanggo T. Huzaimah, *Hukum Keluarga dalam Islam* (Cet. I; Palu: Yayasan Masyarakat Indonesia Baru, 2013.
- Wahid, Abdul dan Mohammad Labib. *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*. Bandung: Refika Aditama. 2010.
- Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Cet. IV; Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Witanto, D.Y. *Hukum Acara Perdata tentang Ketidakhadiran Para Pihak dalam Proses Berperkara (Gugur dan Verstek)*. Bandung: Mandar Maju. 2013.
- Wiranata, Gede, *Dasar-dasar Etika dan Moralitas, (Pengantar Kajian Etika Profesi Hukum)*, Cet. I, Citra Aditya Bakti, 2015.

BERITA WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Tempat/Tanggal Lahir :

Jenis Kelamin :

Pekerjaan :

Alamat :

Menyatakan bahwa saudara:

Nama : Andi Arwin

Nim : 80101214001

Tempat / Tanggal Lahir : Watampone, 23 November 1989

Pekerjaan : Mahasiswa Pascasarjana (S2) UIN Alauddin
Makassar

Alamat : Kom. Taman Asri Indah Blok D. 9, Antang

Judul Penelitian : **Penilaian Hakim Tentang Alat Bukti Elektronik
Dalam Proses Pembuktian Perkara Perdata Di
Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar.**

Benar telah melakukan penelitian/wawancara dengan kami, sesuai dengan kepentingan penyusunan laporan penelitian dengan judul di atas.

Demikian, surat keterangan wawancara ini dibuat dengan benar dan dipergunakan sebagaimana semestinya.

.....
Yang diwawancarai

.....

PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN

Nama Informan I : Drs. Muh. Ikbal, SH. MH.

Nama Informan II : Drs. Chairuddin, SH. MH.

Nama Informan III : Dra. Hj. Sitti Aminah Malik, SH. MH.

Jabatan : Hakim Pengadilan Agama Makassar

Tanggal Wawancara : 28 September s/d 28 Desember 2015

Tempat wawancara : Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar

Judul Penelitian Tesis : **Penilaian Hakim Tentang Alat Bukti Elektronik Dalam Proses Pembuktian Perkara Perdata Di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar.**

Daftar Pertanyaan

1. Bagaimana pendapat Hakim tentang adanya Alat bukti Elektronik yang ditetapkan dalam Undang-undang?
2. Apakah Alat bukti yang ditetapkan ini relevan dengan kehidupan Masyarakat saat ini?
3. Sebelum disahkannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE, Bagaimana pandangan Hakim dalam memeriksa dan mengadili kasus yang berkenaan dengan penggunaan Alat Bukti Elektronik?
 - a. Surat
 - b. Saksi

c. Persangkaan

d. Pengakuan

e. Sumpah

4. Apakah dengan penggunaan Alat bukti elektronik, para Hakim cenderung untuk menempatkannya sebagai alat bukti yang berdiri sendiri atau alat bukti yang membutuhkan tambahan?
 5. Meskipun hal ini telah diakui dalam Undang-undang No. 4 Tahun 2008, sebagai perluasan alat bukti dalam hukum acara yang berlaku di pengadilan, Apakah Hakim sependapat secara penuh dalam hal ini?
 6. Terhadap kasus yang menggunakan alat bukti elektronik bagaimana upaya yang bisa dilakukan menyangkut keabsahan alat bukti elektronik itu sendiri? Surat –Foto Copy?
 7. Bagaimana kekuatan pembuktian yang melekat dalam alat bukti elektronik itu sendiri?
 8. Adapun terhadap penggunaan alat bukti elektronik bagaimana pendapat para hakim?
- Apakah rumit dibandingkan alat bukti konvensional biasa?
9. Bagaimana seharusnya Hakim berbenah diri secara institusi menghadapi maraknya penggunaan alat bukti elektronik tersebut?

	BULAN	JENIS PERKARA		JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MAY	JUNI	JULI	AUGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER
		SISA BULAN LALU	2	431	480	491	480	455	472	452					
		DITERIMA	3	246	202	236	226	190	166	151					
		JUMLAH	4	677	682	727	705	645	638	603					
		DICABUT	5	18	19	30	28	25	18	16					
A. PERKAWINAN		IZIN DIPOLIGAMI	6	-	-	-	-	-	-	-					
		IZIN KAWIN	7	-	-	-	-	-	-	-					
		DISPENSASI KAWIN	8	1	-	3	-	-	1	2					
		PENCEGAHAN PERKAWINAN	9	-	-	-	-	-	-	-					
		PENOLAKAN PERKAWINAN OLEH PPN	10	-	-	-	-	-	-	-					
		PEMBATALAN PERKAWINAN	11	-	-	-	-	-	-	1					
		KELALAIAN ATAS KEWAJIBAN SUAMI/ISTRI	12	-	-	-	-	-	-	-					
		CERAI TALAK	13	33	24		-	-	-	25					
		CERAI GUGAT	14	108	101	-	-	-	-	104					
		HARTA BERSAMA	15	1	-	3	6	1	-	2					
		PENGUASAAN ANAK	16	1	-	-	2	-	1	1					
		NAFKAH ANAK OLEH IBU	17	-	-	-	-	-	-	-					
		HAK-HAK BEKAS ISTRI	18	-	-	-	-	-	-	-					
		PENGUASAAN ANAK	19	-	-	-	-	-	-	-					
		PENCABUTAN KEKUASAAN ORANG TUA	20	-	-	-	-	-	-	-					
		PENCABUTAN KEKUASAAN WALI	21	-	-	-	-	-	-	-					
		PENUNJUKAN ORANG TUA LAIN SBG WALI	22	2	2	-	-	-	-	-					
		GANTI RUGI TERHADAP WALI	23	-	-	-	-	-	-	-					
		ASAL USUL ANAK	24	-	-	-	-	-	-	-					
		PENOLAKAN KAWIN CAMPUR	25	-	-	-	-	-	-	-					
		ISBATH NIKAH	26	1	4	7	4	5	5	1					
		WALI ADHAL	27	1	1	1	-	-	-	-					
		PENGANGKATAN ANAK	28	-	1	1	-	-	-	-					
B		KEWARISAN	29	-	-	3	5	3	-	-					
C		WASIAT	30	-	-	-	-	-	-	-					
D		HIBAH	31	-	-	-	-	-	-	-					
E		WAKAF	32	-	-	-	-	-	-	-					
F		ZAKAT	33	-	-	-	-	-	-	-					
G		INFAK	34	-	-	-	-	-	-	-					
H		SHADAQAH	35	-	-	-	-	-	-	-					
I. EKONOMI SYARIAH		BANK SYARIAH	36	-	-	-	-	1	-	-					
		LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH	37	-	-	-	-	-	-	-					
		ASURANSI SYARIAH	38	-	-	-	-	-	-	-					
		REASURANSI SYARIAH	39	-	-	-	-	-	-	-					
		REKSADANA SYARIAH	40	-	-	-	-	-	-	-					
		OBLIGASI SYARIAH	41	-	-	-	-	-	-	-					
		SEKURITAS SYARIAH	42	-	-	-	-	-	-	-					
		PEMBIAYAAN SYARIAH	43	-	-	-	-	-	-	-					
		PEGADAIAN SYARIAH	44	-	-	-	-	-	-	-					
		DPLK SYARIAH	45	-	-	-	-	-	-	-					
	BISNIS SYARIAH	46	-	-	-	-	-	-	-						
	LAIN-LAIN	47	8	10	1	8	2	-	3						
	CORET-DITOLAK	48	8	4	11	10	8	5	3						
	GUGUR	49	4	4	7	6	-	9	7						
	TIDAK DITERIMA	50	11	21	12	13	-	13	5						
	JUMLAH	51	179	172	217	222	148	168	164						
	SISA AKHIR	52	480	491	480	455	472	452	423						
	KET.	53													

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Pribadi

Nama Lengkap : **Andi Arwin**
NIM : 80101214001
Tempat dan Tanggal Lahir : Watampone, 23 November 1989
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat Rumah : Kompleks Taman Asri Indah Blok D. No 9, Antang, Makassar
Email : madeceng_ko@yahoo.com
Telepon/HP : 085 299 363 918

B. Riwayat Keluarga

Ayah : H. A. Muh. Rusdin
Ibu : Hj. A. Rosmiati
Saudara : 1. Andi Arwini (Adik)

C. Riwayat Pendidikan

1. SD Inpres 12/79 Biru, Watampone (1997 - 2002)
2. Pondok Modern Al-Barokah, Nganjuk, Jawa Timur (2002 - 2008)
3. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar (2009 - 2013)
4. Pascasarjana UIN Alauddin Makassar (2014 - 2016)